

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
(SMP) NEGERI 1 GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister



Oleh:

**DYAH AYU SEKTI NURTYAS GIGIH PANGANTI**

**196030300011001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI  
MINAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**2021**

**MOTTO**

**ILMU UNTUK SEUMUR HIDUP**

**Lembar Pengesahan**

**TESIS**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 1 GONDANGLEGI  
KABUPATEN MALANG**

Oleh:

**Dyah Ayu Sekti NurTyas Gigih Panganti**  
NIM. 196030300011001

Telah dipertahankan didepan penguji  
Pada tanggal 09 November 2021  
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Pembimbing


Ketua

Anggota


  
**Dr. Bambang Santoso Haryono, MS**  
NIP.19610204 198601 1 001

  
**Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si**  
NIP.19690524 200212 2 002

Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi

  
**Dr. Bambang Santoso Haryono, MS**  
NIP.19610204 198601 1 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya

  
**Dr. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D**  
NIP.19670217 199103 1 010



**JUDUL TESIS:**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 1 GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG**

**Nama Mahasiswa** : Dyah Ayu Sekti Nurtyas Gigih Panganti  
**NIM** : 196030300011001  
**Program Studi** : Magister Manajemen Pendidikan Tinggi  
**Minat** : Administrasi Pendidikan

**KOMISI PEMBIMBING**

**Ketua** : Dr. Bambang Santoso Haryono,MS  
**Anggota** : Dr. Lely Indah Mindarti M.Si

**TIM DOSEN PENGUJI**

**Dosen Penguji 1** : Dr. Sarwono., M.Si  
**Dosen Penguji 2** : Dr. Drs. Tjajanulin., MS

**Tanggal Ujian** : 9 November 2021  
**SK Penguji** :

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(UU NO.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 3 Desember 2021

Mahasiswa,



Nama : Dyah Ayu Sekti NurTyas Gigih Panganti

NIM : 1960303000111001

PS : Magister Manajemen Pendidikan Tinggi FIA UB

## ABSTRAK

Dyah Ayu Sekti NurTyas Gigih Panganti, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, **Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Menengah Pertama (Smp) Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang**); Komisi Pembimbing: Ketua: Dr. **Bambang Santoso Haryono, MS.**, Anggota Dr. **Lely Indah Mindarti, M.Si.** 187 Halaman +xiii

Latar belakang penelitian ini adalah dimulai Sejak tahun 2005 pemerintah melaksanakan program BOS bagi pendidikan dasar 9 tahun. Pada tahun 2020, dengan kenaikan dana BOS yang signifikan dari tahun sebelumnya, pemerintah mengimplementasikan pendidikan gratis pada jenjang SD dan SMP. Salah satu masalah yang belum diketahui dengan baik dalam kaitannya dengan implementasi program tersebut adalah seberapa baik program tersebut telah dilaksanakan dan apa saja yang mempengaruhi implementasinya di SMP. Penulisan tesis dengan judul, Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang, Rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana proses pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang? serta Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis: proses pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang, serta faktor pendorong dan penghambat dalam proses pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumen serta menggunakan analisis data Miles, Huberman dan Saldana

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Pertama (Smp) bila dianalisa dengan Model teori George C. Edward yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar ditinjau dari segi komunikasi yang berjalan dengan baik dan terstruktur dengan sumber daya yang memadai, menunjukkan komitmen (disposisi) dalam mensukseskan program dana BOS yang berjalan secara terstruktur mulai dari pusat sampai dinas pendidikan setempat sampai akhirnya ke sekolah.

Terdapat beberapa faktor dalam Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara lain: Faktor pendorong: Terpenuhinya kebutuhan sekolah Membuat minat anak untuk sekolah di SMPN 1 Gondanglegi, Antusias Masyarakat Memilih Sekolah Gratis sehingga sekolah tidak bingung dalam mencari murid, Kondisi Angka Putus Sekolah dapat ditekan Setelah Adanya Program BOS sehingga jumlah siswa stabil dan jumlah dana BOS tetap stabil, Faktor Penghambat : Waktu Pencairan Dana Bos yang tidak sesuai dengan jadwal, Pembelajaran pada masa Pandemi covid 19 yang mengharuskan sekolah pengadaan protokol kesehatan yang tidak sesuai dengan RKAM, urangnya pengetahuan orangtua siswa tentang dana BOS, Ada Campur Tangan Birokrasi Dalam Pengelolaan Dana BOS Yang mengharuskan sekolah membeli keperluan yang tidak sesuai dengan RAPBS.

Kata kunci: implementasi, pelaksanaan dana BOS

## SUMMARY

Dyah Ayu Sekti NurTyas Gigih Panganti, Graduate Program of Universitas Brawijaya Malang, Implementation of School Operational Assistance Program (BOS) at State 1 Gondanglegi Junior High School, Malang Regency); Advisory Committee: Chair: Dr. Bambang Santoso Haryono, MS., Member of Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si. 187 Pages +xiii.

---

The background of this research began in 2005 the government implemented the BOS program for 9 years of basic education. In 2020, with a significant increase in BOS funds from the previous year, the government implemented free education at the elementary and junior high school levels. One of the well-known problems in implementing the program is how well the program has been implemented and what influences its implementation in SMP. Writing a thesis with the title, Implementation of the School Operational Assistance Program (BOS) at State Junior High School 1 Gondanglegi Malang Regency, The formulation of the problem in this study: How is the process of implementing the School Operational Assistance (BOS) program at State Junior High School 1 Gondanglegi Malang Regency? and what are the supporting and inhibiting factors in the implementation process. The purpose of this study was to determine, describe, and analyze: the process of implementing the School Operational Assistance (BOS) program at the State Junior High School 1 Gondanglegi Malang Regency, as well as the driving and inhibiting factors in the implementation process.

The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are interviews, observations and document studies as well as using data analysis Miles, Huberman and Saldana

The findings in the field indicate that the implementation of the School Operational Assistance Program (BOS) in Junior High Schools (Smp) when analyzed with George C. Edward's theoretical model, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure in its implementation runs smoothly in terms of good communication. running well and structured with adequate resources, showing a commitment (disposition) in the success of the BOS fund program which runs in a structured manner starting from the center to the local education office and finally to schools.

There are several factors in the implementation of the School Operational Assistance Program (BOS), including: Driving factors: Fulfillment of school needs Creating interest in children to go to school at SMPN 1 Gondanglegi, Enthusiasm of the Community to Choose Free Schools so that schools are not confused in finding students, Conditions for Dropout Rates can suppressed after the existence of the BOS Program so that the number of students is stable and the amount of BOS funds remains stable, Inhibiting Factors: Time for Disbursement of Boss Funds that are not according to schedule, Learning during the Covid 19 Pandemic which requires schools to procure health protocols that are not in accordance with the RKAM, lack of parental knowledge students about BOS funds, there is bureaucratic interference in the management of BOS funds which requires schools to buy necessities that are not in accordance with the RAPBS.



Keywords: implementation, implementation of BOS funds



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah -Nya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang)” Tesis ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister Manajemen Pendidikan Tinggi di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak khususnya kepada:

1. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Bambang Santoso Haryono, MS selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Bambang Santoso Haryono., MS selaku Ketua Pembimbing Tesis yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan, semangat dan dorongan kepada peneliti dalam menyusun tesis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Anggota Pembimbing Tesis yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan, semangat dan dorongan kepada peneliti dalam menyusun tesis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Manajemen Pendidikan Tinggi di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Pendidik dan Kependidikan di SMP Negeri 1 Gondanglegi, terkhususnya kepada Bapak Muchamad Baihaqqi, Bu Nurul, Bapak Dedi, Bapak Sunan, Ibu Yati, Bapak Eko yang telah memberikan arahan serta informasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Sahabat-sahabatku (Winda Fashihah, Fitra Dewi Bila, Khoirunnisa Aliyah, Athrusy Robiul Hakim, Rindi Ardika Melsalasa, Anggra Wiradita, Maya Kurniawati, Teguh Yudi, Fitria Puji Hermeni, Filogus Payon, Arif Andoyo dan Abdul Khaqim serta sahabat magisterku yang lainnya).
8. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan tesis ini.

Demi Kesempurnaan tesis ini, kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>IDENTITAS PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	19
1.3 Tujuan Penelitian .....	19
1.4 Manfaat Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
2.2 Kerangka Dasar Teoritik .....	29
2.2.1. Kebijakan Publik .....	29
2.2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik.....	29
2.2.1.2. Kebijakan Pendidikan .....	32
2.2.1.3. Implementasi Kebijakan Publik .....	34
2.2.2. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	36
2.2.3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	57
2.2.3.1. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .....	57
2.2.3.2. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .....	58
2.2.3.3. Prinsip Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .....	60
2.2.3.4. Sasaran dan Besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	60
2.2.3.5. Ketatausahaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .....	62
2.2.4. Boskab atau Bos daerah .....	71
2.2.4.1. Tujuan Pemberian BOSDA.....	72
2.2.4.2. Mekanisme Penyaluran BOSDA.....	73
2.2.4.3. Sasaran BOSDA .....	73
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>76</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	76
3.2. Informan Kunci .....	80
3.3. Sumber Data .....	82
3.4. Fokus Penelitian .....	83

3.5. Lokasi Dan Situs Penelitian .....	85
3.6. Metode Pengumpulan Data .....	86
3.7. Uji Keabsahan Data.....	89
3.8. Metode Analisis Data .....	91
<b>BAB IV. ANALISIS LATAR KONDISI SOSIAL PENELITIAN .....</b>	<b>93</b>
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Malang .....	93
4.1.1. Visi, Misi kabupaten Malang.....	94
4.1.2 Latar belakang demografis .....	96
4.1.3 Latar belakang pemerintahan.....	99
4.2. Gambaran Umum Kecamatan Gondanglegi .....	101
4.2.1 Sejarah Kecamatan Gondanglegi.....	101
4.2.2 Kondisi Geografi kecamatan Gondanglegi.....	102
4.2.3 Kondisi Demografi Gondanglegi.....	103
4.2.4 Visi -Misi Kecamatan Gondanglegi .....	104
4.3 Gambaran Umum SMP N 1 Gondanglegi.....	106
4.3.1 Visi-Misi SMP N 1 Gondanglegi .....	106
4.4 Kerangka Pikir .....	110
<b>BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>112</b>
5.1 Hasil Penelitian .....	112
5.1.1 Implementasi pelaksanaan Dana BOS .....	112
5.1.1.1 Komunikasi .....	115
5.1.1.1.1 Pelaksanaan Transmisi.....	116
5.1.1.1.2 Konsistensi Implementasi .....	117
5.1.1.1.3 Kejelasan .....	118
5.1.1.2 Sumber daya .....	122
5.1.1.1.1 Staf Yang berwenang .....	122
5.1.1.1.2 Pengawasan .....	125
5.1.1.1.3 Fasilitas .....	128
5.1.1.3 Disposisi.....	130
5.1.1.3.1 Monitoring Evaluasi.....	132
5.1.1.4 Struktur Birokrasi.....	134
5.1.1.4.1 Standard Operasional produk.....	134
5.1.1.4.2 Fragmentasi .....	137
5.2.1 Implementasi Pelaksanaan Boskab .....	139
5.2.1.1 Mekanisme Penyaluran Boskab .....	139
5.2.1.2 Komunikasi .....	141
5.2.1.3 Sumberdaya.....	142
5.2.1.3.1 Staf .....	142
5.2.1.3.2 Sosialisasi Boskab .....	143
5.2.1.3.3 Fasilitas .....	145
5.2.1.4 Disposisi.....	146
5.2.1.5 Struktur Birokrasi.....	147
5.2.1.5.1 Standar Operasional Produk.....	149
5.2.1.5.2 Fragmentasi .....	149
5.3.1 Faktor Pendorong dan penghambat.....	150
5.3.1.1 Faktor Pendorong.....	150
5.3.1.1.1 Terpenuhinya kebutuhan sekolah.....	151
5.3.1.1.2 Antusias Masyarakat .....	152

5.3.1.1.3	Menekan putus sekolah.....	153
5.3.1.1.4	Dampak .....	154
5.3.1.2	Faktor Penghambat.....	155
5.3.1.2.1	Waktu pencairan.....	155
5.3.1.2.2	Pembelajaran saat Covid.....	156
5.3.1.2.3	Minimnya pengetahuan Orang tua.....	157
5.3.1.2.4	Campur Tangan Birokrasi.....	159
5.4	Pembahasan.....	160
5.4.1	Implementasi Pelaksanaan dana BOS.....	161
5.4.1.1	Komunikasi .....	163
5.4.1.1.1	Transmisi.....	164
5.4.1.1.2	Konsistensi .....	164
5.4.1.1.3	Kejelasan .....	164
5.4.1.2	Sumber -sumber .....	165
5.4.1.2.1	Staf .....	165
5.4.1.2.2	Informasi .....	166
5.4.1.2.3	Fasilitas .....	167
5.4.1.3	Disposisi.....	167
5.4.1.4	Struktur Birokrasi.....	168
5.4.1.4.1	Standar Operasional Produk.....	169
5.4.1.4.2	Fragmentasi .....	165
5.5.1	Implementasi Bosdaerah .....	170
5.5.1.1	Komunikasi .....	172
5.5.1.2	Sumberdaya.....	172
5.5.1.2.1	Staf .....	173
5.5.1.2.2	Informasi .....	173
5.5.1.2.3	Fasilitas .....	173
5.5.1.3	Disposisi.....	174
5.5.1.4	Struktur Birokrasi.....	174
5.5.1.4.1	Standar Operasional Produk.....	175
5.5.1.4.2	Fragmentasi .....	175
5.5.2	Faktor pendorong dan Penghambat.....	176
5.5.2.1	Faktor Pendorong.....	176
5.5.2.1.1	Terpenuhinya Kebutuhan.....	176
5.5.2.1.2	Antusias Masyarakat.....	176
5.5.2.1.3	Kondisi angka putus sekolah.....	177
5.5.2.1.4	Dampak .....	177
5.5.2.2	Faktor Penghambat.....	177
5.5.2.2.1	Waktu Cair Dana BOS.....	177
5.5.2.2.2	Pembelajaran saat Covid.....	178
5.5.2.2.3	Kurangnya Pengetahuan dana BOS .....	178
5.5.2.2.4	Campur tangan birokrasi .....	179
<b>BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>180</b>
6.1	Kesimpulan .....	180
6.2	Saran .....	184
<b>Daftar Pustaka .....</b>		<b>188</b>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Perbedaan Penelitian yang Akan Dilakukan .....	21
Tabel 2.2: Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Komponen-komponen Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman .....	65
Gambar 4.1: Struktur Organisasi.....	109
Gambar 4.2: Model kerangka konseptual penelitian.....	110





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	192
Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara .....	198
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara .....	213
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian .....	216



**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Melalui konsep yang ada didalam norma Pendidikan. Pendidikan memanglah mempunyai suatu peran yang tidak kalah penting untuk melakukan mengembangkan dan meningkatkan mutu untuk meningkatkan kompetensi semaksimal mungkin yang dimiliki oleh semua sumber daya bisa berupa sumber daya alam dan manusia itu sendiri. Pengembangan potensi manusia ini sesuai dengan Undang-undang di negara Indonesia yang mengatur agar pengembangan potensi manusia semakin baik yaitu terdapat pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 membahas mengenai sistem Pendidikan yang ada di Indonesia yang ada bahwasannya suatu Pendidikan adalah sebuah usaha terencana dan sadar agar terwujudlah proses belajar dan kondisi belajar untuk mendorong siswa aktif membentuk perkembangan dan menggali akan potensi dalam diri mereka agar mereka mempunyai pengendalian,kecerdasan, kepribadian, keagamaan, akhlak serta kompetensi keterampilan dalam hidup didalam kehidupan bermasyarakat bernegara.

Berikut pernyataan Badrudin (2013: 1), tentang pendidikan yaitu:

“Pendidikan adalah usaha untuk melakukan peningkatan pada kehidupan dengan mengembangkan potensi yang sudah di punya. Proses yang dibutuhkan tentu memerlukan pengolahan yang maksimal agar hasil yang diperoleh juga optimal dan sebaik mungkin”.

Upaya yang sangat mendukung untuk meningkatktan sumber daya manusia

yaitu dengan cara berpendidikan. Pendidikan memang sangat dibutuhkan dan penting untuk masyarakat dan setiap bangsa yang ada di Indonesia dengan Pendidikan dapat generasi yang cerdas dan terbangunlah tatanan kehidupan yang lebih baik lagi. pendidikan sangat berhubungan dengan pembangunan pada bangsa yang ada. maka dari itu kualitas Pendidikan adalah suatu program dan kebijakan yang memang harus dilakukan lebih optimal lagi agar berpengaruh pada siswa.

Majunya pendidikan merupakan sebuah tujuan yang diinginkan oleh Indonesia untuk dicapai pada negara Indonesia yang ada didalam alenia empat pada pembukaan undang-undang dasar 1945 bahwa “agar terbentuk pemerintahan yang dapat memberikan perlindungan pada seluruh warga dan memberikan kesejahteraan, memberikan kecerdasan pada kehidupan untuk masyarakat dan turut melakukan menjaga ketertiban pada dunia.” Maksudnya dari turut memberikan kecerdasan pada kehidupan-kehidupan warga dan melakukan peningkatan untuk sumber daya manusiannya yang sesuai dengan pembangunan. Upaya yang dicapai dalam tujuan dibidang pembangunan untuk Pendidikan nasional pemerintah menyelenggarakan Pendidikan dengan prinsip-prinsip agar mencapai harapan warga Indonesia. berikut prinsip Pendidikan menurut Departemen Pendidikan Nasional (2003:11) antara lain yaitu :

- 1) “Terselenggaranya Pendidikan dengan cara demokratis, luas, dan terpeta serta adil tidak melakukan Tindakan diskriminasi semuanya sama untuk memperoleh kesempatan layanan Pendidikan. Melakukan pelayanan dengan menerapkan hak asasi antar sesama warga menjunjung tinggi nilai - nilai kehidupan misalnya kultural, keagamaan.
- 2) Penyelenggaraan Pendidikan dengan satu kesatuan secara sistematis menggunakan sistem yang multi akan makna dan lebih terbuka lagi.
- 3) Penyelenggaraannya dinilai pada prosesnya dalam melakukan pemberdayaan serta membudayakan siswa-siswi dengan proses yang dilakukan untuk kehidupan

selamanya.

- 4) Penyelenggaraan Pendidikan diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk mendorong kemauan peserta didik, dan memberikan contoh yang baik, mengembangkan inovasi-inovasi pada diri peserta didik saat melakukan kegiatan proses belajar mengajar.
- 5) Penyelenggaraannya dengan membiasakan pada budaya menulis, membaca dan berhitung untuk semua masyarakat Indonesia di berbagai kalangan
- 6) Penyelenggaraannya melakukan pemberdayaan pada komponen warga dengan cara memberikan peran didalam terlaksananya pembelajaran serta mengendalikan mutu pada pelayanan Pendidikan yang ada.”

Meningkatnya kualitas pada sumber daya manusia itu selalu menggantungkan diri dari kualitas Pendidikan yang lebih baik lagi. Apalagi Pendidikan yang bersifat formal pasti melihat proses pada pembelajaran yang tengah dilakukan oleh sekolah untuk kebutuhan siswa-siswinya. Tetapi masih bisa kita lihat di dunia nyatanya pengupayaan Pendidikan agar lebih meningkat kualitasnya masih ditemukan banyak kesalahan dan masalah serta kendala yang terlihat. Umumnya implementasi Pendidikan yang sangat berkualitas masih kurangnya tingkat ketersediaan sarana prasarana yang memadai sehingga menyebabkan tidak optimal proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah.

Sebuah proses memanglah penting untuk mencapai tujuan, oleh karena itu kegiatan belajar mengajar dikatakan optimal jika mampu memberikan Pendidikan pada peserta didik sehingga menjadi individu yang berkualitas baik itu dari segi pengetahuan maupun kemampuan juga daya saing untuk melaksanakan Pendidikan berikutnya. Sehingga tujuan Pendidikan yang tertera pada undang -undang dasar juga turut tercapai dengan baik.

Apabila suatu kebijakan melihatnya dengan sebuah proses, maka yang menjadi pusatnya pada sebuah pergerakan siklus dari kebijakan. Umumnya terkait

dengan beberapa tahapan misalnya formulasi, pelaksanaan dan penilaian dari kebijakan yang sedang dilakukan (Parsons, 1997).

Dari banyaknya orang yang membuat kebijakan mereka menganggap bahwasannya sesudah sebuah kebijakan di legalkan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang sesuai dengan kebijakan itu untuk mengesahkan. Maka kebijakan itu sendiri dapat di gunakan dan hasil yang didapat kira-kira akan sesuai dengan harapan. Menurut Islamy (2004) kebijakan sangat kompleks dan memiliki peranan satu sama lain secara erat. Oleh sebab itu sedikit sekali negara dengan sifat penerapan *self-executing*. Maksudnya adalah setelah dirumuskan pada kebijakan yang ada dan dapat diterapkan. Paling banyak kebijakan bersifat *non self-executing* yaitu negara perlu melakukan sosialisasi hingga mencapai dan melaksanakan kebijakan itu dengan banyak pihak yang berperan didalamnya dampak yang diharapkan akan sesuai yaitu mencapai harapan yang diinginkan.

Tahapan dalam melakukan kebijakan publik salah satunya adalah implementasi.

Menurut Jones (1991: 296) berpendapat bahwasannya:

“Implementasi adalah kegiatan ditujukan untuk mengoperasikan program-program yang sudah dibuat didalamnya.”

Lalu kegiatan yang dapat di operasikan berisikan Tindakan yang dapat di lakukan dengan peran banyak orang, individu, pejabat atau pemerintah agar kebijakan berguna dan menggapai tujuan yang di tujukan.

Maksud dari implementasi sesuai dengan konsep implementasi adalah kegiatan pelaksanaan atau penyelesaian dari kebijakan yang sudah disetujui penggunaanya menggunakan alat dan sarana agar tercapai tujuan yang di harapkan. Implementasi

adalah sebuah jembatan yang memberikan penghubungan akan Tindakan dan tujuan yang akan di capai dari kebijakan yang ada. Didalam implementasi ada hubungan - hubungan misalnya sebab - akibat akan Tindakan yang dilakukan dengan tujuan dari Tindakan ini. Sesuai dengan pendapat yang dinyatakan oleh Pressman dan Wildavsky (1991: 295) bahwa:

“Implementasi adalah suatu kemampuan digunakan agar terbentuk hubungan yang lebih dalam berbagai macam rangkaian dari sebab akibat yang berkaitan dengan tujuan dan tindakan yang sesuai.”

Kegiatan implementasi fondasinya selalu memiliki sifat kompleks dikarenakan memang ditentukan banyak faktor baik dari eksternal dan internal. Van Mater dan Van Horn (1975: 46) melakukan formulasi pada proses dan tampilan implementasi kedalam 6 aspek antara lain:

“(1) Jelasnya standar yang diterapkan dan adanya tujuan yang hendak dicapai dari adanya kebijakan (2) Banyaknya penyediaan sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam implementasi contohnya fisik, staf, pelaksana dan organisasi, (3) Komunikasi yang mendukung serta lancar, jelas dan seimbang antara pelaksana dan antar divisi didalam organisasi,(4) Karakter pelaksana yang akan mendorong suksesnya pelaksanaan kebijakan (5) Kondisi ekonomi, social, politik pada tempat terjadinya penerapan kebijakan itu ,(6) komitmen dan kesediaan dari berbagai macam pelaksana yang ada dilapangan untuk mencapai tujuan yang di inginkan.”

Pendapat dari Syukur dalam tulisan Sumaryadi (2005: 79) mengatakan bahwasannya ada 3 aspek yang sangat penting didalam kegiatan implementasi adalah

“(1) Terdapat kebijakan dan program yang di lakukan (2) target kelompok, adalah kelompok didalam warga yang akan menjadi sasaran nantinya dan dapat diharapkan untuk dapat menerima manfaat dari adanya program, meningkatnya kesejahteraan atau berubah kearah lebih baik lagi (3) Pelaksana baik itu berbentuk individu atau kelompok yang dapat memiliki tanggung jawab dan mendapatkan pengendalian dan implementasi dari adanya kegiatan pelaksanaan kebijakan yang ada.”

Berikut aspek implementasi atau yang disebut pelaksana yang akan memiliki tanggung jawab akan berhasilnya sebuah kegiatan misalnya pemerintah dari tingkat desa, camat, kota atau kabupaten, provinsi hingga seluruh Indonesia. sudah dapat dipastikan keberadaannya pemerintah menjadi salah satu aspek yang sangat penting didalam melakukan kegiatan implementasi. Peran dari pemerintahan sebagai pelaksana adalah besar dikarenakan memiliki andil yang kuat dalam kegiatan pelaksanaan yang berjalan ini.

Berkaitan dengan proses, implementasi berhubungan dengan banyak sumber untuk menjadikan sarana pendorong dan pendukungnya misalnya sumber daya manusia , dana dan kompetensi organisasi baik organisasi swasta dan pemerintah.

Berikut Widodo(2007:88) mengutarakan implementasi adalah:

“Terlaksananya sebuah kebijakan suatu bentuk dari kegiatan yang dapat membuahkan hasil dan dampak serta manfaat yang akan di rasakan oleh kelompok target tertentu.”

Pelaksanaan kegiatan kebijakan adalah suatu tahap dari sebuah proses kebijakan memiliki sifat penting diperhatikan saat membuat keputusan. Mengapa bisa bersifat penting dikarenakan sebaik-baiknya kebijakan jika tidak di rencanakan terlebih dahulu dan disiapkan dengan baik maka pelaksanaannya tidak dapat sebaik harapan. Begitu pula kebalikannya jika perencanaan dan persiapan sudah baik namun tidak ada perumusannya maka tujuan dari kebijakan yang diharapkan akan sulit terwujud.

Saat melakukan penggunaan dari Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada di daerah Kabupaten Malang telah mendapati beragam hambatan didalam

pengolahan dana ini. Berikut hasil data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, kurangnya sarana -prasarana, misalnya sekolah-sekolah SMP yang berada di daerah Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang hanya yang mempunyai perpustakaan dari seluruh jumlah SMP 37 hanya 27 yang memiliki perpustakaan tersebut.

Masih Banyak juga SMP di Kecamatan Gondanglegi yang masih mendapatkan halangan akan fasilitas Ketika hendak melakukan kegiatan ujian nasional. Yaitu dari 37 sekolah ada 27 sekolah yang dapat melakukan ujian nasional secara mandiri sisa dari sekolah itu 10 SMP melakukannya secara menggabungkan pada sekolah lain. Kegiatan pembelajaran juga dari 37 SMP di kecamatan Gondanglegi hanya ada 27 sekolah yang punya perpustakaan. Hal ini dapat memperlambat dan menjadi faktor penghambat kegiatan pembelajaran. Selain itu dari data yang ada di tahun 2021 masih ada kelas sebanyak 325 kondisinya buruk dari 401 kelas. 40 rusak ringan 16 rusak berat. (Sumber: Dapodik Kabupaten Malang).

Dana BOS ini adalah kegiatan dari program-program yang ada didalam pemerintah di Pendidikan terancang agar terjamin berlangsungnya Pendidikan di sekolah-sekolah menengah dan dasar. Dengan kegiatan ini pemerintah besar harapannya untuk melakukan pembuktian kominten akan menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan layanan di bidang Pendidikan sebaik mungkin.

Permulaan adanya program bantuan dana BOS ini dilakukan di tahun 2005 ditetapkan oleh DPR RI dan pemerintah hasil dananya dari Kompensasi subsidi bahan bakar minyak.

Sesudah pemberlakuan program dana BOS ditahun 2005 pemerintah menjadi pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengimplementasian dana



BOS ini namun tetap menemui hambatan. Dikarenakan perjalanan pengimplementasiannya, dana ini memberikan dampak akan kemunculan beragam permasalahan misalnya alokasi, sosialisasi, distribusi dan beberapa orang yang tidak mendukung program dana BOS ini. Masalah lainnya juga data siswa yang berubah karena siswa tersebut mutasi, dan SPJ di penggunaan dana belum terlaporkan sehingga data tidak dipantau, banyak sekolah yang belum membuat administrasi dengan benar, tidak jelasnya peserta didik yang kurang mampu dengan indikator-indikator untuk mendapatkan dana bos ini sehingga peserta didik tersebut bebas dari iuran-iuran sekolah. Dan ada peserta didik yang tidak bisa membayar beban sekolah.

Melihat dari Peraturan Menteri Pendidikan yang terjadi didalam Nomor 6 Tahun 2021 terkait penggunaan teknik pengolahan bantuan Operasional sekolah di nyatakan bahwasannya:

“Dana BOS ini di pergunakan agar sekolah dapat mendanai belanja - belanja non-personalia di tingkat Pendidikan menengah dan dasar. Sebagai pengimplementasi program wajib belajar dan dana tersebut juga dapat digunakan mendanai kegiatan -kegiatan lain. Yang pastinya tetap terkait dengan undang -undang yang ada. BOS regular adalah dana yang di berikan untuk mencukupi kegiatan pembelanjaan operasional pada semua siswa -siswi di Pendidikan menengah dan dasar.”

Pengolahan dana BOS ini di kerjakan berpedoman dengan prinsip-prinsip yang dilakukan sejalan pada peraturan Menteri dan kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 adalah:

- a. Fleksibel penggunaannya di lakukan sejalan untuk membiayai kebutuhan, kekurangan pada sekolah-sekolah.
- b. efektif penggunaannya mengupayakan akan selalu menghasilkan memberikan pengaruh agar tujuan sekolah tercapai.
- c. Efisien dana bos di gunakan agar kualitas Pendidikan dan pembelajaran terus meningkat. Dana yang dikeluarkan juga diharapkan minimal dan menghasilkan keoptimalan dan kepuasan dari segi hasil yang akan diperoleh.

- d. Akuntabilitas penggunaannya dan pengimplementasiannya bisa memiliki tanggung jawab secara utuh dengan pertimbangan logis yang dibuat berdasarkan undang-undang.
- e. Transparan penggunaannya dilakukan dengan cara yang terbuka serta mengakomodir pendapat-pendapat para pembuat kebijakan yang akan sejalan dengan membenahi dan mengatasi masalah yang ada disekolah.

Dari cara formal kegiatan BOS pertama kali diluncurkan di bulan Juli 2005.

Akan tetapi dalam perjalanannya sempat diadakan rapat dan lokakarya yang dibuat oleh dinas Pendidikan di seluruh Indonesia ditingkat provinsi yang dipimpin oleh departemen Pendidikan di tingkat nasional. Wacana akan program dana bantuan operasional sekolah ini sudah ada dan mulai muncul. Menurut beberapa orang yang turut Menyusun program ini konsep pertama kali yang disusun yaitu program dana bantuan operasional sekolah yang gratis (BOSG).

Walaupun BOSG masih berbentuk rencana akan tetapi dalam perkembangan seiring waktu berubah menjadi dana BOS. Pemahaman yang dipakai adalah sekolah akan gratis dikemudian harinya sudah tersebar ke tingkatan sekolah-sekolah di Indonesia. Bahkan kabar ini telah sampai ditelinga warga Indonesia. Adapun bentuk dari ide akan sekolah yang gratis ini juga ditambah akan adanya sosialisasi yang dilakukan secara non-teknis ini pula yang menyampaikan akan ide sekolah secara gratis. Dampak dari adanya hal ini muncullah masalah untuk memproses sosialisasikan teknis mengenai penggunaan dana ini. Dikarenakan hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan yang ada digambaran masyarakat pada umumnya akan sekolah gratis yang sudah di harapkan oleh masyarakat banyak.

Akibat dari hal-hal yang sudah tersosialisasikan akan kefahaman masyarakat tentang adanya wacana dana BOS ini dengan mengatasmakan sekolah yang gratis,

dampak dari itu distribusi dan sosialisasi ini menjadi sangat penting untuk mempengaruhi akan meningkatnya keberhasilan program dana BOS Ini. sesudah itu pelaksanaan dana BOS ini masih dinilai banyak kekurangan dan penghambat dari banyak orang yang menilai.

Masalah-masalah di ataslah yang menjadikan lokasi penelitian ini dilakukan di pada SMP negeri I Gondanglegi dikarenakan sekolah ini masih sering mengalami banyak kekurangan dari segi pengalaman manajer yang dipunyai oleh para pengelola dan juga kegiatannya ini masih diperlukan kegiatan untuk belajar lebih keras lagi agar masalah teratasi. Penelitian ini berusaha mengungkapkan fungsi dan peran antara pihak yang berkaitan sebagai implementator untuk melakukan program bantuan akan melancarkan tugas pengolahan dana BOS di kabupaten Malang ini.

Berdasarkan PERMENDIKBUD no 1 thun 2018 tentang alokasi pada dana BOS ini di jenjang SMP sekitaran 1.000.000 bagi setiap individunya hal itu dipakai selama satu tahun. Pada tahun 2019 juga besarnya alokasi dana tetap 1000.000 bagi setiap muridnya. Tetapi pada tahun 2019 hingga tahun 2020 dana BOS terus naik dari semua tingkatan Pendidikan mulai dari SD, program formal khususnya hingga tingkatan SMK atau SMA semuanya mendapatkan jatah dana ini. Bahkan pemerintah juga mengeluarkan dana untuk Pendidikan nonformal seperti pemberian Pendidikan pada beberapa program difabilitas. Pendidikan khusus ini adalah Pendidikan untuk siswa yang mengidap keistimewaan karena cerdas luar biasa. Berikut dana besaran untuk alokasi dana BOS setiap peserta didik menurut pada permendikbud no 8 tahun 2020 jumlah penggelontoran dana BOS yang sesuai pada jenjangnya yang mengalami kenaikan yang signifikan adalah sebagai berikut:

A. Untuk peserta didik SD tahun 2019 mendapatkan Bantuan dari dana BOS sebesar

Rp. 800.000,00 sekarang naik menjadi 900.000,00 satu orangnya atau per individu.

B. SMP pada tahun 2019 mendapatkan dana BOS sebesar 1000.000,00 lalu sekarang

naik sekitar Rp. 1.100.000 per individunya.

C. SMA sebesar 1.400.000,00 naik sebesar 1.500.000 per 1 siswanya.

D. SMK mendapatkan 1.400.000 dan naik sekitar 1.600.000 per 1 siswanya.

E. SLB yang tadinya Rp. 2000.000,00 sekarang naik menjadi 2.100.000,00

Masalah yang terjadi pada dana BOS ini adalah sosialisasi yang mempengaruhi kefahaman akan masyarakat luas serta masih minim mengadakan sosialisasi dan salah faham akan program dana BOS ini.

Tidak efektif juga proses sosialisasi masih terlihat dari kedatangan wali murid siswa-siswi, apalagi siswa -siswi yang dikatakan golongan kurang mampu yang tidak tahu adanya pembantuan dana ini dari pemerintah untuk mereka. Masalah ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya proses sosialisasi, keluarga kurang mampu ini kurang mengakses media kabar yang umumnya bisa dinikmati masyarakat bercukupan misalnya surat kabar, radio, televisi. Keadaan yang seperti inilah yang memberikan kefahaman akan kekeliruan untuk warga kurang mampu tersebut dan kemungkinan terparah lagi proses sosialisasi akan gagal.

Belum lagi permasalahan terkait tidak cukupnya dana BOS untuk operasional sekolah sebenarnya telah disadari sejak awal oleh pemerintah terutama apabila BOS diorientasikan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Oleh sebab itu dalam panduan dana BOS disebutkan bahwa apabila dana BOS dari Depdiknas belum

mencukupi maka pemerintah daerah wajib memenuhi kekurangan dana operasional dari APBD.

Peran pemerintah daerah juga turut menentukan keberhasilan program pembiayaan pendidikan melalui dana BOS. Kewajiban pemerintah daerah adalah menyediakan dana pendamping BOS dari pusat dengan dana APBD sehingga kebutuhan sekolah dapat dipenuhi sesuai dengan standar nasional. Dalam praktiknya ketentuan ini belum sepenuhnya dijalankan sebagaimana mestinya. Banyak daerah yang belum mau atau belum mampu mengalokasikan anggaran untuk menutupi kekurangan dana BOS. Itu berarti sekolah dibiarkan beroperasi dengan dana di bawah standar. Praktik penyelenggaraan pendidikan semacam ini dalam jangka panjang akan mempengaruhi mutu layanan pendidikan.

Lingkup peran pemerintah daerah bukan hanya terbatas pada keikutsertaan dalam pembiayaan namun juga peran dan tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan program dari tahap awal sampai dengan implementasi termasuk pengawasan. Masalah yang tidak kalah pentingnya adalah sejauhmana hak-hak para pemangku kepentingan khususnya para siswa terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terlebih lagi bagi siswa miskin di sekolah swasta mengingat sekolah swasta tidak termasuk dalam sasaran implementor sekolah gratis namun sekolah swasta adalah penerima dana BOS yang wajib menggratiskan siswa miskin.

Seperti yang sudah dikatakan Dunn (1994: 58) bahwasannya:

“Masalah-masalah yang saat ini tengah di hadapi oleh pemerintah yaitu masalah dari publik, peluang dan nilai -nilai kebutuhan kedua ini apabila tidak bisa diwujudkan dapat dilakukan indentifikasikan namun cara untuk mencapainya hanya dengan menggunakan Tindakan publik.”

Terkait pendapat diatas maka bisa diberikan kesimpulan upaya untuk merumuskan kebijakan apalagi bentuk kebijakan tersebut termasuk kedalam peraturan di daerah -daerah maka kebijakan tersebut pasti dalam merumuskan tidak semudah itu dikarenakan dalam memberikan rumusan maka banyak kekuatan dan faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan publik tersebut.

Dari bagian pembangunan pada bidang Pendidikan, dinas Pendidikan Kabupaten Malang pihak yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan Program dana BOS di tiap sekolah -sekolah yang ada di kabupaten Malang. Termasuk di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 yang ada di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang bahwasannya dana BOS ini sifatnya tertutup terkadang tidak menghubungi komite ataupun wali murid siswa dampak dari hal tersebut wali murid kesulitan mengakses data Dana BOS. Hal ini dapat terjadi karena faktornya kewenangan yang diberikan sepenuhnya hanya dilakukan oleh pihak disekolah untuk menargetkan peserta didik yang akan menerima bantuan dana tersebut.

Tata cara penargetan peserta didik yang kurang mampu untuk mendapatkannya kurang sesuai dengan petunjuk teknis Bantuan Dana BOS ini dikarenakan kurang merata pada siswa yang benar-benar tidak mampu ini. Hal inilah yang menjadikan indikasi sebagai faktor utama akan wewenang yang selalu diberikan terhadap sekolah dalam memberikan dana bantuan ini.

Dari hasil wawancara yang ada Bersama kepala sekolah pada sekolah tempat peneliti mengambil informasi yaitu di sekolah Menengah Pertama Negeri 1 di Gondanglegi Kabupaten Malang telah di ketahui bahwasannya target saat melakukan kegiatan pendataan tidak cukup mempunyai standar untuk siswanya yang masuk

golongan tidak mampu, dampak yang lainnya juga hal ini dilakukannya agar tidak ada kecemburuan antar peserta didik yang memang asal mereka kurang mampu dalam melaksanakan persekolahan dikarenakan keterbatasan ekonomi mereka.

Masalah lain yang ada setelah dilakukan wawancara Bersama Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang adalah pemberian dana untuk menangani masalah sekolah yang bermacam-macam jenisnya hanya menggunakan dana BOS saja dan itu tidak cukup untuk menekan kekurangan dari peserta didik yang ada. Menurut petunjuk penggunaan teknik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus ada tambahan untuk bisa di berikan ke siswa kurang mampu mislanya uang seragam, transport, tas, sepatu atau pembebasan iuran sekolah , bisa juga uang transport yang dapat diberikan terhadap siswa yang jarak rumahnya jauh dari sekolah dan dalam keadaan tidak punya uang untuk sekolah.

Masalah yang lain juga dapat dilihat saat mewawancarai dengan Komite Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang,bahwasannya pihak-pihak sekolah belum memberi bantuan lain-lain untuk siswa yang tidak mampu dalam menyiapkan dana lebih untuk bersekolah. Dikarenakan pihak ini memiliki alasan bahwa peserta didik kebanyakan tinggal di dekat sekolah oleh sebab itu tidak perlu tambahan uang transport.

Meskipun daripada itu, pihak pengelolaan dana BOS menyatakan pihak sekolah mengalami sulit untuk memberikan penentuan kepada siswa yang tidak mampu, jika mereka memberikan bantuan ke siswa yang tidak mampu maka akan diprotes dari wali murid yang lain dan siswa lainnya. Melihat dari tidak ada alokasi dana untuk siswa yang kurang mampu dan mendapatkan perlakuan khusus juga adanya dana

untuk peserta didik agar mendapatkan perlakuan yang khusus. hal ini berindikasi bahwasannya banyak terdapat kontradiksi akan kefahaman pihak sekolah mengenai esensi pada program Bantuan dana ini yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita.

Masalah lain dijumpai juga karena adanya Pelaksanaan program BOS ini, karena dengan kebijakan pendidikan gratis di satu sisi disambut baik oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin dan kurang mampu yang bersemangat memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Tetapi, di sisi lain banyak sekolah yang mengaku program BOS telah membatasi gerak langkah sekolah dalam mengembangkan program pendidikan yang bermutu karena tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan sementara dana BOS dirasa kurang memadai karena pada dasarnya dana BOS hanya untuk menggratiskan biaya operasional saja.

Masalah lain muncul dengan adanya ketentuan pembagian kewenangan dalam pembiayaan pendidikan antara pusat dan daerah juga menjadi masalah yang kritis dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan ketentuan pembagian kewenangan tidak menyebutkan jumlah nominal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sehingga realisasi pembiayaan pendidikan tergantung sepenuhnya pada komitmen pemerintah daerah. Komitmen pemerintah daerah dalam hal ini juga ditentukan oleh kemampuan fiskal daerah yang berbeda-beda serta *good will* masing-masing. Kemampuan fiskal yang tinggi tanpa dibarengi dengan niat baik (*good will* dan *political will*) belum tentu akan melahirkan keputusan pengalokasian sejumlah anggaran untuk pendidikan di daerahnya. Hal tersebut menjadi semakin rumit dengan



masalah struktur organisasi pada era otonomi. Executing agency program dana BOS di tingkat pusat adalah Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Kedua institusi ini tidak memiliki kewenangan dalam menginstruksikan daerah untuk melakukan pendanaan bidang pendidikan. Aturan pelarangan pungutan di sekolah oleh pemerintah daerah tidak diikuti dengan pengalokasian dana pendamping BOS dari APBD yang memadai, bahkan banyak yang tidak mengalokasikan dana pendamping sama sekali.

Sebagai akibatnya, pelaksanaan program dana BOS banyak diwarnai dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sekolah. Data pengaduan masyarakat yang masuk pada unit pengelola pusat program BOS periode April - Juli 2019 sejumlah 85 kasus (pengaduan via telpon). Pengaduan tersebut berasal dari guru 22%, dan selebihnya berasal dari masyarakat/orang tua murid 78%. Jenis-jenis pengaduan antara lain terdiri dari 62,5% kasus pungutan; 23,75% kasus transparansi pengelolaan dana BOS oleh kepala sekolah; 13,75% kasus penyimpangan lain oleh sekolah.

Dari data pengaduan tersebut terlihat bahwa ada masalah dalam implementasi program dana BOS. Dalam konteks ini pemungutan biaya pendidikan kepada siswa adalah suatu pelanggaran. Kasus-kasus pungutan tersebut setidaknya mengindikasikan bahwa dana BOS yang diterima sekolah tidak mencukupi untuk biaya operasional sebagaimana yang diharapkan. Tidak cukupnya dana BOS untuk operasional sekolah sebenarnya telah disadari sejak awal oleh pemerintah terutama apabila BOS diorientasikan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Oleh sebab itu dalam panduan dana BOS disebutkan bahwa apabila dana BOS dari

Depdiknas belum mencukupi maka pemerintah daerah wajib memenuhi kekurangan dana operasional dari APBD.

Peran pemerintah daerah juga turut menentukan keberhasilan program pembiayaan pendidikan melalui dana BOS. Kewajiban pemerintah daerah adalah menyediakan dana pendamping BOS dari pusat dengan dana APBD sehingga kebutuhan sekolah dapat dipenuhi sesuai dengan standar nasional. Dalam praktiknya ketentuan ini belum sepenuhnya dijalankan sebagaimana mestinya. Banyak daerah yang belum mau atau belum mampu mengalokasikan anggaran untuk menutupi kekurangan dana BOS. Itu berarti sekolah dibiarkan beroperasi dengan dana di bawah standar. Praktik penyelenggaraan pendidikan semacam ini dalam jangka panjang akan mempengaruhi mutu layanan pendidikan.

Lingkup peran pemerintah daerah bukan hanya terbatas pada keikutsertaan dalam pembiayaan namun juga peran dan tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan program dari tahap awal sampai dengan implementasi termasuk pengawasan. Masalah yang tidak kalah pentingnya adalah sejauhmana hak-hak para pemangku kepentingan khususnya para siswa terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terlebih lagi bagi siswa miskin di sekolah swasta mengingat sekolah swasta tidak termasuk dalam sasaran implementor sekolah gratis namun sekolah swasta adalah penerima dana BOS yang wajib menggratiskan siswa miskin.

Dalam melaksanakan program BOS, kabupaten Malang juga masih menemui banyak hambatan, terutama dalam hal koordinasi data dan pelaporan dari sekolah ke kabupaten yang akan berdampak pada keterlambatan laporan dari kabupaten ke provinsi. Hal ini disebabkan luasnya wilayah yang harus dijangkau sementara tenaga

pengelola pada Tim BOS kabupaten sangat terbatas. Keterbatasan waktu juga menjadi kendala karena rata-rata pengelola baru mengerjakan tugas-tugas administrasi BOS setelah jam kerja dinas (di atas pukul 16.00). Permasalahan lain yang dihadapi dalam pengelolaan BOS di kabupaten Malang adalah tidak tersedianya dana safeguarding dari APBD untuk manajemen, sehingga dalam melakukan koordinasi dan monitoring kurang maksimal. Pelaksanaan BOS pada tingkat sekolah di kabupaten Malang juga diwarnai dengan adanya penyimpangan- penyimpangan ataupun ketidakpatuhan terhadap aturan pelaksanaan, misalnya manipulasi data siswa, kelebihan dana BOS yang tidak sesuai dengan jumlah murid tidak disetor ke kas Negara, serta kesalahan-kesalahan dalam pengadministrasian dana BOS.

Beberapa permasalahan di atas menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian.

Untuk keperluan data penelitian akan dilakukan studi kasus pada SMP 1 Gondanglegi Kabupaten Malang

Berdasarkan dari adanya pembuatan latar belakang dan penjabaran secara jelas mengapa peneliti membuat judul penelitian tentang dana BOS seperti pada informasi yang sudah tertera di bagian atas maka peneliti memberikan konsep agar penelitian yang diharapkan bisa teranalisis dan terdeskripsikan secara jelas tentang pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)BNEGRI 1 GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG.”**

**1.2. Rumusan Masalah**

Apa sajakah Rumusan Masalah yang dapat diteliti pada penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana proses Implementasi program bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses Implementasi program bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang?

**1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan didapatkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi program bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang
- b. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi program bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang?

**1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan terdeskripsi secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

Secara teoritis bermanfaat bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang, penelitian ini bisa untuk digunakan sebagai informasi tambahan yang berguna untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Gondanglegi Kabupaten Malang dan sebagai dasar pemikiran dalam memperbaiki dan mengembangkan proses pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sehingga Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang akan mendapatkan manfaat lebih kemungkinan dapat memberikan keoptimalan saat melaksanakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Secara praktik berguna untuk :

1. Kepala sekolah supaya dapat mengoptimalkan penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bendahara sekolah memberikan contoh mislanya gambaran lainnya saat menyusun program sesuai pada penerapan kebijakan publik yang terkait dengan penggunaan dana BOS.
3. Orang tua untuk diberikan tambahan-tambahan pengetahuan tentang dana BOS agar dapat mengawal penggunaan dana BOS
4. Sekolah Menengah pertama yang lain penelitian ini bisa dipergunakan untuk menambahkan tambahan informasi yang berguna bagi Sekolah Menengah pertama yang lainnya untuk dasar pemikiran saat melaksanakan program Bantuan operasional.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan proses Pengimplementasian dari program penggunaan pemberian dana bantuan untuk operasional pada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, yaitu:

**Tabel 2.1:** Perbedaan Penelitian yang Akan Dilakukan

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Metode dan Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian yang Akan Dilakukan
1.	Afriliana Fitri. 2014. “Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi”.	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Fokus akan penelitian yang sudah dibuat oleh Afriliani adalah memberikan penjelasan akan pengolahan dana untuk memberikan bantuan pengoperasional sekolah di sekolah	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana untuk mengoperasionalkan dari pemelrintah di daerah Bukit Tinggi di jenjang sekolah dasar pada daerah Mandiangin sudah terlaksana dengan cukup baik.	Perbedaan antara penelitian Afriliana Fitri dengan penelitian ini yaitu pada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian Afriliana Fitri mengkaji tentang pelaksanaan dana BOS di Bukit tinggi yang mengatur sekolah dasar disana untuk mengelola dana dari pemerintah ini. Sedangkan Tujuan peneliti melakukan penelitian di Sekolah yang berada di Gondanglegi di

		dasar yang berada di wilayah Mandiangin lebih tepatnya berada di Bukittinggi.		jenjang menengah pertama berusaha menjelaskan pengimplementasian dari program anggaran pemerintah itu dana BOS khususnya.
2.	Ega Rezky Hastyarini. 2015. "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) di SMA NEGERI 1 Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah".	Penelitian yang digunakan memakai pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan dana untuk pengoperasionalan pada bantuan yang ada disekolah-sekolah Menengah Atas (BOS SMA) di SMA NEGERI 1 Pejagoan.	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dana BOS SMA dilakukan dengan menyusun RKAS oleh tim anggaran sekolah, pelaksanaan dan penyaluran dana BOS SMA dua tahap, pengambilannya oleh Bendahara, penggunaannya diperuntukkan membiayai kegiatan operasional sekolah non-personalia sesuai juknis, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara internal oleh Komite Sekolah dan secara eksternal oleh	Perbedaan antara penelitian Ega Rezky Hastyarini dengan penelitian ini yaitu pada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dilakukan penganalisisan tentang penggunaan dana untuk mengoperasionalkan untuk membantu sekolah lebih maju di Menengah Atas (BOS SMA) di SMA NEGERI 1 Pejagoan. Sedangkan di penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan mengukur pengelolaan dana Ini pada jenjang sekolah yang berada di Lembaga Pendidikan menengah pertama

			Dinas Pendidikan Provinsi, terakhir pelaporan dilakukan setiap semester melalui LPJ BOS SMA.	Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang.
3.	Fitriana Elmizola. 2015. “Efektivitas Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah pada Kegiatan Pembelajaran”.	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan efektivitas penggunaan Bantuan Operasional Sekolah pada kegiatan pembelajaran.	Hasil penelitiannya membuktikan bahwa penggunaan dana BOS pada kegiatan pembelajaran di SMPN 1 Tanjungsemak masih belum efektif dalam menggunakan dana BOS karena antara perencanaan awal penggunaan dana BOS dengan yang terealisasi belum dapat tercapai dengan baik.	Perbedaan antara penelitian Fitriana Elmizola dengan penelitian ini yaitu pada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penggunaan Bantuan Operasional Sekolah pada kegiatan pembelajaran. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan agar terkaji pengimplementasian pada penggunaan dana BOS di SMP 1 di wilayah Gondanglegi ini,
4.	Sugito. 2016. “Pelaksanaan program BOS di SMP Negeri 2	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Fokus	Dilihat dari hasil yang sudah diteliti memberikan bukti bahwa sudah	Perbedaan antara penelitian Sugito dengan penelitian ini yaitu pada tujuan penelitian. Tujuan



	<p>Sukorejo Kendal”.</p> <p>penelitian ini adalah untuk Memberikan penjelasan tentang kebijakan penggunaan dana BOS yang ada di wilayah SMP 2 kendal Sukorejo</p>	<p>terlaksana secara baik juga sudah mencapai akhir dari kebijakan untuk melaksanakan dana ini sudah tepat dengan rencana yang dibuat di awal rencana</p>	<p>dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses terlaksananya kegiatan penggunaan dana BOS ini. Di sekolah pada jenjang menengah pertama di Kendal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah memiliki tujuan agar terkaji proses pengolahan dana untuk mengoperasionalkan sekolah ini yang ada di sekolah menengah Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang.</p>
<p>5.</p>	<p>Mustofa Umar, Muslimin dan Irawati 2017. “Ketepatan Sasaran Dana BOS Bagi Siswa SMP Negeri di Kota Makassar”.</p> <p>Penelitian ini memberikan hasil bahwasannya penggunaan dana</p>	<p>Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Fokus yang digunakan adalah agar memberikan penjelasan untuk menetapkan pada target peserta didik didaerah SMP tersebut .</p>	<p>Hasil dari Adanya penelitian memberikan sebuah hasil yaitu program dana BOS ini sudah memberikan kontribusi sekitar 30% bahkan bisa lebih untuk peserta didik yang kurang mampu.</p> <p>Perbedaan antara penelitian Irawati, Muslimin Kara, Mustofa Umar dengan penelitian ini yaitu pada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kesesuaian kepada target untuk menggunakan dana ini di daerah Makassar. Sedangkan penelitian</p>

	BOS di Sekolah di jenjang menengah pertama yang berada di Tamalate Kota Makassar memiliki program yang mempunyai progresif baik sekitar 30% ke masyarakat yang tidak mampu			yang dilakukan adalah untuk memberikan pengkajian akan pengimplementasian (BOS) di Sekolah pada jenjang Menengah Pertama Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang.
6.	Saka Perdana. 2016. "Implementasi kebijakan Dana BOS di SD Negeri Bekelan, Kulonprogo".	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi kebijakan Dana BOS di SD Negeri Bekelan, Kulonprogo.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri Bekelan sudah sangat baik dan berjalan lancar, dana dikelola dan digunakan sesuai dengan peraturan yang ada.	Perbedaan antara penelitian Saka Perdana dengan penelitian ini yaitu pada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Dana BOS di SD Negeri Bekelan, Kulonprogo. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti berusaha untuk membahas pengelolaan dana BOS yang ada di SMP 1 Malang Gondanglegi
7.	Djafar, Chairil,	Pendekatan	Hasil penelitian ini	Perbedaan antara

<p>Suparman. 2017. “Efektifitas pelaksanaan program dana BOS dalam meningkatkan prestasi belajar siswa SMP Negeri 1 Biromaru di Kabupaten Sigi”.</p>	<p>penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan efektifitas pelaksanaan program dana BOS dalam meningkatkan prestasi belajar siswa SMP Negeri 1 Biromaru di Kabupaten Sigi.</p>	<p>menunjukkan bahwa pemanfaatan dana BOS di SMP Negeri 1 Biromaru sudah berjalan efektif, karena indikator-indikator yang mengarah pada tercapainya tujuan pendidikan yang ditetapkan SMP Negeri 1 Biromaru banyak yang telah tercapai.</p>	<p>penelitian Djafar, Chairil, Suparman dengan penelitian ini yaitu pada tujuan peneliti. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui efektifitas pelaksanaan program dana BOS dalam meningkatkan prestasi belajar siswa SMP Negeri 1 Biromaru di Kabupaten Sigi. Sedangkan penelitian yang digunakna oleh peneliti berfokus untuk menelaah pengelolaan bagaimana dana Tersebut digunakan di sekolah dengan jenjang menengah Pertama Negeri 1 Gondanglegi</p>
<p>8. Ratu Semuel (2013) dengan judul “Pengelolaan Dana BOS pada SMP se-kecamatan Sa’dan kabupaten Toraja Utara”.</p>	<p>Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengelolaan dana BOS pada SMP</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan keberadaan BOS terhadap proses pembelajaran, dapat berdampak positif yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,</p>	<p>Perbedaan antara penelitian Ratu Semuel dengan penelitian ini yaitu pada tujuan peneliti. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengelolaan dana BOS pada SMP se-kecamatan Sa’dan kabupaten Toraja</p>

		se-kecamatan Sa'dan kabupaten Toraja Utara.	bekerja sama dan peningkatan prestasi kerja.	Utara. Sedangkan penelitian yang ada dilakukan untuk memberikan kajian akan proses pengimplementasian dana ini di sekolah jenjang pendidikan yaitu Menengah Pertama yang berada di wilayah Gondanglegi Kabupaten Malang.
9.	Yogi Trisaputra. 2013. "Analisis penggunaan dana BOS untuk peningkatan Kualitas Sekolah di SD Negeri Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir 9 Kabupaten Nagan Raya".	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Fokus dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penggunaan dana BOS untuk peningkatan kualitas sekolah di SD Negeri Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir 9 Kabupaten Nagan Raya.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pemanfaatan dana BOS menimbulkan pengaruh yang sangat penting terhadap hasil belajar siswa dan peningkatan kualitas sekolah hal ini tercermin dari peningkatan nilai prestasi akademik.	Perbedaan antara penelitian Ratu Semuel dengan penelitian ini yaitu pada tujuan peneliti. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui penggunaan dana BOS untuk peningkatan kualitas sekolah di SD Negeri Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir 9 Kabupaten Nagan Raya. Sedangkan pada penelitian diungkapkan untuk memberikan kajian akan proses implementasi penggunaan dana di

				sekolah dengan jenjang menengah pertama di wilayah Gondanglegi Malang.
10.	Barsani B. S. 2018. “Analisis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Kualitas Kelengkapan Fasilitas Sekolah di SMP Negeri 3 Makassar”.	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Fokus dan sasaran yang ingin dicapai adalah melakukan penganalisisan terhadap penggunaan dana BOS memberikan kontribusi lebih akan kualitas sekolah dan melengkapi fasilitas sekolah dengan menggunakan dana BOS tersebut	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pemanfaatan dana BOS menimbulkan pengaruh yang sangat penting terhadap hasil belajar siswa dan peningkatan kualitas sekolah hal ini tercermin dari peningkatan nilai prestasi akademik.	Perbedaan antara penelitian Barsani B. S. dengan penelitian ini yaitu pada tujuan peneliti. Tujuan dari adanya penggunaan penelitian untuk memberikan penganalisisan penggunaan dana BOS untuk memberikan peningkatan akan kualitas di sekolah dengan jenjang menengah pertama 3 Makassar. Sedangkan untuk peneliti yang sudah melakukan penelitian perbedaannya adalah hasil peneliti melakukan pengkajian akan penggunaan kebijakan dalam memproseskan dana BOS di Gondanglegi Kabupaten Malang.

Sumber: Data primer diolah

## 2.2. Kerangka Dasar Teoritik

### 2.2.1. Kebijakan Publik

#### 2.2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Berasal dari etimologi, makna dari *Policy* atau kebijakan didalam Bahasa Indonesia di serap dari kata yang berasal dari Yunani yang berarti “*Polis*” atau kota , negara.

Kemudian kata tersebut berkembang lagi kedalam Bahasa Latin yaitu menjadi kata “*politia*” artinya negara. Didalam Bahasa Inggris juga ada kata ini menjadi kata “*policie*” yang memiliki arti pengendalian dengan masalah publik atau bisa juga disebut administrasi pemerintahan. *Policy* atau yang biasa disebut kebijakan digunakan untuk memperlihatkan adanya perilaku aktor (contohnya adanya pejabat atau suatu badan organisasi pemerintah, maupun kelompok dalam masyarakat). Atau menunjukkan pada beberapa aktor -aktor yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang ada. Dari pengertian yang sudah dijelaskan dan dikemukakan diatas maksud dari kebijakan publik adalah dapat digunakan dan menjadi suatu pembicaraan yang terkesan biasa dan bersifat kurang memadai baik dari segi sistematis dan secara ilmiah jika terkait dengan suatu analisis dari kebijakan publik itu.

Berikut pengertian Kebijakan Publik Menurut pendapat Nugroho (2008: 35) adalah:

“Keputusan yang memang dibuat oleh suatu instansi publik atau negara untuk mencapai visi misi dari suatu bangsa. Keputusan itu berkaitan dengan kebijakan -kebijakan pemerintahan yang ada mulai dari tingkat otonom. Kebanyakan kebijakan ini dibuat oleh aktor dari tingkat eksekutif atau legislatif hingga mengarah ke daerah otonom.”

Dengan demikian maksud dari kebijakan itu menekan pada aturan-aturan agar tercapailah tujuan yang diinginkan. Maka, dari itu kebijakan -kebijakan yang ada diharapkan dapat menjadi sebuah arahan -arahan dan rambu -rambu sebagaimana untuk

mencapai sebuah tujuan yang telah di capai dan dicanangkan kedepannya.

Berikut pendapat dari Nugroho (2009:83) yang menjelaskan konsep kebijakan publik adalah: Beberapa rangkaian Tindakan -tindakan yang dilakukan dengan usulan kelompok, pemerintah atau seseorang dalam sebuah organisasi tertentu. Dengan adanya peluang dan ancaman yang selalu ada ketika kita mengambil keputusan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk membuka potensi yang ada dan mengatasi banyaknya hambatan-hambatan yang ada Ketika akan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ada yang telah dicanangkan sebelumnya. Dapat juga diketahui bahwa kebijakan publik itu benar sekali tidak hanya terkait dengan peran serta tindakan yang dapat di gunakan pemerintah namun juga sering kebanyakan kebijakan publik juga menjadi focus atas keterlibatan-keterlibatan dari pemerintah dari beragam macam tindakan yang ada di lingkungan sosial.

Apabila ada kegiatan maka pemerintah akan memberikan tindakan yang sering memunculkan respon saat membuat kebijakan terhadap masyarakat hal ini dapat menjadi umpan balik akan tindakan yang sudah dilakukan. Serta hal-hal yang menyebabkan pemerintah melakukan kegiatan itu. Hasil dari kegiatan yang telah dilakukan akan memperoleh dampak pada kondisi sebelum kebijakan disahkan.

Menurut pendapat Irianto (2011: 34), kebijakan adalah:

“Keterkaitan Tindakan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Hal-hal yang ada disini yang terkait dengan kebijakan yang mengatur organisasi dengan fokus pada masukan-masukan yang ada. Untuk mencapai produk yang diinginkan hal ini adalah maksud dari kebijakan publik yang sesungguhnya.

Berikut pendapat dari Syafaruddin (2008: 77), mengenai kebijakan publik yaitu:

“Berkaitan dengan kondisi-kondisi di sosial masyarakat secara umum

berkaitan dengan warga dan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang seringkali menimbulkan berbagai macam dampak yang ada bisa disebut juga dampak tersebut terjadi secara luas. Kebijakan publik merupakan pengambilan keputusan -keputusan dari kepala atau manajemen atas untuk mengarahkan prinsip, tujuan ataupun aturan yang bersifat strategis Sehingga para manajer tingkat bawahannya mengikuti aturan aturan yang ada dan melakukannya demi kebaikan negara atau organisasi. Untuk penentuan akan masa depan negara yang baik di masa yang akan datang. Dan hal-hal tersebut setidaknya berkaitan dengan masyarakat.

Menurut Dwijowijoto (2014:7) pengertian kebijakan publik pada umumnya disebut juga dengan Public policy, aturan-aturan yang digunakan sebagai pengatur kehidupan banyak orang dalam skala lokal sampai internasional. Isi dari kebijakan publik itu sendiri berisikan aturan-aturan yang selalu mengikat dan penting dijadikan pedoman untuk mengikat semua orang yang berada didalam pemerintahan tersebut. Apabila terjadi pelanggaran dari adanya kebijakan itu sendiri maka diberikan sanksi yang sesuai dan sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan oleh. Tata cara pemberian sanksi ini dilakukan dengan menjatuhkan sanksi -sanksi di hadapan banyak orang yang memberi sanksi juga dipilih dan tidak asal karena pemberi sanksi tentunya sudah dipilih oleh Lembaga pemerintahan itu terlebih dahulu.

Kebijakan publik menurut Irianto (2009:12) yaitu:

Kebijakan publik adalah hal -hal seluruhnya yang ada di kegiatan untuk merencanakan apa sajakah yang akan dilakukan dan tidaknya dilakukan suatu kegiatan. Pemilihan suatu kebijakan itu harus didasari dengan tujuan-tujuan yang jelas dan semua pemerintahan di seluruh bagian tiap negara harus menerapkannya dan mau mengikuti karena hal ini disebut dengan Tindakan pemerintah yang ada. Pelaksanaan kebijakan publik tidak hanya menjadi bahan untuk digunakan sebagai keinginan pejabat atau pemerintah namun melainkan menjadi kebutuhan masyarakat banyak. Pilihan yang tidak diterapkan pada masyarakat oleh suatu negara juga menjadi kebijakan publik yang telah diatur karena melalui proses pemilihan tadi.

Berikut pengertian kebijakan publik dari Wahab Abdul Solichin (2012:11)

Kebijakan publik adalah tujuan-tujuan, Tindakan -tindakan, dan sebagai pernyataan pemerintah akan masalah masalah yang ada, ataupun menjadi Langkah -langkah yang akan diambil bisa Langkah tersebut bersifat gagal atau sukses. Langkah-langkah tersebut diharapkan bisa diimplementasikan hal ini terkait dengan penjelasan yang akan di berikan oleh pemerintah mengenai suatu kegiatan yang akan terjadi atau tidak terjadi.



Berikut Pengertian kebijakan publik menurut Wibawa Samodra (1994:79)

Kebijakan publik adalah produk-produk dari aktivis yang bersifat untuk memecahkan masalah -masalah yang ada pada suatu masyarakat di suatu negara tertentu. Pemecah masalah ini berkaitan dengan aktor yang terlibat didalamnya. Dan aktor tersebut memiliki hubungan struktur didalam sebuah organisasi baik formal maupun non formal. Diperlukannya waktu agar dapat melakukan penyelesaian akan masalah -masalah yang ada dan itu bersifat sepanjang waktu.

Sekarang dapat disimpulkan pengertian dari kebijakan -kebijakan publik diatas maksudnya adalah Segala sesuatu Tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan sebagai keputusan yang berkaitan dan berhubungan yaitu yang mencakup keputusan kebijakan dengan sifat tertulis dan verbal. Keputusan tersebut harus dilakukan oleh semua masyarakat di suatu negara karena sifatnya yang memaksa dan kebijakan publik ada untuk mengatasi masalah agar masalah tersebut terpecahkan dan mencapai sebuah tujuan yang diinginkan oleh sebuah organisasi dapat tercapai.

#### **2.2.1.2. Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan Publik yang terkait dengan kebijakan Pendidikan dari

Rohman (2001: 52) yaitu,

“Kebijakan yang hadir untuk menjadi pengatur dalam kehidupan masyarakat secara luas ,baik kelompok organisasi maupun hubungan dalam bermasyarakat. Termasuk kebijakan yang didalamnya digunakan untuk menjadi cara mengatur tata cara kerja pejabat atau aktor pemerintah didalam berbagai bidang tidak terkecuali pada bidang Pendidikan semua akan diatur dengan aktor pilihan yang dapat melakukannya.”

Pengertian kebijakan Pendidikan menurut para ahli selanjutnya adalah dari

Rohman Arif (2009:107) adalah:

“Kebijakan Pendidikan biasanya di sebut juga dengan perencanaan -perencanaan Pendidikan. Didalamnya bisa berisi tentang rencana yang besar

dan utama dari Pendidikan itu sendiri. Ada juga isi lainnya yang berupa pengaturan tentang Pendidikan atau lebih umumnya adalah orang-orang mengetahui sebagai kebijakan dari Pendidikan. Tetapi juga perlu di ketahui bahwasannya istilah -istilah yang ada tersebut memang memiliki sisi yang berbeda dari macam-macam asal istilah itu sendiri.

Pengertian dari kebijakan Pendidikan selanjutnya adalah berasal dari Riant

Nugroho (2008:37) adalah:

Kebijakan Pendidikan itu sendiri adalah bagian dari kebijakan -kebijakan publik secara utuh. Hanya saja kebijakan Pendidikan mengurus hal dibidang Pendidikan.

Pernyataan mengenai pengertian kebijakan Pendidikan menurut Rusdiana (2015:38) adalah:

Kebijakan Pendidikan memang tentunya sewajarnya merupakan bagian kebijakan publik atau kebijakan negara jika dilihat secara umum. Kebijakan Pendidikan ini terkait dengan pengelolaan secara khusus macam-macam hal tentang Pendidikan misalnya : distribusi sumber -sumber dan adanya alokasi, terserapnya sumber dan apa saja hal -hal yang menjadikan perilaku dalam mengatur didalam bidang Pendidikan.

Menurut Pendapat Nanang Fattah (2012:90) Kebijakan Pendidikan adalah :

Kebijakan Pendidikan adalah berisikan keputusan -keputusan daripada pedoman agar dapat bertindak secara baik dengan sifatnya mulai dari umum ke khusus ataupun sederhana sampai ke kompleks dan dari yang longgar hingga ke yang terperinci. Perumusan kebijakan Pendidikan tentunya menggunakan proses proses daripada perpolitikan didalamnya berisikan hal-hal yang harus dilakukan misalnya dalam menentukan program, Tindakan dan rencana untuk penyelenggaraan Pendidikan. Sudah sewajarnya apabila Kebijakan Pendidikan berkaitan dengan sikap sikap serta Tindakan Ketika orang-orang mengambil berbagai macam kesepakatan dengan kelompok untuk membuat kebijakan agar upaya itu dalam mengatasi berbagaimacam persoalan dan masalah dapat diatasi didunia Pendidikan tersebut.

Pengertian kebijakan Pendidikan berikutnya menurut Muhaimin (2010:52)

Kebijakan Pendidikan digunakan sebagai cara untuk memproses dan merumuskan kebijakan -kebijakan yang ada secara lebih strategis lagi dibidang pendidikan untuk menjabarkan visi dan misi suatu Pendidikan. Agar tercapailah tujuan yang hendak dituju di bidang pendidikan dan biasanya visi -misi tersebut terkait dengan kurun waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya

di suatu tempat di lingkungan tertentu.

Berdasarkan pada pengertian mengenai kebijakan Pendidikan yang sudah ada diatas dapat disimpulkan bahwasannya pengertian kebijakan Pendidikan adalah segala sesuatu cara untuk mengatur keseluruhan beragam jenis aktivitas di bidang Pendidikan yang terikat dengan kurun waktu tertentu dengan beragam macam aktivitas yang telah ditetapkan sebelumnya agar tujuan, visi, misi dari kegiatan dibidang Pendidikan dapat dicapai oleh adanya pengaturan kebijakan Pendidikan.

### **2.2.1.3. Implementasi Kebijakan Publik**

Pengertian dari implementasi adalah proses menggunakan suatu kebijakan-kebijakan yang tadinya sudah dibuat agar tercapailah tujuan -tujuan. Secara umum untuk pengimplementasian kebijakan -kebijakan yang ada akan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui bentuk lebih sederhana yang biasa disebut secara langsung yaitu dengan menggunakan proses pengendalian dari program-program. Dan yang kedua dengan formulasi mengenai kebijakan -kebijakan yang bersifat derivatif atau bisa disebut juga dengan implementasi turunan dari kebijakan -kebijakan yang ada. Dalam hal ini kegiatan dari runtutan cara melaksanakan kebijakan memang dapat diamati secara jelas melalui proyek, program ataupun yang bersifat kegiatan -kegiatan tertentu yang sudah disusun dari dalam sebuah proyek atau program.

Berikut ini adalah tahapan -tahapan turunnya kebijakan dari pemerintah pusat kepada bawahan yaitu, pertamanya turun berbentuk sebagai sebuah program. Lalu program diturunkan lagi dengan detail menjadi proyek. Di tahap akhir proyek yang sudah di rinci dijadikan sebuah kegiatan -kegiatan yang mengatur masyarakat dan

berisi kebijakan sesuai dengan nilai dan norma. Bahkan kegiatan ini kadangkala mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat sehingga pemerintah dapat berkolaborasi dengan masyarakat hal ini memiliki dampak positif pada kegiatan-kegiatan sehingga dapat sukses mengimplementasikan kebijakan publik itu.

Berikut pengertian implementasi dari Oktasari (2015:1340) mengenai kegiatan implementasi yaitu

“Implementasi merupakan asal bahasa yang berasal dari Inggris *to implement* maksud dari implementasi adalah kegiatan menyediakan sarana agar sesuatu itu terlaksanakan dengan baik dan akan menimbulkan akibat atau dampak pada beberapa kegiatan tersebut yang telah di tentukan. Peraturan pemerintah undang-undang , keputusan peradilan adalah salah satu bentuk dari implementasi yang dibuat dengan menggunakan bentuk implementasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak atau akibat di kehidupan masyarakat secara luas tentunya yang membuat kebijakan mengenai undang-undang dan sebagainya adalah Lembaga pemerintah yang sah yang diakui oleh negara.”

Pengertian implmentasi kebijakan menurut Leo Agustino (2016:11) adalah Implementasi kebijakan yang terkait dengan ketersangkut pautannya antara impementasi kebijakan dengan ikhtiar agar tercapailah tujuan-tujuan dari ketetapan suatu kebijakan yang sudah ada.

Pengertian implementasi kebijakan publik menurut Nugroho (2014:657) adalah Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah suatu cara untuk mencapai sebuah tujuan dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat agar semua kebijakan tersebut bisa tercapai secara sempurna tanpa terkecuali strategi yang ada didalamnya..

Pendapat Mulyadi (2015:26) mengenai implementasi kebijakan publik adalah sebuah perubahan atau sebuah transformasi -transformasi yang pada dasarnya bersifat seperti multiorganisasi, yang dimana perubahan -perubahan yang ada diterapkan secara berkesinambungan dengan strategi-strategi implementasi akan kebijakan yang mengaitkan dengan kebutuhan lapisan masyarakat diseluruh tingkat lapisannya.

Pendapat mengenai implementasi kebijakan publik berikutnya disampaikan oleh Hamdi (2014:98) terkait dengan implementasi kebijakan publik adalah secara umum seperti yang kita ketahui implementasi kebijakan publik dibagi menjadi dua yaitu kelompok yang berasal dari pendekatan atas kebawah atau kelompok lainnya yang juga disebut dengan kelompok *bottom*

up yaitu kelompok yang dimulai dengan pendekatan bawah ke atas.

Dari banyaknya pengertian mengenai implementasi kebijakan publik diatas, maka sudah pasti dapat disimpulkan bahwa pengertian implementasi kebijakan publik menurut peneliti adalah Dari banyaknya pengertian mengenai implementasi kebijakan publik diatas, maka sudah pasti dapat disimpulkan bahwa pengertian implementasi kebijakan publik menurut peneliti adalah Implementasi kebijakan publik tidak dapat dilakukan terlebih dahulu jika belum menetapkan sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya serta sudah mendapatkan identifikasi dari beraneka macam keputusan kebijakan yang ada. Pengertian dari kebijakan publik yaitu proses untuk mengimplementasikan kebijakan publik sampai digunakan oleh aktor secara penuh terlibat saat mengimplementasikan kebijakan publik. Hingga akhirnya akan memperoleh hasil sesuai dengan sasaran dan tujuan dari kebijakan yang telah disusun.

### **2.2.2 Model Implementasi Kebijakan Publik**

Pada implementasi Kebijakan publik dapat menggunakan berbagai macam model yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan perancangan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang ada. Implementasi kebijakan mampu memberikan pengaruh pada unsur yang terikat menjadi satu didalam implementasi kebijakan publik jadi semua unsur dapat diatur dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Mampu mengatur masyarakat dan aparatur negara secara bersamaan.

Adanya model ini juga terbagi menjadi beberapa model implementasi kebijakan publik dengan fokus top down. Didalam pendekatan ini top down dikatakan menjadi sebuah pendekatan yang mengawali berkembangnya pembelajaran -pembelajaran

ilmu kebijakan implementasi. Meskipun dalam perkembangannya di keesokan harinya pengikut Top Down mendapati berbagai macam perbedaan dalam berpendapat dan cara menyikapi perbedaannya itu. Sehingga mencetuskan pendekatan lainnya yaitu adalah pendekatan Bottom Up. Akan tetapi jika dilihat lagi dasar dari pendekatan -pendekatan ini tetap bertumpu pada pendapat -pendapat yang sejalan dan berhubungan dengan fenomena sosial yang ada. Untuk memberikan perkembangan kerangka konseptual pada studi dan ilmu dari implementasi yang sedang dilakukan.

Melihat pada pendekatan Top down, implementasi-implementasi akan kebijakan publik yang dibuat terpusatkan dan mulai pada tingkatan aktor yang berkepentingan di pusat. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil biasanya berada ditingkatan pusat. Untuk pendekatan top down ini bertumpukan mengenai perspektif bahwasannya keputusan ataupun bentuk dari kebijakan politik sudah ditetapkan oleh mereka yang membuat kebijakan dan memang harus dilakukan dan diterapkan dengan para administrator -adminsitrator atau pada bawahannya dibawah dari administrator misalnya pemerintah dalam bidang birokrat pemerintah. Sehingga maksud dari pendekatan top down ini adalah kesesuaian perilaku dari aparat pemerintah dan birokrat pemerintahan mengikuti dan menjalankan Tindakan mereka dengan kesesuaian akan prosedur yang sudah menjadi tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam kegiatan perencanaan Pembuatan prosedur biasanya dilakukan oleh aktor yang membuat kebijakan di organisasi pusat. Fokus dari masalah-masalah yang ada biasanya berkaitan dengan cara mengimplementasikan kebijakan yang ada.untuk menangani masalah -masalah agar mencapai tujuan keformalan dari tujuan yang sudah ditetapkan. Kekurangan teori ini adalah akan ada masalah -masalah yang

terkait dengan level -level dibawahnya dikarenakan mereka tidak menetapkan tujuan secara Bersama-sama dan tidak diikuti sertakan dalam Melakukan penyusunan akan formulasi -formulasi kepentingan kebijakan publik yang ada.

Ada beberapa tokoh ilmu penganut aliran top down yaitu Marilee S. Grindle. Pendekatan top down inilah yang pertama kali muncul. Pendekatan ini memiliki konsep pendekatan sesuai dengan yang tertulis dalam karya Emile de la Fayette dan Rousseau mengenai: “semua akan terasa lebih baik jika semuanya itu di pasrahkan kepada tuhan sang pemberi”. Dan akan buruk jika di berikan segala sesuatunya kepada tangan manusia karena jika dipegang kendali oleh manusia akan banyak kerusakan yang terjadi. Model ini memiliki isi tentang rasionalisme untuk menggambarkan isi gagasan akan implementasi sehingga orang dapat mengerjakan semua kegiatan yang sudah menjadi tugasnya juga memberikan pengendalian terhadap tahapan-tahapan yang ada didalam sistem. Maksudnya yaitu penggunaan abstrak agar meningkatkan kinerja terhadap tugas implementasi yang berdasarkan kesengajaan agar lebih baik lagi saat bekerja. Implementasi pada kebijakan di tingkat pusat dapat bertindak sebagai penghubung antar variabel kebijakan yang ada.

Model pada pendekatan kebijakan focus pada Bottom Up adalah implementasi yang terlahir dikarenakan banyak kesalahan yang terjadi pada pendekatan Top Up. Sehingga menjadikan pendekatan ini menjadi pendekatan dengan rasional pada fokus campuran yaitu top-down. Menurut Parsons (2006) memiliki pendapat bahwa yang memang terjadi dan penting untuk melakukan implementasi adalah menggunakan hubungan diantara aktor yang membuat kebijakan Bersama pelaksana atau target pelaksana kebijakan yang ada. Pendekatan bottom up ini memberikan pandangan

akan sebuah proses yang didalamnya dapat di gunakan untuk melaksanakan negoisasi dan membentuk sensus. Pendekatan Bottom up ini berfokus pada kemunculan fakta-fakta bahwasannya pelaksanaan implementasi di kehidupan nyata dapat memberikan berbagai macam keleluasaan untuk menerapkan kebijakan yang ada. Ahli kebijakan yang berfokuskan pada pendekatan dengan fokus pada bottom up yaitu Adam Smith. Menurutnya implementasi dapat di lakukan menjadi sebuah alur dan proses. Model ini dapat memberikan pandangan dari proses implementasi kebijakan yang memiliki kebutuhan atau kebijakan untuk mendapatkan perubahan politik serta sosial di lingkungan masyarakat. Dimana kebijakan yang di laksanakan oleh pemerintah dapat ditujukan untuk memberikan pengadaan, perubahan dan perbaikan untuk mempengaruhi kelompok warga secara besar seperti golongan tertentu sasaran yang ditujukan untuk diatur dengan model pendekatan ini.

Ada beberapa dari pandangan kelompok ketiga, terdapat empat paradigma dari pengimplementasian kebijakan antara lain:

- A. Konflik ambiguitas yang rendah dengan tekanan rendah (maksudnya adalah pengimplementasian administrasi)
- B. Konflik ambiguitas yang rendah dengan tekanan tinggi (maksudnya adalah pengimplementasian politik)
- C. Konflik ambiguitas yang tinggi dengan tekanan tinggi (Maksudnya adalah pengimplementasian simbol)
- D. Konflik ambiguitas yang tinggi dengan tekanan rendah (Maksudnya adalah pengimplementasian terhadap keeksperimentalan)



Menurut pandangan dari Smith, pengimplementasian kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh beberapa variable ada empat variable antara lain:

1. *Policy idealized*: pola dari memberikan interaksi yang di katakan oleh aktor yang membuat atau merumuskan kebijakan tentang suatu hal lalu kebijakan tersebut digunakan untuk mempengaruhi, mendorong dan merangsang keputusan dari *group* target untuk melakukannya.
2. *Group Target*: Memiliki hubungan dengan *stake holders* serta di impikan untuk dapat memberikan pengapdosian dari pola interkasi yang ada terkait dengan interaksi yang di inginkan oleh pembuat kebijakan. Kelompok ini dapat dijadikan sasaran untuk melakukan pengimplementasi kebijakan publik. Maka juga *target groups* dapat disesuaikan cara berperilaku agar sama dengan kebijakan yang sudah disusun sebelum ini.
3. *Organization implementation* adalah badan dari yang melaksanakan dan mampu mempertanggung jawabkan saat melakukan pengimplementasian kebijakan yang ada
4. *Factor Environmental*: Adalah unsur yang ada pada lingkungan dan dapat mempengaruhi pengimplementasian kebijakan contohnya pada beberapa aspek yang terkait dengan lingkungan masyarakat yaitu sosial, ekonomi, budaya dan politik.

Keberhasilan yang akan didapatkan melalui implementasi kebijakan juga dapat dihitung melalui proses dari capaian hasil akhirnya. Misalnya tercapainya tujuan atau tidak tercapai tujuan itu sehingga perlu usaha lebih untuk mencapai tujuan yang dituju. Pendapat ini di katakan oleh Grindle (1991:241) terkait dengan cara

pengukuran untuk mencapai target berhasilnya sebuah pengimplementasian kebijakan

bisa di lihat dengan dua aspek yaitu:

A. Melihat dari segi proses dengan cara membuat pertanyaan apakah pelaksanaan

kebijakan publik sudah sejalan dengan yang sudah dibuat dan dirancang hal ini merujuk pada tata cara kebijakan yang ada.

B. Dilihat dari tujuan kebijakan yang ada apakah sudah dicapai. Pendapat ini melihat

dimensi dari dua aspek antara lain efek dan dampaknya yang dapat timbul di kalangan kelompok atau individu, juga tingkat perubahan pola pikir dan interaksi yang terjadi pada penerima sasaran kelompok dan apa saja yang didapat atau apa sajakah perubahan yang sudah terjadi didalamnya.

Berikut ungkapan Hamdi (2014:99) dari model van Meter dan van Horn terdapat enam komponen implementasi kebijakan publik yaitu:

- a) Beberapa wilayah di lakukan secara sama -sama untuk stimulasi aktor dari pejabat pemerintahan untuk mau menerima sebuah produk dari yang sudah mereka kerjakan sebelumnya
- b) Sumber daya serta tuntutan menjadi stimulant yang akan dibawa kepada sebuah lingkungan terhadap beberapa aktor yang membuat kebijakan itu sendiri
- c) Melakukan proses konversi, baik merubah didalamnya prosedur yang secara formal maupun struktur dari pemerintahan dan menstransformasikan sumber daya serta tuntutan tadi untuk dijadikan sebuah kebijakan yang dapat digunakan bersama -sama secara public
- d) Kebijakan yang ada untuk di wakili dengan melihat intensi, tujuan dan pernyataan secara formal yang ada dibuat oleh beberapa pejabat dari pemerintahan
- e) Performa kebijakan yang senyatanya di berikan terhadap klien
- f) Umpan balik akan performa dan kebijakan yang ada pada lingkungan , kemudian ditransmisikan lagi terhadap proses akan konversi-konversi dari sumberdaya serta tuntutan yang ada di masa selanjutnya.

Model van Meter dan van Horn mengungkapkan terdapat enam aspek untuk membentuk performa dengan kebijakan yaitu :

- a) Tujuan dan standar
- b) Sumber daya
- c) Kegiatan dan komunikasi antar anggota organisasi
- d) Karakter pelaksana
- e) Kondisi politik, ekonomi dan social
- f) Disposisi pengguna

Hamdi (2014:103) Berpendapat mengupayakan upaya ilmuan, dari saran dan kritik yang dialamatkan kepada pendekatan bottom up dan top down sehingga lahirlah model lain yaitu model alternatif:

#### A. Model dari sebatier

Sebatier memberikan pandangan akan kebijakan harus diberlakukan penganalisisan dari siklus yang ada maksimal dalam 10 tahun terakhir. Kebijakan ada dan dijalankan kesemua bidang-bidang yang mudah-mudahan melakukan pengidentifikasian dengan mempergunakan model top-down. Bidang-bidang disini terkait dengan kondisi sosial, hukum, ekonomi dan birokrasi pemerintah.

#### B. Model Goggin

Menjelaskan bahwa model ini salah satu dari model yang menganggap komunikasi itu penting. Komunikasi ini mengimplementasikan kebijakan dari berbagai macam pemerintah untuk melihat peran dari pelaksanaan pemerintah negara akan berhubungan dengan beberapa macam saluran dari komunikasi yang ada.

#### C. Model Matland

Literatur dari implementator memberikan petunjuk bahwasannya Top down dan bottom up mereka mempunyai pilihan studi banding dengan tipe-tipe yang berbeda dari kebijakan itu. Top down lebih kepada kebijakan yang sangat jelas, apabila bottom up memfokuskan diri pada kebijakan yang memiliki tidak pasti lebih besar dan inheren untuk merumuskan kebijakan dibanding model top down. Matland mulai membuat perkembangan dari model yang ada yaitu model kontingensim atau bisa disebut juga sebagai model ambiguitas atau model konflik.

Berikut pendapat Tahir (2014:61) adalah

“Keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan itu didasarkan pada beberapa faktor, masing-masing faktor memanglah memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Pemahaman akan berbagai macam faktor yang berkaitan dengan implementasi di elaborasikan terhadap macam-macam teori implementasi kebijakan yang nantinya akan dijadikan pedoman dan landasan dalam bertindak dan merumuskan tujuan.

Ada macam-macam model dengan karakteristik yang berbeda tentang implementasi kebijakan publik menurut banyak ahli antara lain:

#### D. Model teori George C. Edward

Edward III memiliki pendapat dalam tulisan Subarsono (2011:90) berpendapat bahwasannya implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 4 aspek yaitu:

##### 1. Komunikasi

Arti dari komunikasi yaitu suatu keberhasilan atas pelaksanaan implementasi didalam kebijakan yang ada terdapat syarat untuk aktor pengimplementasian agar mengerti dan tahu masing-masing pekerjaannya, serta beberapa sasaran dan tujuan harus cepat ditransmisikan melihat kelompok sebagai sasaran yang akan dituju. Komunikasi juga mengurangi distorsi serta kesalah pahaman saat melakukan implementasi dengan pihak lain.

Terdapat syarat -syarat berikut syarat yang pertama untuk implementor atau pelaksana agar kebijakan yang dikerjakan lebih efektif pelaku kebijakan mereka harus sudah faham dan tahu akan apa saja hal yang harus sudah dilakukan. Mengenai personil pelaksana implementator harus dilakukan penentuan dahulu untuk mengisi masing-masing jabatan pekerjaan supaya keputusan yang terkait dengan kebijakan bisa di teruskan terhadap orang yang sangat mahir dalam bidangnya. Kegiatan ini penting untuk menyampaikan keputusan dan kebijakan yaitu dengan melakukan

komunikasi. Pastilah komunikasi yang dibutuhkan adalah komunikasi yang mudah dimengerti akurat dan sangat cermat serta berbobot untuk para pelaksana. terdapat tiga aspek komunikasi yang memiliki dampak pada implementasi kebijakan yaitu:

a. Transmisi: Yaitu jika kebijakan sudah dilakukan dan petunjuk pelaksanaannya juga sudah ada

b. Kejelasan: Kejelasan dalam melakukan komunikasi. Apabila tidak jelas maka pesan dari komunikasi ini yang disampaikan oleh implementator dapat memicu terjadi interpretasi kesalah pahaman atau bahkan dapat juga memiliki tentangan dari pesan awal yang ada antar pelaksana.

c. Konsistensi: Berhubungan dengan perintah dari komunikasi sejelas mungkin maka faktor lainnya yang harus ada yaitu perintah itu sendiri. Perintah yang baik tentunya tidak selalu mendapatkan penolakan dari pihak-pihak yang terlibat. Dampak dari tentangan -tentangan perintah ini dapat menimbulkan sulitnya melaksanakan kebijakan serta mengerjakan tugas yang ada dengan sebaik mungkin. Perintah dari atasan dapat dikatakan tidak konsisten apabila pelaksana ketika sedang mencari tindakan yang selonggar mungkin saat menafsirkan dan mengerjakan implementasi kebijakan sulit untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

## 2.Sumber daya

Walaupun isi dari kebijakan sudah secara jelas dikomunikasikan dengan konsisten. Namun jika pelaksana mengalami kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya. Maka implementasi tidak bias berjalan seefektif mungkin. Sumber daya bisa terwujud menjadi sumber daya berikut jenis-jenis dari sumber daya dapat

berasal dari manusia contohnya sumber daya keuangan dan keahlian atau kemampuan dari si pelaksana.

Kaitannya antara sumber daya yang sudah di maksudkan Edwards adalah sebagai berikut ini:

a) Staf : adalah sumber yang menjadi nomor satu untuk melakukan kegiatan pelaksanaan pada kebijakan yang ada sumber daya ini dibagi menjadi dua yaitu ketersediaan staf dan personil. Jumlah staf yang mencukupi dapat mendukung proses pelaksanaan implementator. Akan tetapi Edwards juga mengatakan jika jumlah personil hanya banyak saja tanpa memikirkan keahlian yang dimiliki tidak mampu mendukung keberhasilan implementasi dengan lebih baik lagi. Akan tetapi sumber daya yang baik misalnya staf harus mempunyai kompetensi juga kecakapan yang lebih dibanding orang lain didalam suatu perusahaan.

b) Informasi: Informasi disini adalah informasi yang berkaitan dengan cara untuk melakukan kegiatan atau aktivitas kebijakan yang sudah diarahkan sebelumnya. Apabila program kebijakan dapat berupa hal yang memiliki teknologi dan baru sudah sepastinya akan sulit untuk mendapatkan sosok lain yang mampu melakukan kebijakan itu. Bahkan sering implementator masih belajar menggunakannya sambil tetap melakukan implementasi. Dari pengalaman ini para implementator sudah belajar cara menjalankan kebijakan. Yang kedua agar mengetahui target apa saja yang ada pada kegiatan dan program untuk memenuhi syarat seperti yang sudah dituntut sehingga pada kebijakan diperlukan juga yang namanya informasi.

c) Wewenang: Wewenang dapat dimaksudkan dengan bermacam-macam jenis.

Contohnya mengajukan dan menuntut suatu kasus kepada pengadilan, mencabut memberikan dana untuk membantu atau meringankan kebutuhan saat melakukan kegiatan implementasi, mengesahkan perintah untuk bertugas, memberikan bantuan agar diterima, baik bantuan dari atasan kepada bawahan supaya diterima pada unit bawahannya. Edwards mengemukakan bahwasannya pemerintah sesungguhnya sudah memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan tetapi sering kewenangan itu tidak dipergunakan seefektif mungkin dikarenakan macam-macam faktor misalnya kebutuhan dan pertimbangan politik serta memikirkan hak asasi manusia serta nilai dan norma kemanusiaannya.

d) Fasilitas: Sumber yang penting selanjutnya setelah adanya staf yang memumpuni, informasi yang akurat dan cukup, serta kewenangan untuk melakukan suatu tugas yaitu juga tersedianya fasilitas dan sarana fisik misalnya Gedung, peralatan, insentif juga tempat yang nyaman untuk ditinggali. Tanpa ketersediaan fasilitas-fasilitas ini implementasi tidak bisa dilakukan dengan cara sebaik mungkin. Akan tetapi tersedianya fasilitas yang ada ini butuh perjuangan untuk mendirikannya tidak mudah dikarenakan fasilitas butuh modal yang besar, hal itu juga terkadang mendapatkan tentangan dan hambatan dari warga di Indonesia Ketika akan mendirikan fasilitas misalnya berupa Gedung dan sarana prasarana yang baru.

### 3. Disposisi

Merupakan sebuah karakter atau watak yang dimiliki seorang pelaksana,

Misalnya mempunyai sifat kejujuran, komitmen, dan demokratis. Jika pelaksana

mempunyai disposisi yang cukup baik, lantas implementor itu akan melakukan dan melaksanakan kebijakan menurut pada perintah dengan sebaik mungkin persis sesuai dengan keinginan para pembuat kebijakan itu sendiri. Namun apabila implementor mempunyai sikap dan perspektif yang berlainan pada orang yang membuat kebijakan akhirnya hasil proses pengimplementasian kebijakan menjadi sangat tidak baik atau efektif.

Aspek ketiga yang menjadi konsekuensi terbesar untuk pengimplementasian yaitu disposisi atau kecenderungan. Kecenderungan yang telah diberitahukan oleh Edwards adalah lebih condong menuju kepada respon dan sikap implementor kebijakan saat melakukan pengimplementasian pada kebijakan yang sudah ada. Ketika sang implementor membuat sikapnya sebaik mungkin terhadap kebijakan akhirnya mereka juga akan melakukan kebijakan seperti sesuai diminta oleh beberapa orang yang membuat kebijakan. Hal ini juga sebaliknya terjadi apabila implementor mempunyai sikap dan cara pandang yang tidak sama dengan yang membuat kebijakan maka pastinya implementasi menjadi lebih kompleks dari sebelumnya. Biasanya kebijakan di gunakan untuk dilaksanakan pada organisasi lainnya (jadi yang membuat kebijakan tidak perlu melakukan kebijakan tersebut) untuk pelaksanaan ketidakikutsertaan dalam membuat kebijakan dapat membuahkan rasa yang netral saat melaksanakan kebijakan itu sendiri. Hal inilah yang menjadi peluang agar lebih terbuka lagi interpretasi bagi mereka yang melaksanakan kebijakan -kebijakan yang sudah di buat.

#### 4. Struktur birokrasi



Maksud dari struktur birokrasi disini adalah suatu bentuk struktur organisasi yang dapat mengimplementasikan kebijakan itu sendiri. Aspek dan faktor yang mendukung dari jalannya struktur birokrasi adalah SOP atau *standard operating procedure* serta fragmentasi. Jika struktur dari organisasi ini dinilai lebih Panjang maka akan melemah dalam pengawasannya serta menimbulkan kerumitan dan masalah yang lebih kompleks lagi dan membuat kegiatan organisasi lebih tidak efisien serta kegiatan yang dilakukan tidak menjadi kegiatan yang bersifat fleksibel dari sebelumnya.

Didalam struktur birokrasi untuk menjadikan implementasi kebijakan maka harus memiliki pengaruh yang tetap untuk mengimplementasi dan berhubungan langsung pada kebijakan. Struktur birokrasi terdiri dari dua factor utama yaitu *Standar Operating Procedures* dan Fragmentasi kedua faktor ini mempunyai arti tentang rutinitas dan prosedur tentang bekunya suatu peraturan yang ada maka harus dipatuhi dan kebijakan sudah disusun di awal sendiri dalam proses pelaksanaan. Pengertian dari fragmentasi adalah suatu hal ketidaksesuaian sikap atau pandangan dari pelaksana akan kebijakan yang berada dimasing -masing level yang secara vertikal berjenjang atau berbeda tingkatan.

Cara menggunakan SOP didalam organisasi memiliki beberapa sisi keuntungan yang memiliki jumlah untung yang tidak dapat dihitung namun juga mendapatkan tentangan biasanya dari beberapa pihak yang membuat kebijakan atau implementor kebijakan. Tujuan dari hal ini adalah agar lebih mengemat waktu dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya yang sudah ditugaskan. Fungsi utama adalah sebagai penanganan masalah didalam kegiatan saat berlangsung dan menjamin

kestuan saat mengerjakan kebijakan organisasi disemua level yang berbeda tingkatan.

Terdapat struktur birokrasi dari pendapat Edwards dalam Tulisan Winarno (2008:203) ada dua sifat dan karakter yang menjadi pokok utama adalah:

- a) *Standard Operating Procedures (SOP)* atau yang lebih dikenal dengan ukuran dan prosedur bekerja dalam mengembangkan tanggapan pada pihak internal akan waktu yang menjadi terbatas dan adanya sumber dari para implementator juga keinginan mereka untuk menyeragamkan Ketika bekerja dengan organisasi yang lebih luas dan kompleks lagi
- b) Fragmentasi merupakan sebuah tekanan dari luar unit birokrat misalnya tekanan dari komite, *kelompok* dari pejabat di bidang pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif, kemudian konstitusi serta difat dari kebijakan yang dapat memengaruhi organisasi kebirokratan pada Lembaga pemerintahan.

Berikut pendapat dari Edward III yang ditulis dalam Winarno (2008:175) mengenai proses dari komunikasi pada kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal ada tiga hal yang utama antara lain:

- 1) Berikut faktor nomor satu yang dapat mempengaruhi komunikasi pada kebijakan adalah sebuah transmisi Ketika pejabat belum mampu untuk memberikan pengimplementasian pada sebuah keputusan. Maka dirinya harus mengerti bahwasannya keputusan sudah dibuat untuk dilakukan dan perintah itu harus dilaksanakannya setelah diberikan mandat pada dirinya.
- 2) Faktor kedua yaitu kejelasan, apabila kebijakan pengimplementasiannya dilakukan seperti yang sudah di rencanakan, maka petunjuk untuk melaksanakan harus diterima oleh semuanya tidak hanya diterima implementator akan tetapi juga dikomunikasikan terlebih dahulu akan kebijakan itu memang harus jelas dulu. Sering juga instruksi yang sudah ada itu pada pelaksana menjadi kabur serta tidak ada penerapan kapan dan cara untuk melakukan program untuk di gunakan.
- 3) Faktor ketiga yaitu konsistensi apabila sebuah implementasi diinginkan untuk berlangsung dengan cara yang efektif maka harus perintah dari pelaksana ini harus jelas juga konsisten. Meskipun perintah yang dikeluarkan terhadap pelaksana sudah jelas, akan tetapi jika perintah itu masih memiliki tentangan dengan perintah yang ada maka tidak mudah untuk dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas secara lebih baik lagi.

Berikut ada tahapan-tahapan kebijakan publik yang dapat diacukan terhadap model C.

Edwards yaitu:

a) Tahap Menyusun agenda

Pejabat dari kalangan pemerintahan yang sudah mendapatkan mandat untuk merumuskan kebijakan akan diangkat dan diperbolehkan mengutarakan masalah-masalah saat ada agenda publik. Namun masalah yang sudah ada ini dikompetisikan dengan masalah lainnya dulu baru mendapatkan urutan untuk dibahas di rapat agenda. Akhirnya masalah yang sudah lolos ini masuk kedalam agenda dan mulai untuk dirumuskan penyebab masalahnya. Pada tahapan ini ada beberapa masalah yang belum dapat untuk disentuh sementara masalah lainnya bias juga ditetapkan kemudian menjadi fokus lalu dibahas. Beberapa masalah ada yang tertunda lama dikarenakan latar belakang masalah yang kurang kuat maka tertunda dibanding masalah lainnya yang lebih penting.

b) Tahapan Menyusun formulasi dari kebijakan

Masalah yang sudah masuk ke dalam agenda kebijakan lalu di bahas dengan semua orang yang membuat kebijakan yang terlibat dan kompeten didalam bidangnya. Masalah yang sudah terkumpul kemudian di lakukan pendefinisian untuk dicarikan bagaimana cara memecahkan masalah yang paling baik. Cara memecahkan masalah bisa berkaitan dari bermacam-macam alternatif dan pilihan akan kebijakan yang memang saat itu sudah ada. Didalam merumuskan kebijakan alternatif saling bersaing untuk bisa dipilih sehingga kebijakan yang dimiliki dapat memberikan solusi pemecahan pada masalah yang ada. Didalam tahapan ini para aktor melakukan persaingan dengan sesama untuk berusaha memberikan usulan terbaik dalam

memecahkan masalah yang ada.

c) Tahap mengadopsi kebijakan

Adanya kebijakan yang bermacam-macam dengan jenis-jenis alternatifnya yang sudah di buat oleh perumus kebijakan. Akhirnya di ambil satu alternatif yang terbaik yang sudah di pilih dan sudah didukung oleh mayoritas pejabat yang duduk di pihak legislatif, direktur dan konsensus Lembaga atau yang biasa disebut sebagai Lembaga yang memutuskan dari peradilan setempat.

d) Tahapan pengimplementasian kebijakan

Aktivitas atau kegiatan bias dijadikan sebagai catatan ataupun juga sebagai data untuk elit. Kegiatan ini bersifat program yang masih belum dapat dijalankan sebagai implmentasi kebijakan. Cara melaksanakan masih berfokus pada pihak administrasi terkait dengan agen pemerintahan sampai pada tingkatan bawah sendiri. Kebijakan yang sudah diterapkan dan pelaksanaannya dilakukan di setiap unit adminsitratif bertujuan untuk memobilisasikan sumber daya manusia juga keuangan. Di tahap implementasi ini banyak kepentingan yang akan saling berebut untuk bersaing. Implementasi kebijakan tentunya akan mendapatkan banyak dukungan dari implementator, akan tetapi yang lainnya akan mendapati tentangan dari pihak pelaksana kebijakan itu sendiri yang kurang faham akan pengimplementasian kebijakan itu sendiri.

e) Tahap melakukan evaluasi pada kebijakan

Didalam tahapan ini kebijakan yang sudah di laksanakan akan mendapatkan penilaian dan pengevaluasian. Agar bisa dilihat sejauh manakah kebijkaan dapat di gunakan untuk meraih harapan serta tujuan yang ingin dicapai agar dampak yang

timbul sesuai dengan yang di diharapkan. Tujuannya yaitu adalah untuk memecahkan persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu sudah mendapatkan penentuan akan ukuran, kriteria yang dapat dijadikan dasar untuk mendapatkan penilaian akankah kebijakan publik sudah bisa di lakukan.

#### E. Model teori Merilee S. Grindle

Berhasilnya pengimplementasian menurut pandangan Grindle dalam (Subarsono 2011:93) di dasari dengan dua variable yang cukup besar yang diungkapkan adalah terletak pada:

“Lingkungan pada implementasi dan isi dari kebijakan. Variable ini melingkupi sejauh manakah kepentingan dari target kelompok dan kelompok sasaran yang termaktub di isi kebijakan, macam-macam manfaat yang akan diterima oleh target kelompok, seperti apakah perubahan yang didapatkan dengan adanya sebuah kebijakan, lalu letak dari program-pogram apakah sudah sesuai, akankah kebijakan itu sudah merincikan siapa saja pelaksananya secara rinci, juga akankah program telah didukung dengan menggunakan sumber daya yang ada secara memadai”.

- a. Kepentingan yang mendapatkan pengaruh dari kebijakan adalah.
  - 1) Macam-macam manfaat yang akan didapatkan
  - 2) Keinginan untuk merubah sebuah proses disertai dengan ukurannya.
  - 3) Jabatan dari para pembuat program kegiatan
  - 4) Orang yang melaksanakan kegiatan
  - 5) Sumber daya yang bisa didapatkan
- b. Berikut ini adalah konteks dari pengimplementasian yaitu:
  - 1) Kepentingan, kekuasaan serta strategi dari pelaksana yang turut andil didalamnya.
  - 2) Sifat serta karakter dari penguasa dan Lembaga organisasi
  - 3) Daya tanggap dan kepatuhan yang ada

Menurut Wibawa, Dkk(1994:22) Mengemukakan bahwasannya:

“Model Grindle ini didasari oleh konteks pengimplementasiannya serta isi dari kebijakan yang ada. Ide dasar dari penggunaan teori ini adalah bahwasannya kebijakan itu harus di transformasikan, baru implementasi dapat dikerjakan. Keberhasilan teori ini diukur melalui derajat *implementability*. Isi dari kebijakan dengan teori ini terkait dengan hal -hal dibawah ini:

- a. Kepentingan yang sudah dipengaruhi dengan kebijakan yang ada

- 1) Macam-macam manfaat yang mampu didapatkan
- 2) Perubahan-perubahan yang memang di butuhkan
- 3) Kedudukan dari aktor yang membuat kebijakan
- 4) Para implementator kegiatan atau program
- 5) Sumber daya yang bisa didapatkan
- b. Disisi lain konteks pengimplementasian adalah sebagai berikut ini:
  - 1) Kepentingan, kekuasaan strategi para aktor yang ada didalamnya
  - 2) Sifat penguasa serta Lembaga
  - 3) Daya tanggap dan kepatuhan

Bentuk unik dari teori Grindle ini terletak pada pemahaman yang membutuhkan tingkat komprehensif tinggi dari isi kebijakan, khususnya terletak pada pelaksanaan, penerimaan dan barulah pada implementasi kebijakan itu sendiri. Isi kebijakan juga tidak kurang melihat dari arena permasalahan yang terjadi didalam kebijakan itu sendiri yang berhubungan dengan aktor-aktor pengimplementasian dengan melihat situasi, kondisi juga sumber daya pengimplementasi yang ada dan dibutuhkan saat itu.

#### F. Model teori dari Daniel A Mazmanian dengan Paul A. Sebatier

Teori Mazmanian dengan Sebatier dalam (Tahir 2014:77) terkenal sebagai model yang berbentuk kerangka analisis implementasi. Implementasi ideal membutuhkan perangkat untuk mengkondisikan implementasi agar lebih optimal saat melaksanakan analisis implementasi. berikut uraian menurut Parsons dalam (Tahir 2014:77) yaitu:

“ Didalam memetakan model dengan menggunakan model ini memiliki sifat yang sentral dari atas turun kebawah juga lebih memilih tekanan pada cara menekan tata cara kerja dari pasar. Implementasi kebijakan ini memiliki dasar dari model untuk melalui pendekatan sentralistis dan dapat menjadi lebih efektif lagi jika terpenuhi enam persyaratan yaitu:

1. Memiliki tujuan yang konsisten dan jelas
2. Mempunyai teori kausal untuk mengetahui cara akan mengganti sebuah perubahan
3. Implementator memiliki komitmen dan keahlian yang unggul

4. Terdapat beberapa perubahan dari situasi dan kondisi ekonomi-sosio yang tidak akan bisa untuk melemahkan sistem penguasa serta kelompok -kelompok tertentu.

Berikut pendapat dari Mazmanian dan Sebatier dalam (Tahir 2014:78)

mengungkapkan yaitu:

“Terdapat tiga kelompok dari variable yang dapat mempengaruhi berhasilnya suatu implementasi antara lain:

- a. Variabel independen: yaitu variable yang kemudahannya tidak bermasalah untuk dapat terkendalikan dengan suatu indicator pendukung seperti teknologi serta teori. Sasaran, kemudian jenis -jenis perilaku yang terjadi didalam kelompok, tingkat dari sebuah perubahan yang dapat ditetapkan, variable ini dapat disebut dengan variable sifat dari adanya permasalahan
- b. Variabel intervening: adalah variabel yang berlandaskan pada kemampuan kebijakan agar memberikan struktur untuk memproses pengimplementasian melalui indikator konsistensi, kejelasan serta tujuan menggunakan teori kausal , serta tepatnya penggunaan sumber dana, terpadunya hierarkis antara pejabat pemerintahan yang melaksanakan kebijakan, aturan serta Lembaga yang dapat melaksanakannya dan merekrut pelaksana pejabat serta terbukanya akan pihak-pihak luar dari variabel yang ada. Disebut dengan kebijakan karakter atau sifat kebijakan.
- c. Variabel keluar yaitu kebijakan yang dapat mempengaruhi kegiatan implementasi atau bisa disebut dengan lingkungan yang terkait dengan indicator, situasi ekonomi-sosio serta teknologi dan dukungan masyarakat, konsistuen atau sikap, dukungan dari pelaksana implementasi yang jawabannya lebih tinggi dari diri mereka dan kualitas pemimpin komitmen mereka untuk memimpin para pelaksana dibidang pemerintahan.

Kegiatan implementasi kebijakan ini mudah untuk difahami menggunakan tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu terfokus pada aktor yang membuat kebijakan sesuai dengan isi kebijakan. Implementor saat melakukan kegiatan nyata saat menjadi pelaksana di lapangan bisa berbentuk individu sebagai target atau aktor yang mewakili kelompoknya agar mendapatkan target sasaran sebagai seseorang yang di targetkan untuk memperoleh kebijakan.

G. Model dari teori S. Van Meter dengan Carl E. Van Horn

Model ini berpandangan memiliki lima aspek yang dapat mempengaruhi

dari kinerja pengimplementasi sebagai berikut dalam (Subarsono 2011:99):

1. sasaran dan standar kebijakan
2. Sumber dayanya
3. Memperkuat kegiatan dan komunikasi yang terjadi diluar organisasi dan juga didalam
4. Karakter atau sifat pelaksana
5. Kondisi ekonomi, social dan politik.

H. Model dari teori El More, Lipsku, Hjem dan David O’Poter

Menurut teori ini teori dari El More, Lipsku, Hjem dan David O’Poter

didalam tulisan Tahir (2014:83) adalah:

“ Model ini mengimplementasikan kebijakan yang berdasarkan terhadap macam-macam kebijakan publik yang dapat mendorong warga untuk melakukan sendiri pengimplementasian kebijakan atau bahkan tetap membutuhkan peran dari pemerintah, akan tetapi kebutuhan akan birokrat pemerintah ini hanya ada dibagian tingkat bawah saja. Oleh sebab itu kebijakannya yang dipakai haruslah sejalan dengan keinginan yang dituju, keinginan dari masyarakat ini dapat dijadikan suatu target atau para klien dapat menyesuaikan diri dengan pemerintah di tingkat eselon yang memiliki kedudukan rendah sebagai pengimplementasiannya.

Dapat diamati dalam garis yang besar model teori dari implementasi dapat terlihat

beberapa tahap yaitu antara lain:

1. Pengidentifikasi akan jaringan pelaksana yang turut andil didalamnya
2. Macam-macam kebijakan publik yang terdorong dari warga kepada mereka agar melakukan pekerjaan dengan sendiri saat mengimplementasikan kebijakan, atau masih membutuhkan dan mengikutsertakan pejabat ditingkat pemerintahan pada level rendah
3. Kebijakan yang di gunakan harus sejalan dengan yang diharapkan, kebutuhan publik adalah sebagai target yang harus dipenuhi
4. Prakarsa dari warga dengan langsung atau dapat tersalurkan lewat Lembaga masyarakat.



Model ini terdiri dari dua variabel antara lain:

a) Konteks implementasian dan isi dari kebijakan Isi kebijakan terdiri dari:

- 1) Kepentingan yang sudah dipengaruhi dengan kebijakan
- 2) Berbagai macam manfaat yang berguna dan dapat di hasilkan
- 3) Derajat dari perubahan yang dibutuhkan
- 4) Kedudukan saat membuat kebijakan
- 5) Melaksanakan kegiatan

### I. Model Implementasi Kebijakan melalui MSN Approach

Model ini adalah model yang berkembang dari Yulianto Kadji menurutnya dalam (Tahir, 2014:96) bahwa sebuah kenyataan dari kebijakan akan dapat terimplementasikan jika berfokus atau berlainan terkonsepkan secara langsung dari tiga aspek yaitu stakeholders, pemerintahan dan sektor pemerintahan serta masyarakat. Pemerintah disini memiliki eksistensi untuk membuat dan mengambil kebijakan dengan aktor legislative, pemerintahan menjadi aparatur atau pengimplementasian sebagai penegak kebijakan Menurut Dwidjowijoto dalam (Tahir 2014:98) berpendapat terdapat empat hal yang harus dimiliki dalam pelaksanaan suatu kebijakan keempatnya itu adalah:

1. Ketepatan pada target
2. Tepatnya dalam melaksanakan disebuah lingkungan
3. Tepat saat melakukan
4. Kebijakan yang dibuat sudah sesuai

Pengimplementasian dari berbagai macam kebijakan terkait dengan penggunaan dana untuk membantu kegiatan pengoperasionalan Lembaga Pendidikan

atau disingkatnya dana bantuan operasional sekolah (BOS) adalah pembahasan yang dapat diberikan kedalam penelitian yang ada, konteks pengimplementasian dapat berpedoman pada penggunaan peraturan yang sudah dibuat dari pemerintah untuk kebijakan tersebut harus dapat ditaati sekolah sebagai sebuah organisasi yang melaksanakan kebijakan ini. Hal ini sesuai dengan yang sudah dikatakan Syafaruddin bahwasannya pengimplementasian akan kebijakan bisa melalui suatu kebijakan turunan atau derivat yang terkait dengan kebijakan lainnya yang umum. Oleh sebab itu implementasi kebijakan ini akan berpedoman pada petunjuk Teknik pelaksanaan dana BOS didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2021 terkait dengan petunjuk Teknik pengolahan dana bantuan operasional sekolah yang bersifat regular yang didalamnya mengacu akan petunjuk Teknik ini maka kegiatan Bantuan operasional sekolah ini adalah turunan derivat dari program kebijakan publik.

### **2.2.3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

#### **2.2.3.1. Pengertian proses memberikan Bantuan untuk mengoperasionalkan**

##### **Sekolah (BOS)**

Jika didalam isi undang-undang nomor 20 tahun 2003 yaitu membahas tentang sistem Pendidikan lebih tepatnya di dalam pasal 34 ayat 2 bahwasannya pemerintah daerah dan pusat akan menjamin penyelenggaraan wajib mengenyam Pendidikan di tahap dasar dan menengah tanpa mengeluarkan uang sepersen pun.

Lantas pada pasal 34 ayat 3 diberitahukan tugas mengenyam Pendidikan gratis di tingkat SD dan SMP adalah tugas dari negara untuk menyelenggarakan hal tersebut yang sudah di canangkan di tingkat pemerintah pusat serta sampai pada pemerintah daerah dan didukung oleh warga sekitar. Fokus pendidikannya adalah kewajiban

mengenyam Pendidikan 9 tahun belajar.

Isi materi didalam dana BOS untuk melatih sekolah dan madrasah agar lebih berlomba-lomba dalam meningkatkan kinerja manajemennya dengan berfokus pada akuntabilitas dan tata kelola sekolah. Dana BOS ini menjadi program yang dicanangkan oleh pemerintah berupa bantuan dana agar masyarakat khususnya orang tua peserta didik ringan dalam membiayai kebutuhan peserta didik agar peserta didik mendapatkan Pendidikan 9 tahun wajib belajar dan lulus (Kementerian Pendidikan:313).

Pada Peraturan Menteri dan Pendayagunaan Negara nomor 6 tahun 2021 mengenai cara Teknik dalam mengelola bantuan dana BOS ini menyebutkan:

“Dana BOS ini adalah dana yang dipergunakan untuk mencukupi pendanaan non-personalia di tingkat menengah dan dasar. Agar terlaksananya program-program wajib belajar mengajar dana BOS juga dapat digunakan untuk melakukan pendanaan kegiatan yang lainnya. Yang terpenting harus tetap sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dana BOS ini di berikan agar terbantu semua kebutuhan pembelanjaan operasional untuk siswa di jenjang menengah dan Pendidikan dasar.”

### **2.2.3.2. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Berikut yang menjadi tujuan akan berlakunya penggunaan dana untuk mengoperasionalkan kebutuhan -kebutuhan dari keumuman penggunaannya adalah untuk pemerataan kegiatan Pendidikan. Program ini membebaskan Sebagian warga yang kurang mampu agar mereka tidak perlu membayar lagi dana sekolah. Melalui kegiatan ini diharapkan anak -anak yang berumur 7-15 tahun dapat mengenyam dan menyelesaikan sekolah mereka dari jenjang SD sampai SMP. Jika semua anak yang berusia 7-15 tahun dapat menyelesaikan sekolahnya maka pemerintah telah sukses untuk memberikan Pendidikan yang layak bagi mereka yaitu pemenuhan sekolah

terhadap peserta didik di jenjang SD hingga SMP sampai tamat dan ini adalah suatu angka keberhasilan untuk seluruh pemerintahan dikarenakan mampu membuat program pemerintahan yang secara nasional berhasil menghantarkan peserta didik untuk menikmati Pendidikan dengan harga yang terjangkau.

Tujuan khusus dari dana ini untuk digunakan Lembaga Pendidikan sudah ada di dalam petunjuk Teknik yang dikatakan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (2012: 3) adalah:

1. "Melakukan pembebasan pungutan kepada semua peserta didik SDLB/SD dan SMPLB/SMP atau juga SMP yang terbuka agar menggratiskan pendanaan operasi pada Pendidikan, kecuali sekolah dengan taraf Internasional. Pungutan atau sumbangan yang ada di sekolah RSBI harus tetap memerhatikan kapasitasnya sehingga pungutan tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memberatkan pelajar."
2. Memberikan kebebasan bagi peserta didik yang datang dari keluarga yang kurang mampu untuk tidak dimintai lagi tentang pungutan sekolah baik yang bersekolah di swasta dan negeri.
3. Biaya dana BOS digunakan untuk memperringankan beban terhadap Pendidikan bagi banyaknya peserta didik yang sedang mengenyam Pendidikan.

Kementerian kebudayaan dan Pendidikan (2012:114) program dana BOS ini akan dapat membantu wali murid siswa dari beragam hal misalnya:

1. "Menyekolahkan anak mereka ke madrasah atau sekolah .
2. Menjaga motivasi peserta didik agar mereka termotivasi untuk terus bersekolah, dengan dana BOS ini mengurangi anak -anak yang putus dari madrasah atau sekolah.
3. Memberikan kemudahan untuk peserta didik agar merasakan sekolah dan mengenyam ke tingkat yang tinggi dari sebelumnya bisa dari SMP ke SMA.

Pandangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012: 114), bagi sekolah/madrasah, dengan adanya program ini akan mendapatkan:

1. Memberikan peningkatan terhadap mutu yang ada didalam Pendidikan yang sudah ada
2. Melakukan pengembangan akan otonomi -otonomi dari yang sudah dimiiki oleh madrasah dan sekolah-sekolah.

### 2.2.3.3. Prinsip Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pengolahan dana BOS didasarkan melalui prinsip-prinsip yang ada pada peraturan

Menteri dan Pendidikan nasional pada nomor 6 tahun 2021:

- a. “Fleksibel cara menggunakan dana BOS digunakan dengan berlandaskan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan didunia Pendidikan.”
- b. Efektif menggunakan dana ini untuk pengupayaan akan memberikan pengaruh, hasil, daya guna agar tercapai tujuan pada Pendidikan di sekolah -sekolah
- c. Efisien penggunaannya digunakan agar meningkatkan keoptimalan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan biaya yang minim dan memperoleh hasil seoptimal mungkin.
- d. Akuntabilitas cara penggunaannya bisa mendapatkan tanggung jawab oleh pihak-pihak yang berwenang dalam mendistribusikan dana ini dengan menggunakan pertimbangan yang sesuai dengan undang-undang yang ada.
- e. Transparan pengelolaannya terbuka dan mengakomodisirkan kepentingan -kepentingan tentang pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sekolah.

### 2.2.3.4. Sasaran dan Besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut pada peraturan Mentari Pendidikan kebudayaan No 6 tahun 2021 mengenai petunjuk Teknik pengolahan dana BOS sasaran yang menerima dana ini adalah:

1. “SD (Sekolah Dasar).
2. SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa).
3. SMP (Sekolah Menengah Pertama).
4. SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa).
5. SMA (Sekolah Menengah Atas).
6. SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa).
7. SLB (Sekolah Luar Biasa).
8. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

Berikut syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah -sekolah jika ingin mendapatkan bantuan dana BOS ini:

- a. Melakukan dan mengisi kemutakhiran pada data dapodik harus secara keadaan yang nyata pada sekolah yang ada hingga 31 Agustus terakhir pengisiannya.
- b. Mempunyai Nomor pokok secara nasional yang tercatat di Dapodik
- c. Mendapatkan izin untuk bisa melakukan pembelajaran pada sekolah -sekolah yang didalamnya ada peserta didik dan terdata di dapodik
- d. Mempunyai jumlah siswa minimal 60 siswa dengan lamanya 3 tahun belakangan ini.
- e. Bukan Pendidikan sekolah yang melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Syarat bagi sekolah tersebut bisa dilakukan dan terdapat sekolah-sekolah yang bebas akan syarat diatas. Yaitu:

- a. Sekolah integrasi Misalnya SDLB, SMPLB, SMALB
- b. Sekolah didaerah tertinggal yang sudah ditetapkan mendapatkan jatah oleh pemerintah.
- c. Sekolah yang penyelenggarannya dilakukan oleh pemerintah di bagian daerah dengan wilayah yang jarang penduduk dan dari geografis tidak bisa menggabungkan sekolah tersebut dengan sekolah lainnya.

Sekolah diatas dapat dikecualikan tanpa syarat yang harus dipenuhi namun harus mendapatkan izin dahulu dari dinas kemudian selanjutnya mengusulkannya terhadap Menteri.

Berikut besarnya dana alokasi bantuan BOS jika di lihat melalui PERMENDIKBUD

No 6 tahun 2021 yaitu:

“Penghitungannya dengan cara melihat biaya pada daerah masing-masing kemudian dikalikan pada jumlahnya siswa yang bersekolah. Besarnya biaya di tetapkan Menteri. Jumlah siswa yang ada dihitung dari siswa yang punya NISN. Data Siswa yang punya NISN adalah siswa yang terdaftar sebelum tanggal 31 Agustus. Dapodik adalah data pokok Pendidikan ada untuk dipergunakan menentukan jumlah dana yang akan di berikan terhadap peserta didik saat menyalurkan dana BOS. Terdapat tiga tahapan untuk menyalurkan dana BOS ini. Syarat sekolah yang menerima dana dengan pengecualian adalah sekolah yang berada di wilayah yang jarang penduduk. Dengan geografis yang sangat sulit untuk digabung dengan sekolah lainnya. Besarnya biaya Pendidikan pada dana BOS ini dilihat dari :

- a. Siswa yang terdaftar di NISNnya.
- b. Cara menghitungnya di hubungkan pada sekolah induknya.

Terkait dengan peraturan Menteri Pendidikan Indonesia dan kebudayaan pada No 6 Tahun 2021 mengenai tata cara mengelola dana BOS. Maka penggunaannya disalurkan dengan cara tahap demi tahap sesuai ketentuan berikut ini:

- a. Pada tahap I pelaksanaan penyaluran di kerjakan saat sekolah sudah melengkapi laporan untuk menggunakan dana BOS di II tahun yang lalu.
- b. Menyalurkan dana BOS di tahap ke II setelah penggunaan dana bos itu sendiri di tahap III selesai.
- c. Menyalurkan pada tahap ke III ini sekolah -sekolah memberikan penyampaian terlebih dahulu pada tahap I setelah anggaran keuangan sudah dijalankan.

Penggunaan dana BOS ini digunakan sesuai dan harus merujuk pada ketentuan yang ada untuk melakukan penyelenggaraan pengurusan di bidang pemerintah untuk menstabilkan kebutuhan pendanaan dalam bidang Pendidikan di sekolah-sekolah.

Dana bantuan operasional sekolah berkaitan dengan dana alokasi secara non fiisk atau khusus. Sekolah dapat secara langsung mempergunakan layanan dana BOS ini untuk mendanai terselenggaranya kegiatan operasional pada pembelajaran sesudah dana BOS ini tersalurkan dan masuk ke rekening masing-masing sekolah yang ada

#### **2.2.3.5. Ketatausahaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Pendapat dari Irianto (2008: 158), mengenai dana BOS dapat diberikan untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pemerataan Pendidikan serta memberikan solusi untuk menuntaskan pendidikan wajib belajar selama 9 tahun. Agar tercapai tujuan ini kementerian Pendidikan dan kebudayaan sudah melakukan cara dengan menerapkan manajemen basis pada sekolah untuk strateginya agar bisa diikuti oleh seluruh sekolah di Indonesia. Hal ini terkonepkan menurut bapennas dapat dijadikan alternatif untuk kegiatan desentralisasi disekolah. Yang dijadikan tanda yaitu munculnya otonomi secara luas terhadap sekolah dalam menjalankannya, keaktifan

warga juga dinilai untuk menyelenggarakan kebijakan ini agar lebih mendukung

Pendidikan dan majunya sektor Pendidikan dimasing-masing wilayah.

Sudah tertera dalam peraturan pemerintah dan disahkan oleh pemerintah pada nomor 19 pada tahun 2005 mengenai standar Pendidikan di pasal 53 ayat pertama mengatakan bahwa satuan Pendidikan cara mengelola seharusnya mengacu pada rencana kerja dalam kurun waktu tertentu bisa setahun, semester kemudian dijabarkan secara rinci kedalam rencana kerja menengah selama 4 tahun lamanya. Rencana kerja tahunan ini yang menjadi cikal bakal rencana anggaran kegiatan disekolah-sekolah.

Cara Menyusun rencana anggaran untuk kegiatan sekolah adalah merupakan tahapan terakhir saat Menyusun rencana di berbagai sekolah di Indonesia. RAKS atau M berisikan kegiatan sekolah dalam satu tahun lamanya dengan besarnya dana yang di keluarkan juga disetiap memenuhi kebutuhan sekolah. Saat Menyusun menggunakan pendekatan MBS Manajemen berbasis sekolah. Ketika melakukan penyusunan maka harus dicapai dengan berlandaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang utama adalah meningkatkan mutu Pendidikan salah satu tujuan dari MBS yaitu kepanjangan dari manajemen berbasis sekolah

Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah/Madrasah (RAKS/M) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012: 139) adalah:

“Penyusunannya setelah satuan Pendidikan melakukan susunan untuk menetapkan program-program, mempertanggung jawabkannya jadwal dan kegiatan setelah dilakukan perumusan didalamnya. Berikut tahapan-tahapan yang digunakan saat Menyusun RAKS adalah dengan:

- 1) Mengerjakan rencana-rencana pada semua kebutuhan sekolah termasuk dana pada satuan pendidikan.
- 2) Melakukan penyesuaian rencana-rencana terhadap dana pada sumber-sumber masuknya dana dari mana saja untuk satuan Pendidikan tersebut.



Jika susunan rencana anggaran untuk kegiatan sekolah sudah selesai dibuat tahap berikutnya adalah mengesahkan dan melakukan kegiatan sosialisasi tentang penganggaran. Susunan RAKS terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan saat pelaksanaannya rapat pada dewan hal ini juga harus mendapatkan pengawasan dari komite satuan Pendidikan. Proses sosialisasi dilaksanakan terhadap pihak yang berhubungan misalnya wali murid dengan cara memberitahu lewat pengumuman atau sebaran undangan agar melakukan rapat. Di sekolah -sekolah ataupun melakukan penempelan hasil rapat di tempat pengumuman sekolah.

Ada alur kegiatan tata usaha saat menjalankan kegiatan Dana BOS. Alur itu terkait menerima, mengeluarkan dan melaporkan. Singkatnya kegiatan menerima pada sekolah-sekolah dari kementerian Pendidikan kebudayaan (2012:168) dikelompokkan dengan cara berikut ini:

- A. "Pemerintah ( Pusat, Dana Alokasi Khusus)
- B. Pemerintah Daerah kota atau kabupaten dan provinsi (Bantuan Operasional Sekolah Daerah disingkat (BOSDA)
- C. Kemandirian sekolah atau madrasah
- D. Orang tua wali murid
- E. Industri dan dunia usaha
- F. Sumber lain misalnya hibah yang sejalan dan tidak melanggar undang-undang.
- G. Bentuk satuan Pendidikan dengan bentuk Yayasan penyelenggara pendidikan bisa disebut dengan swasta".

Dana keluar yang dilakukan saat membelanjakan uang untuk mencukupi kegiatan pembelajaran di satuan Pendidikan. Ketentuan akan pemakaian dana dengan melihat sumber dananya juga. Dana BOS menjadi dana pokok oleh karena itu pemakaiannya dengan cara -cara tertentu. Dan untuk penggunaan dana dengan mendapatkan dari hasil sumber lainnya biasanya sekolah mempunyai tanggung jawab untuk ditaati secara Bersama. Dana BOS yang dapat diterima satuan Pendidikan juga

dapat dipakai untuk melaksanakan pembiayaan dengan komponen-komponen sebagai berikut ini:

**Tabel 2.2:** Pemakaian Dana untuk membentuk pengoperasionalan Lembaga Pendidikan (BOS)

No.	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
1.	Mengembangkan Perpustakaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperbaiki buku-buku paket dan teks yang sudah rusak dan menambahkan untuk peserta didik agar semuanya memiliki buku rasionya satu peserta didik mendapatkan satu buah buku.</li> <li>b. Berlangganan pada jurnal - jurnal terpublikasi secara berkala</li> <li>c. Memiliki sumber akses pada jaringan sistem informasi online</li> <li>d. Memelihara koleksi atau buku yang ada diperpustakaan dan merawatnya</li> <li>e. Meningkatkan kompeten dan keahlian pustakawan di sekolah.</li> <li>f. Mengembangkan database diperpustakaan</li> <li>g. Memelihara pada berbagai macam perabotan-perabotan yang ada di perpustakaan</li> </ul>	<p>a. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 mengenai Perpustakaan. Menggunakan dana sebesar Minimal 5% dari dana yang ada di semua penggunaan dana untuk mengoperasionalkan untuk memberikan bantuan pada sekolah-sekolah yang ada.</p>
2.	Kegiatan satuan Pendidikan saat menerima peserta didik baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dana yang dikeluarkan saat mendaftar pada sekolah yang ada</li> <li>b. Mengadakan formulir</li> </ul>	<p>Dana ini juga terkait dengan dana untuk konsumsi panitia penerimaan dan uang lembur mereka standarnya saat membiayai mengacu pada</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Biaya administrasi sekolah.</li> <li>d. Melakukan daftar ulang</li> <li>e. Pengeluaran dana untuk mendatakan diri pada pokok data diri di sekolah</li> <li>f. Membuat spanduk yang bertuliskan sekolah tidak memungut dana sepersenpun</li> </ul>	<p>kesewajaran saat mengeluarkan dana.</p>
3.	<p>Kegiatan belajar mengajar serta pelaksanaan ekstra kurikuler peserta didik di sekolah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PAKEM (SD).</li> <li>b. Pembelajaran secara konteks (SMP).</li> <li>c. Mengembangkan pendidikan dengan mengedepankan perkembangan karakter.</li> <li>d. Kegiatan belajar mengajar peserta didik yang kurang tuntas mendapatkan remedi.</li> <li>e. Kegiatan belajar mengajar yang bersifat pengayaan.</li> <li>f. Melatih dan memantapkan persiapan ujian -ujian pada peserta didik</li> <li>g. Kesenian, olahraga, karya ilmiah.</li> <li>h. Usaha Kesehatan Sekolah dan pramuka (UKS).</li> </ul>	<p>Termasuk untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gaji yang diberikan untuk mendidik peserta didik di setiap mengajar di luar jam mengajarnya dan biaya transport</li> <li>b. Dana transport guru dan peserta didik Ketika sedang melaksanakan ajang lomba</li> <li>c. Fotocopy.</li> <li>d. Mendanai alat-alat untuk berolahraga , melakukan seni, dan mendaftarkan diri pada ajang perlombaan</li> </ul>
4.	<p>Pelaksanaan ujian dan ulangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ulangan harian.</li> <li>b. Ulangan umum.</li> <li>c. Ujian sekolah.</li> </ul>	<p>Termasuk untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fotocopy.</li> <li>b. Upah untuk mengkoreksi ujian peserta didik.</li> <li>c. upah guru saat Menyusun rapor peserta didik.</li> </ul>

5.	Membeli barang habis pakai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membeli buku inventaris, buku tulis, pensil, spidol, buku induk siswa, buku praktikum, kapur tulis.</li> <li>b. Membeli makanan dan minuman untuk keperluan disekolah disetiap harinya</li> <li>c. Mengadakan barang cadangan untuk melengkapi alat-alat yang digunakan di kantor.</li> </ul>	
6.	Pelanggan jasa dan daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pembayaran terhadap telepon, listrik dan air melalui cara berlangganan</li> <li>b. Membiayai fasilitas internet juga memasang internet yang baru</li> <li>c. Pembelian terhadap alat yang cocok pada kondisi ,situasi tertentu yang tidak ada di satuan Pendidikan misalnya panel matahari dan genset.</li> </ul>	Menggunakan internet melalui HP atau modem maksimal pengunannya Rp.250.000 setiap bulannya.
7.	Biaya untuk merawat sekolah	Melakukan perbaikan pada atap yang sudah bocor, mengecat , memperbaiki jendela dan pintu,memperbaiki mebel dan sanitasi misalnya WC Atau tempat mandi memperbaiki lantai dll	WC dan tempat mandi peserta didik harus dapat dipakai saat siswa membutuhkannya di sela-sela pembelajaran maupun istirahat
8.	Membayar gaji pendidik yang masih berstatus honorer, karyawan sekolah yang berstatus honorer	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Guru dengan status masih honorer.</li> <li>b. Karyawan tata usaha</li> <li>c. Penjaga perpustakaan</li> <li>d. Satpam</li> <li>e. Penjaga sekolah</li> <li>f. Cleaning service</li> </ul>	Pendidikan honorarium satuan Pendidikan diharuskan untuk melakukan pertimbangan batas-batas maksimal menggunakan dana BOS untuk membelanjakan pada karyawannya. Juga digunakan kualifikasi pendidik berstatus honorer mereka harus menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan yang

			diperlukan.
9.	Mengembangkan keprofesian dan kompetensi pendidik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan MGMP Atau KKG</li> <li>b. Melakukan seminar yang berkaitan secara langsung untuk meningkatkan mutu guru juga menjalani tugas dari satuan Pendidikan terhadap dirinya.</li> </ul>	Syarat di khususkan terhadap satuan Pendidikan yang mendapatkan dana hibah mengembangkan MGMP atau yang serupa dengan MGMP hanya boleh digunakan untuk mendanai transport jika dana hibah itu tidak menyediakan dana transport.
10.	Membantu peserta didik yang kurang mampu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan dana tambahan mislanya dana transport untuk peserta didik yang kurang mampu agar tidak terbebani masalahnya.</li> <li>b. Membiayai dana dan alat-alat yang berhubungan dengan transport untuk peserta didik kurang mampu dan membeli bahan sekolah untuk inventaris misalnya perahu, sepeda dll</li> <li>c. Mendanai sepatu, seragam , alat tulis untuk peserta didik yang tidak mampu membelinya (BSM) pembelian itu didasarkan pada banyaknya penerima dana tersebut baik sumber dana dari daerah , pusat ataupun lainnya.</li> </ul>	
11.	Membiayai pengolahan dana BOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Digunakan untuk membeli alat tulis untuk mencukupi ketersediaan barang dikantor(CD, printer, tinta , spidol)</li> <li>b. Menggandakan surat</li> </ul>	

		secara insentif untuk bendahara sekolah jika menggunakan penyusunan pada laporan-laporan dana BOS dan tambahan biaya untuk mengambil dana BOS tersebut di Bank	
12.	Membeli alat-alat pendukung computer	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Desktop.</li> <li>b. Scanner dan print</li> </ul>	Peralatan komputer tersebut harus ada di sekolah. Maksimal pembelian alat alat ini di anggarkan 1 barang disetiap tahunnya.
13.	Dana BOS digunakan untuk mendanai barang-barang lainnya jika semua kebutuhan sudah terpenuhi oleh dana BOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Media mengajar atau alat - alat peraga untuk mengajar.</li> <li>b. Perlengkapan UKS</li> <li>c. Memperbarui meja atau kursi jika sudah tidak layak digunakan lagi</li> </ul>	Saat menggunakan dana BOS dengan sisanya ini maka harus diadakan secara Bersama dengan komite melalui rapat Bersama

Sumber: Petunjuk Teknik penggunaan dana untuk memberikan bantuan akan pengoperasionalan di Lembaga pendidikan di Tahun 2013

Penggunaan dana BOS tentunya memiliki batas -batas maksimal yang bisa untuk dipergunakan biasanya anggaran itu digunakan untuk menutupi anggaran belanja karyawan (Honor pegawai tata usaha, guru dll) biasanya dana yang dipakai sekitar 20% setiap tahunnya. Terdapat 13 item yang dicatat kedalam format untuk dapat digunakan kemudian disatukan ke dalam penerapan 8 standar Pendidikan ke 8 standar ini misalnya standar proses, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, isi, pengolahan, penilaian Pendidikan dan pembiayaan serta standar yang berhubungan dengan tenaga pendidik dan mengembangkan kompetensi guru.

Beberapa larangan penggunaan dana BOS di sekolah menurut Peraturan

Menteri Pendidikan dan kebudayaan no 76 tahun 2012 tentang petunjuk penggunaan dana BOS yaitu:

- a. Penyimpanan dana BOS kemudian dana tersebut dibiarkan untuk mendapatkan Bunga lebih.
- b. Dana tersebut di pinjamkan ke pihak tertentu
- c. Digunakan untuk melakukan pembelian (LKS) lembar kerja siswa
- d. Digunakan untuk mendanai kegiatan yang bukan menjadi kegiatan utama dan membutuhkan dana yang besar contohnya tur, studi banding.
- e. Dipakai untuk mendanai iuran yang digelar oleh dinas Pendidikan pusat dan daerah.
- f. Mendanai biaya transport pendidik dan bonus guru
- g. Di gunakan untuk mendanai aksesoris guru dengan alasan memperbaiki penampilan pendidik untuk kepentingan pribadi. Tidak untuk membantu siswa Miskin.
- h. Menggunakan dana untuk rehab kondisi barang dengan kerusakan berat atau sedang Menambah ruang atau Gedung yang baru
- i. Mendanai perlengkapan yang tidak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar
- j. Membeli saham
- k. Mendanai kegiatan yang sudah ada dananya dan dana itu sudah tercukupi oleh dana dari daerah dan pemerintah pusat

- l. Mendanai hal-hal yang menunjang kegiatan dan tidak memiliki hubungan dengan proses pembelajaran di satuan Pendidikan. Contohnya mendanai iuran di hari keagamaan dan hari nasional.
- m. Mendanai kegiatan- kegiatan untuk melaksanakan sosialisasi melakukan pendampingan pada pihak tertentu yang masih memiliki kaitan pada penggunaan dana BOS serta penggunaan pajak dana BOS yang dilakukan di luar SKPD bidang Pendidikan dari Lembaga pusat dan daerah.

Cara melaporkan pemakaian dana BOS yang tidak sesuai ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam mengikuti sumber pemasukan dana itu. Hal ini sama dengan pelaksanaan dana BOS dalam kegiatan melaporkan terdapat undang-undang yang mengatur dan harus di gunakan. Laporan ini diberikan pada triwulan , semester dan per tahun terhadap tim manajemen dana BOS. Laporan dana BOS juga harus transparansi dikarenakan laporan ini akan diberitahukan ke warga secara teknis seperti laporan penggunaan dana tersebut dengan menggunakan format tertentu untuk melaporkan dana bantuan operasional sekolah.

#### **2.2.4. Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKAB) atau (BOSDA)**

Sebagai salah satu wujud pelaksanaan Pasal 34 ayat 3 Undang - Undang tersebut, serta untuk mendukung program pendidikan menengah universal dan Rintisan Wajib belajar 12 tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) Pendidikan Dasar dan Menengah.

BOSKAB itu sendiri ialah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang mulai tahun 2008 kepada satuan pendidikan formal yang digunakan untuk memenuhi kekurangan dan / atau



melengkapi Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dari pemerintah pusat, untuk semua lembaga pendidikan, yang meliputi SD/MI/SDLB/, SMP/MTS/SMPLB Negeri/Swasta, SMA, SMK

Pemberian dana BOSDA pada tahun 2015 untuk lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang untuk pendidikan, sehingga di harapkan akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis yang berkualitas bagi pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Malang

Pemberian dana BOSKAB pada tahun 2020 untuk lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang untuk pendidikan, sehingga di harapkan akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis yang berkualitas bagi pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Malang

#### 2.2.4.1 Tujuan Pemberian BOSKAB atau BOS Daerah

Secara umum program BOSDA bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, serta meningkatkan mutu pada pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, diharapkan program BOSDA juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standart pelayanan minimal sekolah

Secara khusus, program BOSDA bertujuan untuk :

1. Memberikan bantuan operasional bagi TK/RA/ABA/ Negeri dan Swasta
2. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB dan SMA/MA/SMK/SMALB Negeri terhadap Biaya Operasional Sekolah.
3. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah Negeri dan Swasta.

Meringankan Biaya Operasional Sekolah bagi siswa SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB/SMPT/SMP Satu Atap dan SMA/MA/SMK/SMALB Swasta.

#### **2.2.4.2 Mekanisme Penyaluran BOS Kabupaten atau BOS Daerah**

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Malang melakukan verifikasi data jumlah siswa persekolah sebagai penetapan alokasi dana BOSKAB tiap sekolah
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menetapkan alokasi dana BOSKAB tiap sekolah dalam surat keputusan Kepala Dinas Kabupaten Malang
3. Dinas Pendidikan mengirimkan keputusan alokasi dana BOSKAB tiap sekolah kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kabupaten Malang sebagai dasar pencairan dana BOSKAB kepada masing-masing sekolah
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) menyalurkan dana BOSKAB ke rekening masing-masing sekolah atas nama sekolah penerima BOSKAB

#### **2.2.4.3 Sasaran**

1. TK/RA/ABA/BA Negeri / Swasta dengan ketentuan alokasi dihitung perlembaga ;
2. SD/SDLB/MI Negeri/Swasta, dengan ketentuan alokasi persekolahan dihitung berdasarkan jumlah siswa.
3. SMP/MTS/SMPLB/SMPT/SMP Satu Atap Negeri / Swasta, dengan ketentuan alokasi persekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa.
4. SMA/MA/SMK/SMALB dengan ketentuan alokasi persekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa.

5. Besaran dana BOSDA pada tahun 2021 dihitung berdasarkan lembaga /

jumlah siswa dengan ketentuan sebagai berikut :

a. TK Negeri Pembina sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) untuk

setiap lembaga per bulan selama 1 ( satu ) tahun;

b. TK/RA/ABA/ BA Swasta sebesar Rp. 250.000,00 ( dua ratus lima puluh

ribu rupiah) untuk setiap lembaga per bulan selama 1 ( satu ) tahun;

c. SD/MI/SDLB Negeri/Swasta :

1) Untuk biaya operasional pembelajaran sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh

ribu rupiah ) untuk setiap siswa per bulan selama 1 ( satu ) tahun;

2) Untuk tambahan makanan sehat sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

untuk setiap siswa per paket sebanyak 36 kali selama 1 ( satu ) tahun;

3) Untuk tambahan nutrisi susu sebesar Rp. 3.200,00 ( tiga ribu dua ratus

rupiah) setiap siswa per paket sebanyak 36 kali selama 1 (satu) tahun;

d. SMP/MTs/SMPLB/SMTSA Negeri/Swasta

1) Untuk biaya operasional pembelajaran sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh

ribu rupiah) untuk setiap siswa per bulan selama 1(satu) tahun;

2) Untuk tambahan makanan sehat sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

untuk setiap siswa per paket sebanyak 36 kali selama 1 (satu) tahun;

3) Untuk tambahan nutrisi susu sebesar Rp. 3.200,00 (tiga ribu dua ratus

rupiah) setiap siswa per paket sebanyak 36 kali selama 1 (satu) tahun;

e. SMA/MA/SMALB Negeri /Swasta sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu

rupiah) untuk setiap siswa per bulan selama 1 (satu) tahun;

f. SMK Negeri / Swasta sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu

rupiah) untuk setiap siswa per bulan selama 1 (satu) tahun.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Dari beberapa permasalahan-permasalahan yang telah diangkat, penelitian yang dilakukan ini menggunakan kualitatif pada pendekatan deskriptif. Alasan mengapa dilakukan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dikarenakan peneliti menginginkan untuk dapat mempelajari konteks-konteks pada penelitian yang sudah berkaitan satu sama lain ini. Penelitian ini juga membutuhkan pemahaman yang mendalam dan sangat mendetail akan masalah-masalah yang ada atau yang sedang dihadapi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berprosedur dengan mendapatkan data deskriptif yang terkait dengan data lisan, tulis, atau kata-kata dari subjek atau objek yang tengah diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang teorinya berlandaskan dan bertumpu pada fenomena-fenomena social dan mencari makna yang ada dalam penelitian ini. Pada penelitian kualitatif fenomena-fenomena dijadikan dasar akan teori yang utama sedangkan lainnya kebudayaan, simbolik, etnometodologi hanya menjadi pelengkap saja tambahan-tambahan akan teori dan menjadi sesuatu hal yang melatar belakangi teori pada penelitian-penelitian kualitatif.

Teori memiliki kedudukan pada teori kualitatif menjadi produk akhir yang memang harus ada. Penelitian-penelitian dirancang dan dibangun bertolak ukur pada konsep dan asumsi yang sudah dikembangkan melalui teori yang memiliki hubungan yang sama dengan jenis penelitian. Jawaban-jawaban yang dijadikan sumber informasi adalah pada data dan bukan teorinya. Penelitian kualitatif berkaitan dengan

teori yang digunakan untuk penyimpanan teori-teori yang di pakai. Atau digunakan untuk menjadi pembanding atau alat untuk memperjelas data atau informasi.

Tesis yang sedang dilakukan ini adalah bentuk dari penelitian dengan bentuk penelitian deskriptif. Penelitian ini memang menganalisis dan mendeskripsikan secara detail dan cermat akan suatu fenomena yang didapatkan . Penelitian deskriptif yaitu penelitian berusaha memberikan suatu sifat, gambaran, karakteristik akan sesuatu hal seperti objek penelitian atau fenomenologis. Bisa juga penelitian ini menggambarkan, menafsirkan, menuturkan, akan situasi yang sedang terjadi hubungan pandangan , kegiatan, atau sikap yang nampak , proses yang tengah terjadi, pengaruh -pengaruh yang mempengaruhi penelitian ini , masalah yang muncul atau kecenderungan pada variable yang nampak.

Dari peneitian yang ada ini peneliti telah membagikan gambar mengenai proses - proses akan penelitian yang menyangkut pautkan pengimplementasian pada kebijakan penggunaan bantuan dana untuk digunakan operasional pada sekolah di sekolah menengah pertama negeri 1 yang ada diwilayah Gondanglegi Malang.

### 3.2. Informan Kunci

Saat menggunakan metode wawancara , peneliti akan mulai memilih sumber-sumber yang sangat dianggap memiliki pengaruh besar dalam penelitian ini dan memiliki kompetensi untuk menjawab pertanyaan terkait focus penelitian. Memilih narasumber dapat dengan melihat pengalaman, jabatan atau tingkat pemahaman pada objek yang tengah diteliti.sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Memilih narasumber menggunakan cara yang *purposive* yaitu dengan cara mencari narasumber yang berpengetahuan cukup akan hal yang terkait dengan focus

penelitian serta narasumber tersebut mampu menerangkan akan keadaan yang benar-benar ada berkaitan dengan objek penelitian agar memperoleh informasi yang khusus untuk memanfaatkan sumber informasi. Yang dimaksud informan adalah orang-orang yang ada pada ruang lingkup penelitian. Maksudnya adalah orang tersebut memiliki kemampuan dengan mudah untuk memberikan data mengenai latar penelitian dan situasi penelitian. Sehingga informan yang baik maka akan mempunyai pengalaman yang banyak tentang berbagai macam permasalahan-permasalahan yang akan dilakukan untuk dijadikan topik penelitian serta sukarela mereka mau menjadi narasumber walaupun tidak formal. Dan akhirnya mereka memberikan pandangan akan sikap, nilai, kebudayaan, proses akan mengapa suatu hal menjadi latar belakang pada penelitian.

Penelitian yang dilakukan peneliti mengambil informan kunci antara lain Kepala Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri yang ada di wilayah Gondangelegi ini juga membutuhkan beberapa pihak lainnya yang juga berada di wilayah SMP negeri 1 Gondangelegi yaitu Bendahara dana BOS, guru dan walimurid peserta didik juga di mintai penjelasan atas apa saja yang sudah terjadi di sekolah tersebut terkait dengan pengimplementasian dana bantuan operasional sekolah yang ada.

### 3.3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti adalah dengan memakai pendekatan kualitatif sehingga peneliti memakai empat sumber informasi antara lain:

A. Informan (Narasumber): Pada penelitian kualitatif penggunaan data yang dipakai oleh peneliti yang berasal dari responden memiliki arti respon adalah suatu bentuk

tanggapan akan sesuatu yang tengah di butuhkan oleh peneliti atau diminta. Posisi narasumber ini pada pendekatan penelitian ini memang tidak main -main berartikan sangat penting tidak hanya untuk memberi respon tetapi juga sebagai orang yang memiliki data. Maka dari itu juga disebut sebagai informan atau dapat pula menjadi sosok yang sedang diteliti dan diamati. Narasumber juga menjadi aktor yang aktif untuk menentukan keberhasilan sebuah penelitian dikarenakan penelitian tersebut berdasarkan pada data -data yang telah disampaikannya sebelumnya.

B. Akfivitas atau yang biasa disebut peristiwa. Informasi atau data -data dapat diambil dengan pengamatan akan aktifitas atau peristiwa yang memiliki hubungan dengan masalah -masalah dalam penelitian. Terkait dengan kejadian atau peristiwa maka peneliti bisa langsung mengetahui proses kejadian yang tengah terjadi secara langsung. Saat peneliti melakukan pengamatan pada aktivitas atau peristiwa maka peneliti bisa melakukan hasil *cross check* akan data verbal yang telah di kemukakan oleh subjek yang tengah diamati.

C. Lokasi atau tempat pada umumnya berkaitan dengan sasaran akan masalah yang sedang di teliti lokasi merupakan sebuah informasi data dan jenis dari data yang harus dikumpulkan. Data yang ada mengenai lokasi dan kondisi akan sebuah aktivitas dapat digali dengan melihat sumber lokasinya baik secara lokasi ataupun lingkungan

D. Arsip atau dokumen arsip adalah data bersifat tulis benda yang terkait dengan aktivitas atau peristiwa tertentu. Dapat berupa dokumen tulis atau rekaman seperti arsip. Misalnya surat rekaman gambar -gambar, benda-benda peninggalan yang terkait dengan peristiwa tertentu atau aktivitas tertentu.

Jenis data pada penelitian kualitatif terdiri dari:



1. Data primer

Maksud dari data primer adalah data yang didapat langsung dari narasumber yang sengaja dipilih dengan peneliti agar mendapatkan informasi-informasi atau data yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada didalam saat melakukan kegiatan peneliti

2. Data sekunder

Data sekunder ini terkait dengan informasi yang diperoleh dari bermacam-macam dokumen baik dokumen elektronik maupun cetak , buku.

**3.4. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan Batasan pada studi yang dilakukan terutama studi kualitatif hal ini berguna karena dapat memberikan Batasan untuk memilah berbagai macam informasi yang terkait dengan penelitian dan juga yang tidak relevan (Moleong: 2010). Batasan penelitian kualitatif ini harusnya berdasarkan pada berbagai macam tingkatan dari kepentingan ataupun urgensi dari masalah yang dialami dalam penelitian ini. Peneliti menganalisis menggunakan model teori implementasi dari George C. Edward. Model teori ini dapat menganalisis penggunaan kebijakan mengenai dana BOS ini sudah dilakukan dengan baik atau tidak.

A. implementasi kebijakan publik pelaksanaan dana BOS dipengaruhi dengan empat faktor, antara lain:

1. Komunikasi dalam implementasi pelaksanaan dana BOS di SMPN 1

Gondanglegi Kabupaten Malang dalam komunkasi terdiri dari transmisi, Kejelasan, konsistensi,

2. Sumber-sumber yang dibutuhkan dalam implementasi pelaksanaan dana BOS di SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang meliputi : staf, Informasi, Wewenang, Fasilitas yang dapat menunjang suksesnya mplementasi dana BOS

3. Disposisi yang terjadi dalam pelaksanaan dana BOS di SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang

4. Struktur Birokrasi yang terlibat pada saat pelaksanaan dana BOS di SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang dalam pengimplementasiannya terdiri dari “*Standard Operating Procedures (SOP)* dalam implementasi pelaksanaan dana BOS di SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang dan fragmentasi antar struktur birokrasi yang terlibat.

B. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam mengimplementasi pelaksanaan dana BOS di SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang

1. Faktor pendorong :Terpenuhinya kebutuhan sekolah, Antusias Masyarakat Memilih Sekolah Gratis, Kondisi Angka Putus Sekolah dapat ditekan Setelah Adanya Program BOS, Dampak disekitar sekolah yang dirasakan dengan adanya kebijakan dana BOS

2. Faktor penghambat :Waktu Pencairan Dana Bos, Pembelajaran pada masa Pandemi covid 19, kurangnya pengetahuan orangtua siswa tentang dana BOS,

Ada Campur Tangan Birokrasi Dalam Pengelolaan Dana BOS

### 3.5. Lokasi dan Situs Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian ini merupakan lokasi akan di gunakan sebagai bahan untuk melakukan penelitian. Dengan menentukan lokasi penelitian maka informasi dan data dapat didapatkan peneliti. lokasi yang dipilih berada di Jl. Raya Ketawang 4, Krajan, Ketawang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Situs penelitian adalah suatu lokasi yang didapatkan oleh peneliti untuk menangkap keadaan yang sesungguhnya akan objek yang sedang diteliti agar mendapatkan informasi atau data yang sangat dibutuhkan. Sesuai pada masalah yang ada maka situs penelitian yang di pilih yaitu sekolah di sekolah tingkat menengah pertama yang berada di wilayah Gondanglegi Kabupaten Malang. Alasan memilih Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang dikarenakan sekolah tersebut merupakan sekolah yang telah mendapatkan dana BOS dari pemerintah pusat dan setempat.

Dengan menggunakan Situs penelitian dan lokasi penelitian ini maka di harapkan peneliti memperoleh informasi atau data yang sehubungan dengan masalah yang ada tentang penggunaan dan pengelolaan Dana bantuan untuk mengoperasionalkan sekolah yang ada di wilayah Gondanglegi yaitu sekolah yang berada ditingkat menengah pertama 1 Kabupaten Malang. penelitian ini juga diharapkan akan mendapatkan informasi dari objek yang diteliti dengan keadaan yang sesungguhnya.

### 3.6. Metode Pengumpulan Data

Menurut pendapat Iqbal Hasan (2006:13) metode pengumpulan data yaitu kegiatan mencatat akan peristiwa dan fenomena atau keterangan dan hal-hal bisa juga karakteristik pada seluruh atau elemen populasi yang dapat menunjang penelitian ini. Pengumpulan data adalah Langkah utama dilakukan saat melakukan penelitian dikarenakan tujuannya adalah untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui Teknik yang benar saat mengumpulkan data maka sudah pasti penelitian dan hasil datanya tidak dapat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan di bawah standar hasil penelitian tersebut.

Inilah teknik pengumpulan data peneliti ambil saat melakukan penelitian ini dengan cara berikut ini :

#### a) Penelitian Lapangan

Penelitian ini adalah jenis penelitian langsung yang ada di objek penelitian yang diteliti didalam penelitian ini berfokuskan pada anggaran Dana BOS di SMP N 1 Gondanglegi Kabupaten Malang dengan kinerja programnya. Lalu mencari keterangan dan data tentang masalah yang tengah dihadapi. Cara mengumpulkan data dapat digunakan dengan cara dibawah ini:

#### 1) Wawancara yang dilakukan secara mendalam (*in depth interview*)

Wawancara mendalam adalah Teknik yang dipakai agar terjaringlah data primer yang berhubungan pada fokus penelitian. Wawancara mendalam biasanya dilaksanakan dengan cara terstruktur sesuai dengan panduan wawancara. juga melalui wawancara yang bebas dapat dilakukan dengan cara observasi. Instrument yang

dipakai dengan wawancara adalah penggunaan *voice recorder* yang berisikan catatan kecil dari peneliti agar mendapatkan informasi yang berkaitan dengan bahasan dari masalah – masalah yang ada.

## 2) Observasi / Pengamatan

Cara ini dipakai untuk merekam informasi-informasi primer biasanya berbentuk situasi dan peristiwa pada tempat atau lingkungan tertentu pada penelitian yang sedang dilakukan Teknik pengamatan juga dilakukan untuk mengamati segala sesuatu yang terkait dengan fokus pada penelitian. Berikut instrument yang dipakai untuk mencatat hasil catatan dari lapangan adalah sebagai berikut dengan membuat pengamatan atau penelitian dengan langsung terhadap obyek yang sedang diobservasi.

## 3) Dokumentasi

Metode dokumentasi dipakai untuk mencatat atau menyalin dokumen, data yang mendukung penelitian. Bentuk dari dokumen bisa berbentuk arsip penunjang penelitian misalnya: visi misi , tujuan , struktur organisasi , gambaran umum SMP N

1 Gondanglegi. Metode dokumentasi memang berguna karena bisa digunakan tanpa harus mengganggu objek dan kondisi yang sedang diteliti.

### b) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dapat digunakan untuk dapat belajar pada literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sedang ada. Pengumpulan informasi ini diawali dengan mewawancarai narasumber yang sudah dipilih akan orang yang

mengerti penggunaan kebijakan dana dari bantuan untuk digunakan mengoperasikan pada sekolah -sekolah yang ada di Indonesia. Jika peneliti merasa ragu dan kurang pada hasil dari kegiatan wawancara peneliti dapat mendatangi narasumber yang sama agar narasumber bisa mengklarifikasi hasil penelitian. Lalu dapat menggunakan pendekatan triangulasi dengan membandingkan informasi yang didapat dari hasil wawancara.

Apabila hasil wawancara telah sama maka hasil wawancara tersebut telah valid.

Apabila data yang ditemukan menjadi berbeda maka dapat menjadi temuan penelitian atau direduksi. Temuan yang ada dicatat dan dibanding berdasarkan proses untuk memecahkan masalah yang ada. Maka hasil penelitian ini dapat didapatkan mengenai bagaimana sajakah akan pengolahan dan pelaksanaan kebijakan bantuan operasional untuk sekolah, ,lalu bagaimana juga dengan faktor yang mendukung dan menjadi penghambat penggunaan dana BOS di lingkungan SMP 1 Gondanglegi.

### 3.7. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah sebuah proses untuk melakukan pengujian kevalidan terhadap informasi yang didapatkan oleh peneliti saat sedang meneliti dilapangan hal ini bertujuan memeriksa hasil akan penelitian yang sifatnya ilmiah. Penelitian yang ada ini oleh peneliti memakai Teknik keabsahan data melalui metode triangulasi. Winston dalam Bungin (2010) menyatakan akan kasus penelitian memiliki sifat triangulasi. Triangulasi yaitu Teknik dengan tujuan memeriksa keabsahan data dengan melihat manfaat pada yang lainnya. Penelitian yang ada ini sedang menggunakan metode triangulasi untuk mencari sumber datanya.

Saat melakukan uji keabsahan data maka dibutuhkan Teknik untuk

memeriksa. Implementasi Teknik dengan memeriksa dengan melihat tolak ukur dari

beberapa kriteria -kriteria yang ada yang sudah ditetapkan (Moleong. 2016).

Keabsahan data didalam meneliti pada pendekatan kualitatif menurut pandangan

dari Sugiyono (2014: 270) terkait dari :

a) “Uji Credibility (validitas internal)

Pendapat dari Moloeng (2016: 324) “Penggunaan pada kriteria yang ada menggantikan pada konsep-konsep validitas internal akan penelitian non kualitatif. Fungsi kriteria agar menggunakan inkuiri dengan bermacam macam rupa agar tingkat kepercayaan penelitiannya dapat di gapai. Kedua menunjukkan derajat akan kepercayaan pada hasil penelitian dengan cara membuktikan dari penelitian tingkat kepercayaan ganda yang nyata dari apapun hal yang sedang diteliti.”

Berikut pernyataan dari Sugiyono (2014:270) “Uji kredibilitas adalah uji kepercayaan akan informasi terhadap informasi penelitian kualitatif dengan melakukan uji memperpanjang pada observasi, triangulasi, meningkatkan ketekunan saat melakukan penelitian, diskusi analisis masalah yang negative dan *member check*.

1) Perpanjangan pengamatan

Melalui memperpanjang observasi pada penelitian dengan cara Kembali ke lapangan saat melakukan observasi, wawancara sekali lagi dengan berbagai macam sumber informasi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya sehingga dari hubungan penelitian ini Bersama narasumber pastinya membentuk rapport, akan lebih akrab, lebih terbuka, mudah untuk mempercayai dengan itu maka tidak ada lagi yang disembunyikan oleh narasumber akan informasi yang memang sangat dibutuhkan saat melakukan penelitian.

2) Meningkatkan ketekunan

Peneliti sedang melakukan observasi dengan cara lebih tekun secara berkesinambungan. Cara tersebut memastikan informasi dan mengurutkan peristiwa dan dapat terekam dengan pasti juga sistematis. Hasil dari peningkatan ketekunan adalah peneliti mengecek informasi yang sudah didapatkan apakah masih ada keslaahan atau tidak. Maka dari itu peneliti peneliti bisa memberikan informasi yang lebih akurat dan lebih sistematis mengenai hal -hal yang sedang diamati.

3) Triangulasi

Triangulasi adalah system menguji pada kredibilitas data dengan cara mengecek dari berbagai macam sumber informasi dengan bermacam-macam cara dan dari beragam waktu. Sehingga hasil triangulasi dapat dibedakan menjadi sumber, data dan waktu

#### 4) Diskusi dengan teman

Peneliti membuat diskusi Bersama orang lain atau teman yang faham akan informasi -informasi yang dibutuhkan sehingga penelitian akan lebih valid lagi.

#### 5) Analisis kasus negatif

Jika mendapati adanya ketidak sesuaian dengan informasi , maka harus melakukan analisis yang ada hal ini memiliki arti saat memilih data yang temuannya beda dengan hasil temuan dengan itu maka informasi yang sudah di temukan akan dengan mudah dipercaya

#### 6) Menggunakan bahan referensi

Referensi yang dimaksud adalah bahan pendorong untuk melakukan pembuktian informasi yang sudah di temukan penleiti. Contoh informasi hasil wawancara maka memerlukan rekaman wawancara juga.

#### 7) Mengadakan membercheck

Proses mengecek informasi yang didapatkan oleh peneliti kepada narasumber. Jika informasi yang ada sudah di sepakati juga dengan narasumber maka data itu valid. Maka jika data lebih dipercaya semakin baik jika menemukan peneliti dengan bermacam -macam tafsiran belum menyepakati informasi yang ada yang diberikan oleh para pemberi informasi. Jika beberda sangat jauh maka peneliti harus melakukan cara pengubahan pada temuan maka harus di sesuaikan dengan informasi yang dapat di berikan oleh narasumber.

#### b) Transferability (validitas eksternal)

Menurut Moloeng (2016: 324) kriteria yang ada sangat beda pada kevalidan eksternal pada nonkualitatif. Yang dimaksud validitas adalah penrnnyataan general pada penemuan yang dapat diberlakukan atau menerapkan untuk semua konteks yang ada didalam populasi akan dasar penemuan yang juga didapatkan didalam sampel secara representif dengan informasi dan narasumber yang dapat mewakili berbagai macam populasi yang ada

#### c) Dependability (reliabilitas)

Uji ini digunakan untuk memberikan penilaian akan proses pada penelitian kualitatif apakah memiliki mutu yang baik atau sebaliknya, caranya yaitu dengan melakukan pengecekan pada hasil penelitian dengana hati -hati, maka hasilnya keluar akankah peneliti tersebut sedang melakukan kesalahan dalam pelaksanaannya yang sedang melakukan konseptualisasi pada rencana -rencana penelitian, interpretasi data dan melakukan mengumpulkan data.

#### d) Confirmability (obyektifitas)

Obyektifitas digunakan melalui cara Analisa akan hasil-hasil penelitian yang sudah disepakati oleh orang-orang. Penelitian dapat di sebut obyektif jika sudah mendapatkan kesepakatan dari orang banyak dan sudah menyetujuinya.

### 3.8. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu bagian yang amat penting saat melakukan penelitian

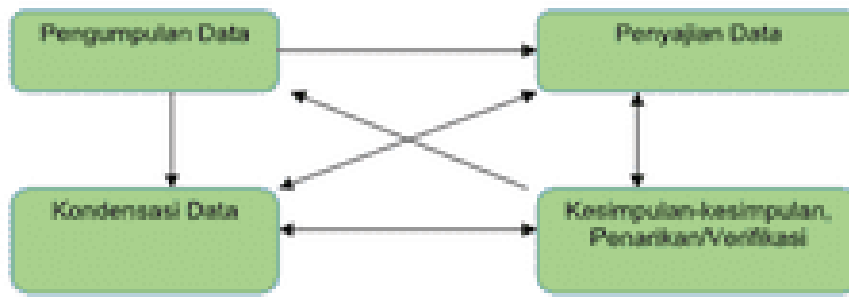


dikarenakan pada tahap ini akan mendapatkan temuan, secara formal atau substantif analisis data ini digunakan agar dapat mengurutkan, mengatur, mendapatkan kode , melakukan pengelompokkan, mengkategorikan sehingga menempatkan suatu temuan yang berfokus pada masalah-masalah yang akan di jawab.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didapatkan informasi dari cara wawancara pada narasumber yang terkait dari berbagai macam pihak yang ada dalam Penggunaan dana Bantuan untuk mengoperasionalkan sekolah ini, juga terkait dengan faktor pendorong dan penghambat dalam sebuah pelaksanaan kebijakan dan program bantuan operasional sekolah yang ada di sekolah tersebut.

Informasi dari wawancara serta sumber referensi dari penelitian ini lalu dianalisis dengan Teknik analisis penelitian kualitatif. Di penelitian ini Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan informasi saat berlangsung maupun selesai kegiatan wawancara dalam proses penelitian.

Berikut pandangan dari Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14), analisis informasi ada 3 tahap yaitu dengan cara kondensasi data, penyajian, penarikan kesimpulan. Kondensasi bertujuan untuk memproses pemilihan, penyederhanaan, pengrucutan, meringkas, dan mentransformasi data. Secara skema kegiatan analisis melalui model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014) bisa di lihat melalui gambar dibawah ini:



**Gambar 4.1:** Komponen Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman  
 Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14)

Agar lebih dirinci inilah langkah-langkah teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang akan digunakan :

a) Kondensasi data (*data condensation*)

Hasil dari pandangan Miles, Huberman dan Saldana (2014: 10), kondensasi merujuk pada kegiatan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, pentransformasian informasi yang didapatkan saat meneliti di lapangan maupun catatan dalam penleitian. Maka hal ini dapat di uraikan dengan cara seperti ini:

1) Pemilihan (*selecting*)

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014: 18) peneliti pastinya harus memiliki cara untuk menyelektif informasi, maksudnya adalah menentukan dimensi yang penting, hubungan dengan yang lebih memiliki makna, oleh karena itu konsekuensinya mencari data yang bisa digunakan untuk analisis dan di dapatkan.

Data -data yang dibutuhkan adalah data yang berkaitan dengan berbagai macam pengolahan akan penggunaan dana yang disebut dengan dana bantuan untuk memperlancar operasional yang ada di sekolah-sekolah. Peneliti sebisa mungkin

harus mengumpulkan data yang banyak terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

## 2) Pengerucutan (*focusing*)

Miles, Huberman dan Saldana (2014: 19) mengutarakan bahwasannya fokus informasi dibentuk praanalisis. Ditahap ini peneliti fokus pada data yang punya hubungan dengan rumusan masalah. Tahap ini adalah tahapan setelah seleksi data.

Peneliti melakukan pembatasan informasi pada rumusan masalah. Fokus rumusan masalah yaitu penggunaan dalam melaksanakan program dana untuk membantu melancarkan segala sesuatu proses di sekolah yang ada di wilayah Gondanglegi di tingkat menengah pertama. Ada pula Rumusan masalah kedua adalah faktor pendukung dalam melaksanakan kegiatan bantuan untuk mengoperasionalkan di sekolah -sekolah yang ada di kabupaten Malang terutama untuk sekolah yang diteliti oleh peneliti. Berikutnya rumusan masalah ketiga faktor penghambat dalam menerapkan penggunaan dana Bantuan untuk pengoperasional sekolah.

## 3) Peringkasan (*abstracting*)

Kegiatan ini adalah untuk merangkum proses, inti pernyataan yang harus ada ditempatnya. Informasi yang sudah didapat di nilai. Khusus pada data yang memiliki kecukupan dan kualitas informasi. Apabila informasi ditunjukkan pada penggunaan dan pengelolaan akan dana yang sudah diterima pihak sekolah dari pemerintah yang biasa disebut dana untuk mengoperasionalkan berbagai macam kegiatan di sekolah-sekolah. dirasa baik dan data sudah cukup maka data dapat dijadikan menjawab masalah -masalah pada penelitian yang ada.

4) Penyederhanaan (*simplifying*) dan Transformasi data (*transforming*)

Penelitian ini lalu dilakukan penyederhanaan dan pentransformasian dengan semua cara-cara yang ada. Pertama melalui seleksi yang sangat kuat , dengan rangkuman atau pernyataan , penggolongan informasi didalam sebuah penelitian dengan pola yang sangat luas, agar penelitian sederhana maka peneliti mencari informasi pada setiap konteks yang ada didalam table pada alur social dan prosesnya.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Miles dan Huberman melakukan pembatasan pada sajian kumpulan data yang tersusun untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan maka mendapatkan kesimpulan dan dapat mencari Tindakan yang tepat. Keyakinan akan penyajian yang sangat baik saat menata informasi merupakan Analisa kualitatif.dapat berbentuk grafik, bagan, matrik, jaringan. Semuanya digunakan dikarenakan untuk melakukan akan penggabungan data dalam suatu bentuk yang sudah dapat di dapatkan. Maka dari itu mereka dengan mudah dapat menarik kesimpulan apakah sudah benar dan sesuai atukah menurut pada hasil kesimpulan yang berupa saran yang sudah disajikan mungkin juga berguna. Peneliti melakukan penyajian informasi dengan tabel ,singkat dan melakukan penggambaran akan pengolahan penggunaan dana Bantuan untuk mengoperasionalkan sekolah. Informasi yang disajikan dapat berbentuk bagan dan tabel yang menggambarkan akan pengolahan dana terkait dengan kebijakan penggunaan pada bantuan untuk pengoperasionalan sekolah - sekolah yang ada di Indonesia. perancangannya dengan digabungkan pada data dengan susunan yang mudah dipahami dan padu.

c) Kesimpulan, Penarikan/Verifikasi (Conclusion, *drawing/verification*)

Menurut Miles dan Huberman penarikan kesimpulan adalah suatu bentuk dari konfigurasi utuh. Kesimpulan yang ada lalu diverifikasi saat penelitian tengah berjalan

Verifikasi adalah keadaan memikirkan yang kemudian terlintas dari pemikiran peneliti Ketika ia tengah menulis. Juga melakukan tinjauan untuk informasi pada data lapangan. Dapat juga dilakukan dengan sangat seksama serta membutuhkan tenaga untuk meninjau Kembali dan bertukar fikiran dengan teman yang lain. Agar lebih berkembang kesepakatan antar sesama atau mengupayakan untuk menentukan tempat dari temuan ke dalam informasi yang lainnya. Makna yang muncul artinya harus diuji kebenaran data tersebut, kecocokan dan kekokohan yang berkaitan dengan kevalidan kesimpulannya tidak pada proses mengumpulkan informasi saja tetapi melakukan verifikasi data agar data dapat mendapatkan tanggung jawab dari asal data yang sudah diperoleh.

Lalu peneliti melakukan penarikan kesimpulan informasi yang sehubungan dan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah ada. Informasi di deskripsikan lalu ditarik kesimpulannya dengan cara yang umum. Unsur dari simpulan merupakan cara untuk melaksanakan dan mengelola dari berbagai macam program yang dibuat oleh pemerintah yaitu terkait untuk mensejahterakan Pendidikan yaitu dana untuk membantu mengoperasionalkan sekolah yang ada. selanjutnya Analisa informasi ke dua kalinya dengan melihat secara keseluruhan dari awal sampai akhir hingga informasi yang diterima kompleks dan sempurna serta dapat dipertanggungjawabkan

## BAB IV

### ANALISIS LATAR SOSIAL PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang

Pada lambang dari kabupaten Malang memang mempunyai maksud sendiri yang bisa menjadikan ciri khas kabupaten Malang. Maksud dari lambang tersebut adalah setiap warga mempunyai jiwa nasionalisme terhadap bangsanya dan kedaulatan negaranya dengan sikap berani dan suci sikap tersebut digunakan untuk mengerjakan berbagai macam kepentingan khalayak umum dan berlandaskan Pancasila selama ini. Gambar falsafah Pancasila ini dapat dilihat dari perisai yang berbentuk segi lima dan memiliki garis tepi dengan tebal nya yang berwarna merah putih. Gambar papan untuk kehidupan jasmani dan rohani di wilayah -wilayah kabupaten Malang. Gambar tersebut bermaksudkan wilayah yang ada dikabupaten malang ditandai kemakmuran serta tempat yang indah dan subur dengan adanya symbol dari gambar kubar yang didalamnya berwarna kuning.

Tentu saja warna tersebut tidak saja untuk menunjukkan hal tersebut. Melainkan juga menunjukkan bahwa falsafah Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa digambarkan dengan beberapa gambar dari padi yang berwarna emas serta terdapat kapas yang memiliki warna hijau beserta bunganya berwarna putih keduanya ini memiliki arti semangat untuk pejuang agar masyarakat memiliki semangat seperti yang dicontohkan oleh para pahlawan 17 Agustus 1945. 17 agustus digambarkan dengan adanya daun kapas yang berjumlah sama. Lalu bunga kapas

yang memiliki delapan bentuk. Gelombang laut yang mempunyai 45 simbol. Pada lambang dan logo yang ada didalam kabupaten Malang memang memiliki makna tersendiri dari masing-masing gambarnya. Misalnya, gunung yang memiliki warna hijau tentunya memberikan gambaran akan potensi alam di kabupaten malang. Rantai yang memiliki warna kuning maksudnya adalah memberikan gambaran keadilan dan persatuan. Laut digambarkan dengan maksud memiliki kekayaan alam di sebuah wilayah itu sendiri yaitu diwilayah kabupaten Malang. Sedangkan asap dengan warna putih memberikan arti terjemahan yaitu semangat yang dimiliki oleh masyarakatnya yang tidak akan padam dan keris yang memiliki warna putih dan hitam dimaksudkan dengan memberikan gambaran megahnya sejarah terbentuknya kabupaten malan ini dan jiwa -jiwa akan kepatriotannya. Warna logo kabupaten malang yang berwarna biru tua ini bermaksudkan memberikan cerminan tentang cita-cita abadi serta tidak akan padam. Sedangkan buku berwarna putih berarti tergambarkan cara peningkatan mengenai kecerdasan yang dimiliki masyarakat agar lebih maju dari sebelumnya. Terakhir arti dari sesanti satata ga karta raharja adalah penggambaran masyarakat yang Makmur, adil, baik spiritual nya maupun materiilnya dengan kesucian yang dimilikinya serta sifat tersebut abadi.

#### 4.1.2 Visi - Misi Kabupaten Malang

##### a. Visi

“Agar kabupaten Malang istiqomah serta mempunyai mental pekerja keras agar tercapai pembangunan yang semakin maju dan bermanfaat secara nyata bagi rakyat pedesaan “Kabupaten Malang memiliki visi yang memang sangat unik untuk

dilaksanakan pada tahun berikutnya yaitu dengan istilah MADEP-MANTEB-MANETEP, cara menggunakan filosofi -filosofi pembangunan ini tidak hanya dikarenakan memiliki sejarah historis yang baik namun juga ada pada kebudayaan nusantara. Maka dari itu, istilah-istilah diatas memiliki ketersangkut pautan satu sama lain yang memang tidak akan bisa dipisah.

#### b.Misi

- 1) Pemantapan akan kesadaran dan berbagai macam partisipasi untuk melakukan pembangunan agar menunjang adanya revolusi mental itu sendiri yang terkait dengan budaya lokal, supremasi hukum dan keagamaan yang ada.
- 2) Adanya perluasan inovasi dan cara untuk mereformasikan birokrasi dan tata kelolaan pemerintah yang bersifat efektif, akuntabel dan bersih serta tidak melupakan demokrasi yang bersifat teknologi informasi.
- 3) Melakukan berbagai macam pembangunan di bidang kesehatan, ekonomi dan Pendidikan untuk percepatannya. Agar terjadi peningkatan pembangunan manusia di wilayah kabupaten Malang
- 4) Melakukan pengembangan ekonomi yang bersifat dari industri kreatif, pariwisata dan pertanian.
- 5) Memberikan kecepatan lebih cepat dalam membangun desa dengan kekuatan Lembaga untuk meningkatkan sumber daya manusia, juga memberikan pelatihan pada desa -desa yang ada agar mampu menciptakan produk yang unggul disetiap desanya sehingga tercipta perekonomian yang lebih baik.
- 6) Pemerintah wajib mengadakan infrastruktur jalan, telematika, sumber daya air, pemukiman yang bersih dan lain sebagainya sebagai sarana -prasarana penunjang



kebutuhan masyarakat di wilayah ini.

- 7) Memberikan Latihan -latihan agar masyarakat mengerti tentang aturan untuk melakukan penjagaan alam dan memiliki perilaku yang menjaga alam yang ada di sebuah wilayah sehingga tercipta pola perilaku yang menerapkan sebaik mungkin dalam menjaga lingkungan hidup tersebut.

#### 4.1.3 Latar belakang demografis kabupaten Malang

Wilayah kabupaten Di Malang ini merupakan wilayah terbesar ketiga di pulau Jawa, jumlah total kecamatan ada 33 dengan banyak 378 desa dan 12 kelurahan yang amat besar. Luas tanah diperkirakan 353.486 Ha. Dengan pekerjaan penduduk yang mayoritas masih menjadi seorang petani membuat lokasi ini asri dan memiliki hawa yang sejuk. Pengaruh dari keadaan penduduk ini langsung berkaitan dengan masyarakat yang ada. Peran-peran penduduk saat membangun wilayah berhubungan dengan tempat tinggal mereka. Definisi dari karakter sosial adalah penduduk mempunyai karakter masing-masing yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Penduduk terbesar di wilayah ini berada di Lawang sebanyak 152.650 data ini pada tahun 2015. Kabupaten Malang menjadi kabupaten dengan luas kedua menempati urutan dibelakang Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Malang juga menjadi urutan ke dua yang memiliki jumlah populasi yang sangat besar dibandingkan populasi kabupaten lainnya. Koordinatnya adalah sebagai Berikut ini adalah beberapa koordinat dari Kabupaten Malang yaitu 112o57', 00,00" sampai dengan Bujur Timur 112o17', 10,90" serta 8o26', 35,4" sampai dengan 7o44', 55,11" dan Lintang Selatan. Kabupaten Malang menjadi kabupaten terbesar ketiga di Jawa dengan urutan ketiga kabupaten pertama yang wilayahnya sangat luas adalah kabupaten

Banyuwangi setelah itu disusul dengan kabupaten Sukabumi dan Barulah Kabupaten

Malang yang menjadi dan menempati urutan ketiga se pulau Jawa. Kabupaten

Malang memiliki ibukota di panjen. Kepanjen berbatasan dengan Batu dan

kabupaten Jombang. Kota batu ini berada di utara dari kabupaten lumajang dan

berbatasan dengan utara dari kabupaten probolinggo. Dari timur berada pada

Samudra Hindia. Di bagian selatan terdiri dari kabupaten Blitar dan pada arah barat

berbatasan langsung dengan kabupaten Kediri.

Corak wilayah kabupaten Malang adalah pegunungan. Topografi kabupaten

Malang adalah pegunungan dan dataran. Dengan kira-kira 250-500 meter diatas laut.

Ada juga daerah dengan perbukitan kapur di kabupaten Malang dengan ketinggian

0-650. Ada juga daerah di semeru-tengger pada bagian -bagian timur yang

membujur utara -selatan dengan ketinggian 500-3.600 meter. Lalu pada lereng

Arjuno – Kawi pada bagian barat berkisar di ketinggian 500-3300 meter. Pembagian

adminsitrastif terdiri dari 33 kecamatan dan dibagi lagi dengan beberapa desa dan

kelurahan. Dengan pusat pemerintahan di daerah Kepanjen.

Dulu tahun 2008 sempat pusat pemerintahannya berada di wilayah kota

Malang namun sekarang telah digantikan menjadi di Kepanjen. Dahulu sebelum

tahun 2001 Batu sempat menjadi wilayah kabupaten Malang. Namun sekarang

sudah ditetapkan memiliki otonom sendiri. Kabupaten Malang berada di sisi tengah

Jawa Timur. Langsung berbatasan pada 6 kabupaten dan Samudra. Sebelah timur-

utara kabupaten Malang berbatasan dengan Probolinggo dan Pasuruan. Berikut ini

batas persebelahan Kabupaten Malang diantaranya di sebelah selatan berbatasan

dengan Samudra Indonesia dan di sebelah timur secara langsung berhadapan

dengan batas dari daerah Lumajang. Dengan adanya jalur yang menggabungkan kabupaten Malang dengan lokasi-lokasi strategisnya maka, jalur transportasi kearah selatan dari waktu ke waktu semakin marak dan membutuhkan kabupaten Malang dikarenakan lokasinya yang sangat strategis. Berikut beberapa letak dari Kabupatennya dengan memiliki posisi koordinat antaranya adalah 112o57',00,00" "Timur dan 112o17',10,90" Timur - 7o44',55,11" Bujur Lintang Selatan dan 8o26' ,35,45" Lintang Selatan. luas wilayah diperkirakan mencapai 3.238,26. Di Kabupaten Malang terdapat gunung yang diakui dan masih aktif serta pegunungan kapur yaitu pegunungan kendang perbukitan kapur.

Berbagai macam gunung-gunung yang ada di wilayah Kabupaten Malang ini antara lain Gunung Kawi, gunung Bromo, gunung Welirang , gunung Kelud. Dengan adanya gunung-gunung yang sangat banyak tersebut mengindikasikan banyaknya juga hutan-hutan yang masih asri setelah itu dengan adanya hutan yang menyimpan cadangan air maka hutan tersebut dialiri sungai -sungai yang banyak. Wilayah kabupaten Malang memiliki 18 anak sungai salah satunya adalah sungai Brantas yang memang menjadi sungai terpanjang di Jawa Timur. Hulunya yang berada di tempat atas berada di bagian kota Batu sedangkan hulu di bagian bawah berada di Kabupaten Malang. Di Tahun 2015 suhu udaranya berada pada 17 sampai 27,6 o C. Kelembaban udara di wilayah Kabupaten Malang juga berada di antara 9 hingga 99. Curah hujan berada diantara 15,3 sampai 485 mm. dengan curah hujan tinggi berada di bulan April sedangkan curah hujan yang rendah berada di antara bulan Juli hingga Oktober.

#### 4.1.4 Latar belakang Pemerintahan Kabupaten Malang

Bawahan dari administrasi kabupaten Malang ialah beberapa kecamatan. Di setiap beberapa kecamatan ini terdapat berbagai macam desa atau kelurahan. Di setiap kelurahan atau desa membawahi beberapa Rukun tetangga dan rukun warga. Setelah dirinci Rt dan Rw di 33 kecamatan dan 378 desa ada 3035 Rukun warga dan 13906 Rukun Tetangga. Pemerintahan yang melancarkan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian terhadap ekonomi pengembangan masyarakat. Indikasi dari tercapainya kemajuan pembangunan dapat dilihat dari pengembangan desa itu sendiri. Tak kalah penting peran serta aktif masyarakat dalam membangun desa merupakan salah satu cara mengembangkan desa secara lebih mandiri lagi. Sehingga bisa mengorganisasikan peran masyarakat sebesar-besarnya.

Pembangunan desa yang berhasil tidak hanya harus membangun sumber daya manusia namun juga pelaku-pelaku pengembang sumber daya manusia dalam menentukan target atau sasaran harus tepat. Tolak ukur kepala desa dinilai dengan Pendidikan yang dienyamnya berikut daftar Pendidikan kepala desa yang bertamatkan Sekolah menengah pertama sekitar 13,24 persen sekolah menengah atas sebesar 56,76 persen dan universitas sebesar 26,49 persen. Pemerintah kabupaten Malang dalam memberikan dan mendorong angka dari tingkatan dan suksesnya pengembangan akan kualitas para sumber daya terutama pemanfaatan sumber daya yaitu manusianya yang harus lebih baik dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilakukan dengan jalan membuat Pendidikan -pendidikan nonformal dan formal. Aspirasi masyarakat juga telah ditampung melalui partai politik yang ada di Kabupaten Malang. Jumlah banyaknya penduduk di kabupaten Malang pada tahun 2015 sekitar

2.544.315 yang terdiri dari perempuan 1.265.804 dan laki-laki 1.278.511.

Sesuai dengan komposisi yang ada pada masyarakat umur mereka warga kabupaten Malang termasuk kelompok Intermediate dengan rincian seperti ini Bagi masyarakat yang memiliki kehidupan masih pada tahapan anak -anak kiranya di umur 0 hingga 14 tahun sebesar 24,07% masih berada di tingkat rendah yaitu dibawah 30%. Sedangkan untuk tingkat umur yang tua sekitar 7,80% rata-ratanya. Umur tua ini sekitar berada di antara umur 65 tahun keatas (juga dibawah 10 persen). Apabila dilihat dari umur median yaitu umur yang membagi umur penduduk menjadi dua yaitu yang berjumlah sebagai berikut pastinya sesuai dengan gambaran angka pada warga di Kabupaten Malang dengan golongan tua sekitar umur dengan mencakup median sebagai berikut sekitar 30-34 tahun. Sedangkan yang berada pada umur diantara 20 hingga 30 tahunan dan rentang umur dibawah 20 tahun dengan usia yang lebih produktif yaitu umur mulai dari 15 tahun hingga 64 sangat mendominasi yaitu sekitar 68.12% lebih dari separuh mendominasi kehidupan di Kabupaten Malang.

Di sisi lain pemerintah kabupaten Malang dalam melaksanakan program sekolah gratis masih sangat bergantung pada dana APBN (pusat) dan belum tersedianya dana pendamping APBD secara memadai. Di bidang pendidikan, kabupaten Malang masih menghadapi tingkat kerusakan dan keterbatasan sarana prasarana yang cukup tinggi. Selain sarana dan prasarana, gambaran tingkat mutu pendidikan kabupaten Bogor antara lain dapat dilihat dari hasil pencapaian nilai rerata UN pada tahun 2008/2009 yang mencapai 62,5. Rerata tersebut jauh di bawah rerata nasional yang mencapai 73,6. Gambaran ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten Malang perlu upaya lebih keras lagi untuk meningkatkan mutu

pendidikan, tentunya yang terjangkau oleh masyarakat

## 4.2 Gambaran umum Kecamatan Gondanglegi

### 4.2.1 Sejarah Kecamatan Gondanglegi

Mbah sogol merupakan seseorang yang sangat berjasa di Gondanglegi . sebab karena adanya beliau Gondanglegi ditemukan. Maksud dari ditemukan disini adalah Gondanglegi merupakan mbah Sogol yang pertama kali melakukan pembabatan alas diwilayah tersebut. Bahkan saking kuatnya istilah tersebut banyak warga Gondanglegi yang mempercayai pemberian nama Gondanglegi adalah dari mbah Sogol itu sendiri. Arti dari Gondanglegi adalah diambil dari makna buah yang pahit yaitu buah Gondang namun menurut mbah Sogol Gondang tersebut rasanya manis. Jadilah nama Gondang tersebut diwilayah tersebut. Dan dipakai nama daerah tersebut sampai sekarang. Tidak lama kemudian mbah Sogol menghembuskan nafas terakhirnya di Gondanglegi makam mbah Sogol yang pertama kali berada di Lokasi pasar di tahaun 1965 Ketika terjadi kebakaran semua toko terbakar namun anehnya makam Mbah Sogol itu tetap berdiri dengan baik dan tetap utuh. Dan terjadi lagi kebakaran di Gondanglegi di tahun 1972 namun lagi-lagi makam mbah Sogol masih utuh. Pemakaman tetap dibangun lagi pasca kebakaran hal tersebut terjadi ditahun 1974.

Setelah terjadi pembangunan pasar Kembali di wilayah yang terbakar muncullah suatu gagasan untuk memindah makam mbah Sogol. Setelah dilakukan pemikiran yang amat Panjang mengenai pemindahan makam tersebut maka, dilakukan pemindahan di hari jumat legi pada tahun itu juga yaitu tahun 1974.

Pemindahan makam tersebut terjadi di pemakaman umum yang berada di gondanglegi wetan. Banyak warga Gondanglegi yang mempercayai bahwa mbah Sogol adalah orang yang sakti dan legendris. Serta sampai saat ini pemakaman beliau masih sering dikunjungi oleh banyak orang bahkan dari luar daerah untuk mendoakan arwah mbah Sogol tersebut.

#### 4.2.2 Kondisi geografi Gondanglegi

Gondanglegi adalah sebuah kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Malang. Gondanglegi adalah salah satu kecamatan ke 33 dari kabupaten Malang. Letaknya pun sangat strategis yaitu membentang di wilayah selatan Kepanjen dan akses untuk ke tempat wisata seperti kondang merak, pantai balekambang. Berikut adalah Batasan - batasan Gondanglegi:

- a. Bagian utara: ada disebelah kecamatan Bululawang
- b. Bagian Timur: berada di sebelah Kecamatan Turen
- c. Bagian Selatan: Sebelahan dengan Kecamatan Pagelaran
- d. Bagian Barat : Berada di sebelah Kecamatan Kepanjen

Gondanglegi Merupakan wilayah yang ada di permukaan tanah yang datar hampir 100 % dengan luas wilayah termasuk wilayah Kepanjen. Garis koordinat 112O35'59" hingga 112O 39'73" Timur, 8O10'82" hingga 8O 07'26" Lintang Selatan. Selama ini Gondanglegi memiliki luas wilayah sekitar 6.584,44 hektar dari keseluruhan wilayah yang ada di kabupaten Malang ini.

Dengan adanya wilayah dataran yang sangat luas maka, wilayah gondanglegi ini cocok dijadikan transit untuk melalui perjalanan di jalur Blitar dan Kediri. Saat

melakukan perjalanan ini masyarakat pun dapat menikmati fasilitas-fasilitas misalnya makanan khas Gondanglegi dan tempat tujuan pariwisata. Masih sering ditemukan kekayaan alam di daerah kecamatan Gondanglegi yang belum terekplorasi dengan baik. Sekiranya dapat dieksplorasi lebih baik tentunya dapat menambahkan pertumbuhan perekonomian masyarakat didaerah tersebut.

#### 4.2.3 Kondisi Demografi

Di tahun 2016 Gondanglegi ini sudah terbagi menjadi 14 desa dan 383 Rukun tetangga serta 59 Rukun warga. Sedangkan pembagian dusun di wilayah Gondanglegi ini ada 4 dusun. Urutan dari terbanyak hingga terkecil dusun yang memiliki Rukun tetangga yaitu : Desa sepanjang dengan 4 Rukun Warga dan 59 Rukun tetangga, Lalu Gondanglegi kulon sebanyak 4 rukun warga dan 44 Rukun tetangga, Gondanglegi wetan 9 Rukun warga dan 39 Rukun Tetangga, Ketawang 4 Rukun warga dan 33 Rukun Tetangga, Ganjaran 4 Rukun warga dan 38 Rukun tetangga, Putat Lor 5 Rukun tetangga dan 26 Rukun warga. Sisanya selain itu ada di desa panggungrejo, bulupitu, sumber jaya, sukosari dn dusun putukrejo.

##### 1. Luas Wilayah

Dari segi administratif Gondanglegi mempunyai jumlah wilayah sebesar 6.584.44 Ha. Berikut rinciannya:

- a) Ladang tegalan sekitar: 1.648,26
- b) Pemukiman sekitar: 1940,58
- c) Sawah: 2,995.60

##### 2. Dari segi administrasi

Inilah administrasi kecamatan Gondanglegi ditahun 2010 adalah sebagai berikut:



a) Total kepala keluarga yang ada: 21.929

b) Kepadatan masyarakat: 873,5 Jiwa

#### 4.2.4 Visi-misi Kecamatan Gondanglegi

Visi dari Gondanglegi adalah menjadi warga yang madep manteb manetep. Dengan kompetensi masyarakatnya yang agamis, mandiri, professional, demokratis, maju, tertib, aman dan berdaya saing. Visi Gondanglegi adalah Meningkatkan kesejahteraan warga dari tercapainya gondanglegi sebagai tempat penyangga kabupaten Malang.

Misi:

Misi dari kecamatan Gondanglegi adalah menyemangati masyarakat sehingga masyarakat terdorong dan sadar untuk ikut berpartisipasi disegala bidang misalnya bidang pemerintahan dan pembangunan. Agar nantinya masyarakat gondanglegi dapat menjalankan dan menguasai kekayaan potensi alam yang ada.

Berikut Misi dari kecamatan Gondanglegi :

1. Menjadikan masyarakat yang beriman dan bertakwa pada tuhan
2. Menyadarkan masyarakat akan hukum
3. Membentuk pola akan kuatnya memproduksi dan mengatasi masalah terkait sumber daya manusia
4. Memberikan peningkatan Kerjasama dan kesejahteraan dengan sesama desa dilingkup Kecamatan Gondanglegi
5. Memberikan pemerintahan yang transparansi bertanggung jawab terhadap

masyarakat

6. Selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik

7. Memberikan budaya demokratis di lingkup warga

8. Memberikan peran serta aktif tokoh masyarakat dalam pembangunan di kecamatan Gondanglegi

#### 4.3 Gambaran Umum SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang

Cerita dari keadaan awal mula pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri

1 Gondanglegi diawali oleh kepala desa yang bernama Haji Umar Sidiq untuk memajukan desa. Sehingga desa Ketawang memiliki sekolah dari SD , SMP , SMA itu semua bertujuan untuk memajukan desa. Keinginan tersebut ada dikarenakan beliau memiliki kesadaran akan pentingnya ilmu pendidikan untuk masyarakat sekitar. Beliau sudah melihat hal itu dikarenakan faktor intern beliau yang melihat

Mirisnya masyarakat yang tidak bersekolah dan bekerja malah memilih untuk melanjutkan kehidupan untuk menikah dan memilih untuk bekerja apa adanya saja daripada bersekolah. Lalu ditahun 1984 bupati Malang membuat sebuah acara untuk melakukan pertemuan Bersama kepala desa yang menjabat di semua daerah di kabupaten Malang. Bupati lalu memberikan penawaran pada semua kepala desa di banyak tempat tidak terkecuali di kabupaten Malang untuk menjadikan tanah Bangkok miliknya dijadikan sebuah sekolah. Lalu langsung saja Bapak Haji Umar Sidiq menerima tawaran yang ada untuk nantinya tanah miliknya dijadikan sekolah.

Pembangunan kala itu dilakukan pada awal 1984 dengan hanya ada tiga kelas saja

kelas 1,2,3 dengan banyak guru hanya berjumlah 16 orang dan 4 karyawan. Sampai tahun ini tahun 2021 mengalami perkembangan sekolah tersebut mengalami 9 pergantian kepala sekolah dan sudah memiliki 24 kelas.

Sekolah ini berada di jalan raya Ketawang nomor 4 dari waktu ke waktu hingga saat ini sekolah ini telah mengalami banyak perubahan dana perkembangan.

Pada berjalannya waktu meningkat pula berbagai macam kebutuhan sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut tidak hanya beberapa sarana dan prasarana namun juga banyak lagi kualitas yang meningkat dengan sistem untuk memajukan sekolah tersebut hingga jadi seperti saat ini. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gondanglegi telah mendapatkan akreditasi A di tahun 2017 175/BAP-S/M/SK/X/2015. Saat ini sekolah ini telah mempunyai banyak sekali sarana prasarana yang mendukung dan memadahi misalnya laboratorium Bahasa Inggris, Ruang Perustakaan, Laboratorium kimia, fisika , biologi, Ruang keterampilan tata boga , tata usaha, ruang komputer, Ruang tata usaha, multimedia, UKS, ruang bimbingan konseling, Ruang koperasi , Ruang UKS, ruang pembelajaran, dan kantin sekolah. Jumlah kelas terdapat 23 ruang. Saat ini sudah ada 15 karyawan dan 43 guru untuk mengajar peserta didik disekolah tersebut

### **4.3 Visi, Misi dan Tujuan SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang**

#### **4.3.1 Visi -Misi SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang**

##### **1. Visi SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang**

Visi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang yaitu menjadi sebuah satuan Pendidikan atau Lembaga yang memiliki nilai berkebangsaan,

berprestasi dan memiliki pengetahuan akan wawasan lingkungan didalam sekolah dan diluar sekolah.

## 2. Misi SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang

### Misi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang

yaitu:

- a. Mewujudkan Pendidikan yang berkarakter dan berwawasan lingkungan serta berbasis untuk mengembangkan kurikulum.
- b. Mewujudkan pembelajaran yang kreatif, aktif, inovatif dan menyenangkan.
- c. Mewujudkan sistem penilaian menyeluruh dan valid
- d. Mewujudkan supervisi akademik dan non akademik untuk administrasi Pendidikan
- e. Mewujudkan penilaian yang valid
- f. Mewujudkan lulusan dengan memiliki daya saing, beriman , cerdas , bertaqwa.
- g. Mewujudkan pembinaan siswa agar memiliki karakter , prestasi dan berwawasan lingkungan.
- h. Mewujudkan peningkatan SDM agar berkualitas Ketika berada dilingkungan sekolah dan tidak.
- i. Mewujudkan tersedianya sarana dan prasarana untuk kemajuan teknologi peserta didik.
- j. Mewujudkan manajemen Pendidikan yang Tangguh dan tanggap agar teroptimalisasi partisipasi masyarakat
- k. Mewujudkan peningkatan peran dari berbagai macam serta partisipasi misalnya kemitraan, masyarakat dan stakeholder.

1. Mewujudkan lingkungan Bersih, Rindang, Hijau, Indah, Aman dan Sejuk

(BERHIAS).

3. Tujuan SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang

a. Unggul dalam Pendidikan yang berkarakter dan berwawasan lingkungan serta berbasis untuk mengembangkan kurikulum.

b. Unggul dalam pembelajaran yang kreatif, aktif, inovatif dan menyenangkan

c. Unggul dalam sistem penilaian menyeluruh dan valid

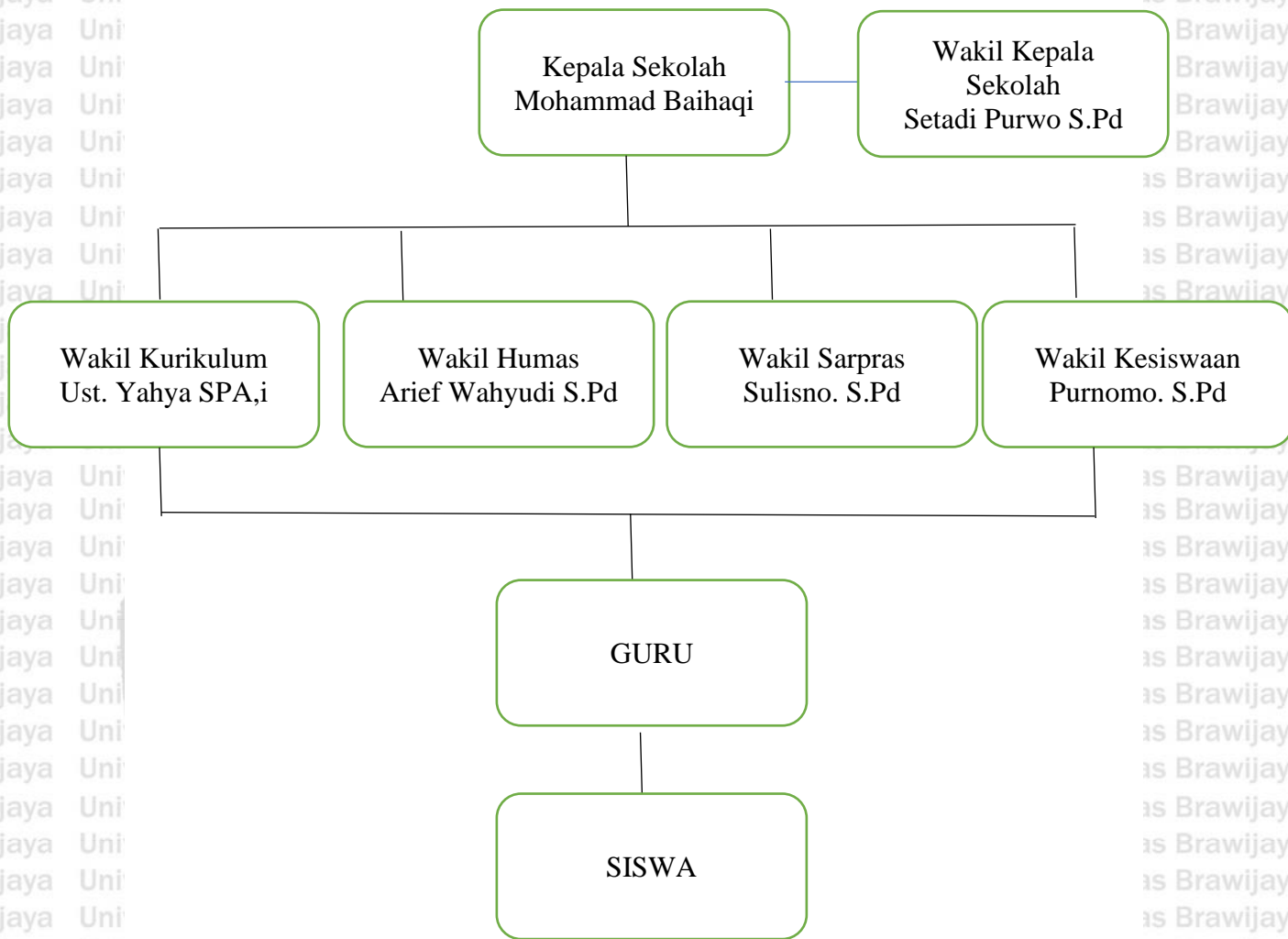
d. Unggul dalam supervisi akademik dan non akademik untuk administrasi Pendidikan

e. Unggul dalam penilaian yang valid

f. Unggul dalam lulusan dengan memiliki daya saing, beriman , cerdas , bertaqwa

g. Unggul dalam pembinaan siswa agar memiliki karakter , prestasi dan berwawasan lingkungan.

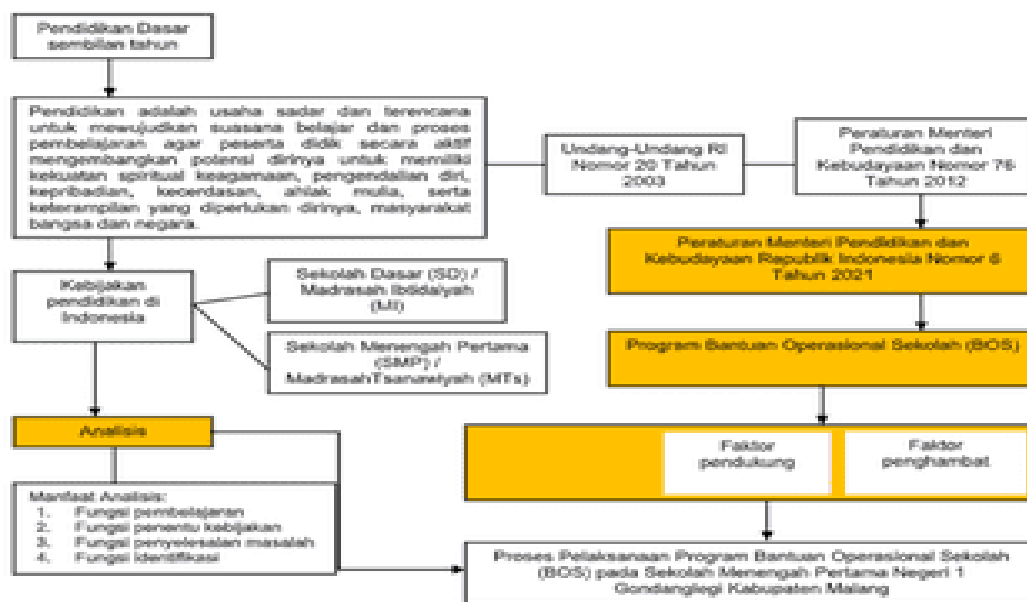
h. Unggul dalam Mewujudkan peningkatan SDM agar berkualitas Ketika berada dilingkungan sekolah dan tidak.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi

#### 4.4 Kerangka pikir

Berikut ini adalah gambar mengenai kerangka konseptual penelitian yang dibuat penulis untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis permasalahan secara tahap demi tahap.



Gambar 4.3 Alur Kerangka Pikir

Berpijak pada Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Terkait kewajiban belajar 9 tahun maka teretuslah peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 terkait BOS ( Bantuan Operasional Sekolah ) yang semestinya dipergunakan sebagaimana mana mestinya, melalui analisis fungsi pembelajaran, fungsi penentu kebijakan, fungsi penyelesaian masalah serta fungsi identifikasi program BOS dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Adapun output yang di hasilkan dari penelitian ini yaitu :

Penelitian ini akan melihat faktor pendukung dan penghambat dalam

implementasi pelaksanaan dana BOS serta penelitian ini akan menganalisis Pengimplementasian dana BOS ini jika dilihat dengan menggunakan sudut lainnya maka implementasinya yaitu sumber dayanya. Sesuai dengan yang sudah di katakana didalam kajian literatur yang ada penelitian ini menggunakan teori dari Edward Geoge III pada tahun 1980 mengindikasikan aspek-aspek yang dapat dipengaruhi oleh implementasi antara lain faktor Komunikasi, disposisi , sumber dan birokrasi, keempat faktor ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan akan keberhasilan suatu kebijakan, Hal ini dilakukan untuk mencari pemahaman dan seberapa besar peran dari setiap proses pengimplementasian. Hal ini juga dapat menimbulkan suatu peran lebih dari adanya implementasi yang ada. Bisa di kaitkan akan memunculkan aspek -aspek lain yang dapat memberikan pengaruh pada implementasi dana BOS direalita yang ada, apabila terjadi sesuatu yang dinyatakan tidak sesuai dengan realita antara teorinya dengan pelaksanaan maka tidak perlu ditolak hanya saja bisa dilakukan untuk merevisi teori agar lebih sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. HASIL PENELITIAN

##### 5.1.1. IMPLEMENTASI PELAKSANAAN DANA BOS PUSAT

Pendidikan memiliki sebuah aturan yaitu pengaturan kebijakan yang ada didalam Pendidikan menurut Nugroho (2008:36) dapat diartikan menjadi sebuah perkumpulan dari hukum-hukum dan aturan yang menjadi pengatur pada penggunaan setiap sistem yang ada didalam Pendidikan melingkupi tujuan pada isi Pendidikan serta strategi untuk mencapai tujuan yang hendak di raih. Hal ini sesuai dengan perkataan yang diucapkan Olsen dan Codd dalam (Nugroho 2008:36) maksud dari kebijakan adalah suatu kunci untuk unggulnya suatu sistem bahkan juga termasuk eksisten untuk setiap negara dalam melangsungkan persaingan global yang membuat kebijakan dari Pendidikan itu sendiri harus dijadikan prioritas utama disaat dunia sedang mengalami globalisasi seperti saat ini. Maka dari itu, dapat dijadikan simpulan bahwa landasan dari kebijakan yang ada didalam Pendidikan menjadi suatu konsep hukum yang dapat dijadikan dasar untuk membuat dan menetapkan aturan didalam Pendidikan. Supaya tercipta kehidupan yang selaras dengan kondisi dan situasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dunia Pendidikan.

Berikut pendapat dari Solihin Abdul Wahab (2005:59) yang dimaksud dari implementasi yaitu berupa kebijakan untuk memproses pada kebijakan publik yang mengacu dan menyelaraskan dari proses implementasi kebijakan Pendidikan.

Didalam sebuah prakteknya pelaksanaan implementasi dapat diartikan sebuah kebijakan yang berisikan proses yang terkait dan sangat kompleks dapat juga berisikan politis bila dicampuri oleh berbagai macam kepentingan. Pengimplementasian kebijakan tidak hanya terkait dengan strategi yang menjabarkan keputusan politik. Untuk mengarahkannya kedalam prosedur yang dapat digunakan pada saluran birokrat. Namun lebih dari hal itu dapat terkait untuk menyelesaikan masalah konflik bahkan keputusan yang terdiri dari siapa saja yang berhak mendapatkan dari adanya penggunaan kebijakan ini.

Dana Bantuan operasional sekolah merupakan suatu program dari pemerintah yang mengurus untuk menyediakan dana bagi pembiayaan untuk mendanai non personalia untuk sekolah dan wajib melaksanakan program wajib belajar. Terkait Peraturan pemerintah No 48 tahun 2008 yang membahas masalah mengelola dana Pendidikan. Terkait pada biaya bukan untuk personalia biaya yang mengatur tentang peralatan dan biaya dari Pendidikan untuk mendanai bahan habis pakai. Serta biaya tidak langsung misalnya jasa air, telekomunikasi , uang lembur, sarana prasarana, konsumsi, transportasi dan pajak. Tapi terdapat beberapa pembiayaan yang dapat dilakukan oleh dana ini misalnya membiayai investasi serta personalia yang dapat digunakan untuk membiayai dana tersebut. Arti dana BOS bagi masyarakat umum adalah memberikan keringanan untuk menyekolahkan anak mereka untuk mendapatkan sekolah yang layak selama 9 tahun belajar. Dengan adanya dana ini diharapkan juga standar pelayanan minimal dapat dipakai SPM ini dapat dikaitkan dengan sekolah yang belum mencapainya. SPM mentargetkan untuk melakukan pencapaian pada SNP standar nasioanl Pendidikan.

Manfaat untuk penggunaan dana BOS ini dari khususnya memiliki tujuan agar dapat membebaskan berbagai macam pungutan untuk peserta didik mulai dari SD hingga SMA agar peserta didik tidak terbebani dan dana operasi Pendidikan tetap berlangsung. Hal ini dapat bertujuan untuk melakukan pembebasan pungutan uang terhadap peserta didik. Pembebasan biaya ini dapat dilakukan di semua sekolah berstatus negeri dan swasta. PERMENDIKBUD no 6 tahun 2021 telah menetapkan jumlah yang akan diterima siswa SMP sebesar Rp. 1.100.000 dan dibagi menjadi tiga tahapan berikut proses cairnya dana BOS ini pada 1 Januari hingga maret dicairkan lalu tahap kedua pada 1 April hingga Agustus dan tahap terakhir pencairan dana yang dilakukan pada tanggal 1 September hingga 1 Desember.

Terdapat beberapa masalah yang didalamnya terdapat pada penggunaan dana BOS ini yang ada di kalangan SMP di wilayah UPT dinas Pendidikan kecamatan Gondanglegi terkait dari hal ini misalnya hal utama adalah terdapat ketidaksamaan pemberian dana ini di lingkungan Gondanglegi. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah peserta didik yang ada di sekolah lalu dikalikan pada jumlah murid yang ada.

Untuk sekolah yang memiliki peserta didik yang banyak maka sekolah tersebut dapat mencukupi biaya pengelolaan dikarenakan banyaknya peserta didik. Hal ini dapat berlainan jika peserta didiknya kecil maka yang didapat dana BOS nya juga sedikit.

Banyak ketidak cukupan untuk membiayai dana ini. Dikarenakan masih sering ditemui pos yang didalamnya mempunyai banyaknya siswa besar dan kecil hal itu tidak cukup.

Teori implementasi kebijakan yang digunakan oleh peneliti adalah teori dari George c. Erdward III dengan fokus penelitian pada komunikasi, sumber daya,

disposisi dan struktur birokrasi disini mengapa penelitian ini di golongkan pada penelitian yang terletak pada penelitian implementasi kebijakan dikarenakan implementasi dana Bantuan operasional sekolah adalah implementasi yang disusun oleh pemerintah sebagai bentuk dari pengaturan kebijakan untuk menangani masalah Pendidikan yang masih sering menghantui Pendidikan di seluruh Indonesia oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan yang sudah di atur oleh undang-undang tentang dana bantuan operasioanl sekolah mulai dari penggunaannya hingga pelaporannya dan petunjuk Teknik untuk menggunakannya.

Maka dari itu peneliti menggunakan teori dari George c Erdward III. Teori implementasi kebijakan dari Gerge c Erdward ini tidak dipakai oleh peneliti saja melainkan sebelumnya juga sudah digunakan oleh peneliti lain misalnya: Yalia Mulyono tentang Implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga sosial media tradisional di Jawa Barat yang ter unggah pada jurnal balai pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika Bandung. Pada Februari 2014 halaman 149-160. Serta Skripsi dari Putriyani Nindi 2018 judul penelitiannya yaitu Implementasi Program Bantuan Operasional sekolah tahun 2016 pada jenjang Pendidikan sekolah dasar di UPT dinad Pendidikan dan kebudayaan kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang yang disusun untuk memenuhi tugas skripsi pada universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang yang berisikan juga membahas kebijakan dana BOS yang di analisis menggunakan teori Erdward III.

#### **5.1.1.1. Komunikasi**

Berikut pandangan Edwards (1980) yang memberikan syarat kesatu untuk para pengimplementasian kebijakan seefektif mungkin.bahwasannya untuk mengelola

kebijakan tetap harus mengerti bagaimana cara melakukannya. Para aktor pengimplementasian kebijakan lebih utama di tentukan dahulu supaya keputusan kebijakan nantinya berkahir ditangan orang yang tepat. Berikut kegiatan yang penting untuk menyampaikan beberapa keputusan kebijakan yaitu komunikasi. Komunikasi yang dimaksudkan disini adalah komunikasi yang dapat di pahami dan akurat serta detail untuk para aktor pengimplementasian. Terdapat tiga aspek yang ada didalam komunikasi yaitu konsistensi, transmisi dan kejelasan.

#### **5.1.1.1.1 Pelaksanaan transmisi sebagai Implementasi Program BOS sesuai dengan**

##### **Petunjuk Teknis BOS**

Menurut kepala sekolah SMPN 1 Gondanglegi bapak mohammad baehaqi, pelaksanaan Implementasi Program BOS sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS adalah:

“Ya tentu saja, pelaksanaan program BOS harus sesuai dengan petunjuk teknis BOS terbaru, yaitu tahun 2021. Dari mulai penetapan alokasi dana BOS sampai pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan Dilakukan pertahap misalnya pada 1 Januari hingga maret tahap dua 1 april hingga Agustus dan tahap Ketiga 1 september hingga desember. Di tahun 2021 sudah terpisah pemberian dana BOS diantara kemennag dan kemendikbud semua sekolah mendapatkan dan BOS dengan aturan pendirian sekolah negeri , swasta didirikan langsung pada dinas Pendidikan sedangkan untuk madrasah didirikan pada depag. Kemudian sekolah itu membuka nomor rekening mengatasnamakan sekolah, sekolah memberikan nomor rekening tersebut ke tim BOS kabupaten atau kota, kemudian tim daerah mengirim nomor rekening sekolah kepada pusat atau provinsi”.

Sedangkan menurut Bu Nurul Hidayati selaku bendahara sekolah yaitu :

“Alhamdulillah sudah semuanya sudah di lakukan seperti yang ada di dalam peraturan pemerintah mulai dari membuat laporan hingga mencairkan dana berpegang dengan pedoman dari ketentuan pemerintah sudah seperti yang ada pada Peraturan Menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2020 yang menjelaskan mengenai pengoahan dana BOS dari pemerintah disitu sudah terlaksanakan dengan baik dari pihak sekolah. tanpa adanya petunjuk teknis sebagai panduan kami akan mengalami kesulitan dalam implementasi program BOS. Dari awal sampai membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran BOS harus sudah berdasarkan petunjuk

teknis BOS terbaru”

Analisa peneliti bahwa implementasi Program BOS sesuai dengan petunjuk

Teknik BOS dapat dilihat dari atas pada hasil wawancara yang sudah dilakukan dapat

diartikan menjadi pelaksanaan program BOS sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis

BOS dengan mendapatkan 1.100.000 untuk setiap siswa serta diberikan melalui tiga

tahapan yakni Dilakukan pertahap misalnya pada 1 Januari hingga maret, tahap dua

mulai 1 april hingga Agustus dan tahap Ketiga 1 september hingga desember, oleh

karena itu dapat dikatakan bahwa implementasi program BOS dilaksanakan

berdasarkan Juknis BOS tahun 2021 .

#### **5.1.1.1.2 Konsistensi implementasi dana BOS**

Pemberian Dana BOS ke Sekolah Dilaksanakan Sesuai dengan Juklak dan

Juknis, Menurut dinas , bahwa pemberian dana BOS ke sekolah dilaksanakan sesuai

dengan Juklak dan Juknis adalah :

“Ya ada bimtek, sosialisasi pengelolaan dana BOS, karena setiap tahun mekanisme penggunaan dana BOS selalu mengalami perubahan, tanpa ada sosialisasi maka kebijakan penggunaan dana BOS tidak akan berjalan dengan baik”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang)

Sedangkan menurut kepala sekolah yaitu :

“Ada sosialisasi melalui bimtek, dengan bimtek sosialisasi kepada setiap sekolah yang dilaksanakan secara rutin diharapkan tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan penggunaan dana BOS”. (Wawancara dengan Kepala kepala sekolah smpn 1 gondanglegi).

Analisa peneliti bahwa pemberian dana BOS ke sekolah dilaksanakan sesuai

dengan Juklak dan Juknis, dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa

pemberian dana BOS ke sekolah sudah dilaksanakan sesuai dengan Juklak dan

Juknis, hal ini dilakukan tentu saja untuk menghindari penyalahgunaan anggaran BOS

Dari segi pengawasan pun memang tidak ada masalah perihal sosialisasi bimtek yang dilaksanakan dikarenakan dengan adanya bimtek tersebut diharapkan dapat membantu serta mempermudah sekolah yang mendapatkan dana BOS untuk kelancaran semua kegiatan operasionalnya.

#### **5.1.1.1.3 Kejelasan implementasi pengelolaan dana BOS dengan Adanya sosialisasi terkait**

Menurut Operator sekolah yang bertugas dalam membantu bendahara dalam menyusun RKAM dan RAPBS yang mengungkapkan :

“Proses sosialisasi ini dengan memberitahukannya ke guru -guru , komite, wali murid saat pertemuan awal tahun ajaran baru biasanya dilakukan secara rutin. Serta sosialisasi pada madding dana BOS sehingga inshaallah penggunaan dana BOS Sudan sangat transparansi untuk semua kalangan di sekolah ini. Mengapa di pajang di madding dana BOS dikarenakan jika orangtua peserta didik ingin mengetahui penggunaan dana tersebut tinggal melihat madding yang sudah disiapkan dipojok dinding tersebut maslaah-masalah sekolah membelanjakan uang dana BOS untuk apa dan sebagainya. Misalnya pada penggunaan dana BOS Ini penggunaan perpustakaan yang mendapatkan dana sebesar Rp. 10.000.000 maka dana tersebut juga di belikan sarana-prasarana untuk memelihara ruangan misalnya agar tidak rusak berat. Biasanya apabila dana BOS kurang mencukupi kebutuhan sekolah maka sekolah-sekolah di kabupaten malang ini memakai dana untuk mencukupi sarana prasarana dikarenakan harga yang besar maka dana BOS banyak berkurang. Namun tetapi penggunaan dana BOS untuk membeli sarana prasarana ini ada juga menguntungkan sekolah untuk mengupdate teknologi dan kenyamanan peserta didik. Mislanya penggunaan dana BOS yang di berikan oleh pemerintah digunakan untuk membeli laptop sebesar Rp. 6000.000 maka biaya pemeliharannya sebesar 30%. Maka hal ini juga mengurangi dana BOS yang didapatkan. Hal ini juga mengurangi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh sekolah mislanya mengikuti dan menyelenggarakan lomba-lomba maka tidak bisa mengikuti lomba-lomba tersebut dikarenakan dana sudah terserap kepada sarana dan prasarana digunakan untuk mengupdate sarana prasarana seperti pemasangan wifi dan pemberbaruan laboratorium”.

Analisa peneliti bahwa ada sosialisasi melalui pertemuan awal tahun ajaran baru biasanya dilakukan secara rutin. Serta sosialisasi pada mading dana BOS dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa sosialisasi pengelolaan dana BOS melalui pertemuan awal tahun ajaran baru selalu dilakukan oleh sekolah melibatkan komite dan walimurid, karena setiap kali ada perubahan aturan atau juknis BOS selalu diikuti dengan kegiatan pertemuan awal tahun ajaran baru terkait Pengelolaan BOS. Sedangkan menurut dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten malang menyampaikan :

“Ya, menurut pantauan kami bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten malang melakukan rekapitulasi pengeluaran menggunakan dana BOS serta menempelkan semuanya didepan sekolah”. (Wawancara dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Admin & Umum Inspektorat kabupaten malang)

Artinya disini bentuk pengawasan dalam penggunaan Dana BOS sendiri memang bisa dibilang baik dikarenakan memang dalam pengelolaannya berjalan sesuai dengan Juklaknya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten malang yaitu:

“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kabupaten malang adalah Sebagai pengawas dan berdasarkan hasil monitoring agar menginstruksikan kepada setiap sekolah untuk memasang transparansi pengelolaan dana BOS di depan sekolah guna semua walimurid bisa ikut melihatnya” .).

Pihak sekolah pun memang selalu melakukan sosialisasi pengelolaan Dana BOS itu sendiri sehingga pengelolaan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang mendapatkan Dana BOS sendiri benar-benar bisa menunjang kegiatan di sekolah.

Sedangkan menurut Bendahara sekolah :

“Pihak sekolah pun memang selalu melakukan sosialisasi pengelolaan Dana BOS itu sendiri sehingga pengelolaan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang mendapatkan Dana BOS sendiri benar-benar bisa menunjang kegiatan di sekolah.”



Dengan triangulasi sumber peneliti melakukan keabsahan data dengan mewawancarai

komite sekolah, yang menyampaikan :

“Dengan mengadakan pertemuan yang rutin digelar diawal masuk peserta didik atau ajaran baru. Namun dikarenakan saat ini ada pandemi corona maka sosialisasi untuk mengundang banyak orang menjadi vakum dan terus lanjut sampai pada akhirnya pemberhentian sosialisasi sementara dahulu.”

Selaras dengan pendapat komite sekolah peneliti mewawancarai salah satu wali murid yang mengatakan :

“Sebelum adanya pandemi corona ini proses sosialisasi dilakukan oleh komite sekolah dengan mengadakan rapat Bersama wali murid peserta didik yang bersekolah disini. Namun karena situasi sekarang ini sedang buruk maka, belum pernah dilakukan sosialisasi lagi akhir-akhir ini dikarenakan sekolah yang melaksanakan online dan larangan dari pemerintah untuk berkerumun dan ramai –ramai.”

Jadi peneliti menganalisis bahwa setiap belanja keperluan sekolah ataupun informasi terkait pengelolaan dana BOS, pihak sekolah selalu mengadakan rapat awal tahun dengan mengundang walimurid dan komite sekolah guna menyampaikan belanja sekolah dan juknis pengelolaan dana BOS. Serta menyampaikan hasil rapat tahunan kedalam mading sekolah yang ditempelkan didepan sekolah agar semua walimurid dan komite sekolah bisa melihat sehingga terjadinya transparansi dana dan tidak ada yang perlu di tutup-tutupi.

sebelum dana BOS di belanjakan kepala sekolah mengadakan rapat dengan komite dan bendahara serta dewan guru dalam menyusun apa saja yang menjadi keperluan sekolah yang bisa di belikan dengan dana BOS dengan mengacu kepada juknis yang berlaku, Menurut kepala sekolah SMPN 1 Gondanglegi pemanfaatan dana harus dimusyawarahkan bersama dengan menyampaikan :

“Penggunaan dana BOS seharusnya disesuaikan dengan RKAS. Dana BOS harus dipakai untuk membayar gaji karyawan honorer sebesar 50%, menerima peserta didik baru, melaksanakan tes ujian, harian, semester dll.”

Senada dengan pendapat kepala sekolah, bendahara sekolah SMPN 1 Gondanglegi ikut menuturkan :

“Cara menyalurkan dana BOS adalah dengan memberikannya pertahap biasanya keluar dananya langsung ke rekening sekolah caranya lebih detail seperti ini dengan memasukkan nomor rekening ke dapodik, inforasi yang ada di dapodik kemudian di validasi oleh kemendikbud dan bank. Apabila informasi sudah dinyatakan valid maka data dikirim ke director jendral bendahara untuk kemudian dicairkan dana yang sudah dicairkan akan mendapatkan surat SP2D untuk kemudian dikirim dana tersebut kesekolah yang bersnagkutan. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara dan kepala sekolah mengambilnya tidak boleh langsung semuanya pada tahap 1 misalnya 100.000.000 dana maka yang diambil harus secara bertahap sedikit demi sedikit pengambilannya menggunakan SIPLAH juga di tahap 1 begitu juga tahap kedua dan seterusnya Apabila terjadi pengambilan di tahap satu secara keseluruhan dana maka di tahap kedua tidak punya dana lagi ini merupakan kesalahan sekolah. Maka sekolah harus mencukupi dananya sendiri dengan cara hutang atau pinjam koperasi guru sekolah sini juga pernah hutang sampai 45 juta rupiah karena dannaya tidak cukup untuk di gunakan. Penggunaan dana BOS ini digunakan untuk semua kegiatan di sekolah misalnya mngembangkan peprustakaan, melaksanakan Masa orientasi peserta didik baru, mengatur kegiatan belajar mengajar, serta melakukan ekstrakurikuler, merawat sekolah, membayar gaji guru atau karyawan honorer.”

Dengan triangulasi sumber Dengan tiangulasi sumber peneliti melakukan keabsahan data dengan mewawancarai operator sekolah, yang menyampaikan :

“Dalam menyusun RKAM ,Semuanya semua guru, staff karyawan pengelola usaha sekolah dan komite sekolah semuanya turut bergabung dalam Menyusun kebutuhan kebutuhan sekolah agar bisa tertangani semua kebutuhan sekolah dengan sempurna dikarenakan kebutuhan dari semua divisi sudah tersalurkan dan mndapatkan rincian berapa dana untuk digunakan mendanai kebutuhan sekolah di setiap bidangnya”.

Dari beberapa hasil analisa peneliti terhadap beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal komunikasi yang terpengaruhi oleh kebijakan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transmisi Implementasi Program BOS sudah sesuai dengan Petunjuk

Teknis BOS dan sudah berjalan dengan baik

2. Dalam hal konsistensi, tidak yang berarti karena dengan Adanya sosialisasi BOS

dari dinas terkait ke sekolah-sekolah dan masyarakat secara rutin

3. Adanya petunjuk Teknis BOS yang di sebarakan ke setiap sekolah dan semua

sekolah sudah memilikinya

4. Adanya sosialisasi melalui Bimtek pengelolaan BOS yang dilakukan secara rutin

5. Pemberian dana BOS ke sekolah dilaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis

serta tidak terjadi penyimpangan

#### **5.1.1.2. Sumber Daya**

Selain komunikasi yang jelas dan konsisten, implementasi kebijakan yang

efektif juga memerlukan ketersediaan sumber- sumber yang memadai. Terkait dengan

sumber-sumber, Edwards mengatakan hal berikut : Sumber-sumber yang dimaksud

Edwards meliputi: Staf yang mempunyai wewenang, informasi, dan fasilitas.

##### **5.1.1.2.1. Staf yang mempunyai wewenang**

Terkait dengan faktor sumber daya manusia di dalam pelaksanaan dana BOS

ada yang dinamakan tim teknis BOS yang disini ialah Petugas Yang Mengelola BOS

Berdasarkan SK Kepala Sekolah Pentingnya memiliki petugas yang diberi SK oleh

Kepala Sekolah yang bersangkutan bertujuan untuk memudahkan sekolah itu sendiri

dalam mengelola Dana BOS. Pengelolaan Dana Bos sendiri harus dilakukan oleh

orang yang benar-benar kompeten dalam bidangnya sehingga kemungkinan untuk

terjadi kesalahan baik itu dalam operasional atau pengelolaan Dana BOS sendiri bisa

diminimalisir. Berdasarkan wawancara dengan informan dengan tiap sekolah yang peneliti jadikan informan mengemukakan bahwa :

“Ya, saya memiliki SK dari Kepala Sekolah sebagai Bendahara BOS terhitung tahun pelajaran 2019/2020”. (Wawancara dengan Bendahara BOS SMPN 1 Gondanglegi)

Sedangkan menurut kepala sekolah yaitu :

“Di sekolah ada petugas yang ditunjuk melalui SK dari kepala sekolah sebagai pengelola BOS yang disebut bendahara BOS”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Gondanglegi)

Dari pernyataan informan peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap sekolah yang menerima Dana BOS sudah memiliki petugas yang diberikan SK sesuai dengan juknis yang ada.

Menurut Kepala Sekolah SMPN 1 Gondanglegi, bahwa ada Petugas yang memperoleh SK berdasarkan struktur yang ada di Juknis BOS adalah :

“Setiap kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan pengelolaan dana BOS, ya tentu saja saya memberikan SK kepada para petugas sesuai dengan Juknis BOS”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Gondanglegi)

Dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi keterangan peneliti mewawancarai bendahara sebagai Informan selanjutnya dengan mengatakan hal yang sama yakni :

“SK selalu diberikan jika ada kegiatan yang dilakukan sekolah kepada guru sebagai tugas tambahan, begitu pula dengan petugas BOS sudah sesuai dengan struktur yang ada pada Juknis BOS”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Gondanglegi)

Analisa peneliti bahwa ada Petugas yang memperoleh SK berdasarkan struktur yang ada di Juknis BOS, dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semua petugas memperoleh SK sesuai struktur yang ada pada Juknis BOS.

Pentingnya tim teknis dalam pengelolaan Dana BOS sangat diperlukan.

Menurut Kepala Sekolah SMPN 1 Gondanglegi, bahwa ada tim teknis dalam pengelolaan BOS adalah :

“Ya ada, Tim BOS sekolah dibentuk berdasarkan struktur yang terdapat pada Juknis BOS terdiri dari penanggung jawab, bendahara, 1 orang unsur komite sekolah dan 1 orang unsur orang tua, di tambah sebagai penanggung jawab pendataan”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Gondanglegi)

Selaras dengan pendapat bendahara SMPN 1 Gondanglegi menurut Bu Nurul

Hidayati yaitu :

“Tim teknis secara khusus tidak ada, hanya ada Tim BOS yang dibentuk berdasarkan struktur yang terdapat pada Juknis BOS terdiri dari penanggung jawab, bendahara, 1 orang unsur komite sekolah dan 1 orang unsur orang tua, di tambah sebagai penanggung jawab pendataan yang nantinya akan ikut andil dalam pencairan dana BOS”. (Wawancara dengan bendahara Sekolah SMPN 1 Gondanglegi)

Komite sekolah pun ikut memberi tanggapan dengan menuturkan :

“Petugas yang diberi SK tambahan belum sepenuhnya memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik, karena latar belakang akademik yang dimiliki hanya sebagai pendidik, tetapi kami berusaha untuk meningkatkan kemampuan mereka melalui diklat administrasi dan keuangan yang dilakukan baik oleh swasta maupun pemerintah”. (Wawancara dengan komite SMPN 1 Gondanglegi)

Semua informan mengatakan bahwa dengan adanya tim teknis dapat membantu dalam hal pengelolaan dana dimulai dari perencanaan, pengelolaan sampai pertanggungjawaban BOS itu sendiri terdiri atas komite sekolah, kepala sekolah, bendahara sekolah, operator sekolah serta melibatkan salah seorang tokoh masyarakat yang berasal dari walimurid SMPN 1 Gondanglegi. Analisa peneliti bahwa tim teknis memperoleh SK adalah mereka yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan sekolah, akan tetapi dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa petugas

yang diberi tugas sebagai pengelola BOS adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai pengelola BOS dengan latar belakang kejuruan, sehingga kemampuan dalam mengelola administrasi dan keuangan belum sepenuhnya memiliki pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan. tetapi disini peneliti mengamati bahwasanya meskipun semuanya tidak mempunyai latar belakang yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana BOS, SMPN 1 Gondanglegi berusaha semaksimal mungkin dalam pengelolaan dana BOS agar sesuai yang di rencanakan bersama.

#### **5.1.1.2.2. Pengawasan yang dilakukan dalam Pengelolaan BOS**

Pengawasan yang dilakukan dalam Pengelolaan BOS ialah dengan memberikan bimbingan berupa informasi, Informasi yang dimaksud adalah informasi yang terkait dengan bagaimana cara melaksanakan program kebijakan sebagaimana diarahkan. Jika program kebijakan itu berupa hal-hal yang baru dan berteknologi tinggi, maka akan menyulitkan untuk mencari orang yang bisa melaksanakan kebijakan.

Menurut kepala sekolah SMPN I Gondanglegi kabupaten malang yang menuturkan bahwasanya :

“Semua kebutuhan yang ada disekolah ini memerlukan pengesahan dari kepala sekolah entah RKAM ataupun RAPBS maka peranannya sangat penting dikarenakan kepala sekolah adalah sosok yang di butuhkan tanda tangannya tidak hanya tanda tangan saja, saya juga membimbing bendahara dan operator sekolah untuk memudahkan dalam penyusunan RKAM dan RAPBS kemudian jika sudah disetujui penggunaan dana tersebut maka pelaksanaan pembelian belanja barang dapat dilakukan. Kepala sekolah juga sering mengajak sharing Bersama dengan guru dan komite untuk menggunakan dana BOS ini”.

Komite sekolahpun ikut menambahi yang mengatakan :

“Caranya adalah dengan tiada henti-hentinya untuk melakukan pengadaan pengawasan sosialisasi anggaran penggunaan dana BOS disamping itu komite memiliki peran sesuai dengan kemendiknas no 44 tahun 2002 sebagai pendukung,

memberikan pertimbangan, pengendali dan pihak tengah mediator antara masyarakat dan pemerintah”.

Fungsi komite sekolah adalah untuk mendukung tumbuh perhatian masyarakat akan Pendidikan. Membentuk Kerjasama dengan masyarakat sebaik mungkin. Menampung aspirasi masyarakat. Turut menyumbangkan pertimbangan, masukan terhadap satuan Pendidikan saat akan merinci RAKS

Dalam menyusun RKAM RAPBS kepala sekolah dan komite Sekolah menugaskan tim teknis BOS dalam penusunanya seperti halnya yang di ungkapkan oleh bendahara sekolah yakni :

“Semuanya semua guru, staff karyawan pengelola usaha sekolah dan komite sekolah semuanya turut bergabung dalam Menyusun kebutuhan kebutuhan sekolah agar bisa tertangani semua kebutuhan sekolah dengan sempurna dikarenakan kebutuhan dari semua divisi sudah tersalurkan dan mndapatkan rincian berapa dana untuk digunakan mendanai kebutuhan sekolah di setiap bidangnya”.

Operator sekolah ikut menambahi dalam penuturanya yakni :

“Terkait RAPBS Di susun selama satu tahun sekali menggunakan aplikasi computer word kemudian diajukan dalam bentuk dan format yang biasanya digunakan yaitu RKAS. Pertamanya melakukan pembentukan tim yang bisa Menyusun RKAS. Kemudian melakukan Analisa kondisi satuan Pendidikan, membuat penetapan akan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam waktu satu tahun, Melihat kedepannya tantangan yang akan di alami oleh sekolah kemudian menjadikan hal tersebut sebagai penguat dalam Menyusun dana BOS”.

Ketika sudah selesai dalam penyusunan RKAM dan RAPBS, kepala sekolah dan komite mengamini dengan memberi tanda tangan dan stempel atas pembuktian bahwa untuk mengetahui kepala sekolah dan komite sekolah. Seperti penuturan komite sekolah berikut :

“Komite sekolah Mengetahui dikarenakan setiap pengeluaran dana yang ada penggunaan dana BOS selalu ditanda tangani juga oleh komite sebagai pihak yang mengetahui secara adminisitrasi dari surat persuratan dengan disaksikan oleh

walimurid”.

Melalui triangulasi sumber dalam keabsahan datanya peneliti mewawancarai salah seorang walimurid Seperti penuturan salah seorang walimurid yang mengatakan :

“Walimrid di undang setiap satu semester sebagai pengawal dana BOS sampai dan digunakan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah Bersama dengan komite sekolah dan kebanyakan wali murid yang dapat ikut dalam kegiatan penyaluran dana BOS adalah orang tua peserta didik yang sudah di pilih oleh sekolah”.

Analisa peneliti bahwa komite sekolah,kepala sekolah serta walimurid mengetahui pengelolaan dana BOS dengan bertindak sebagai pengawas dalam penyusunan dan pengelolaan dalam pengelolaan dana BOS, SMPN 1 Gondanglegi agar sesuai yang di rencanakan Bersama penyerahan Dana BOS Sudah Sesuai Dengan Pedoman BOS

Menurut kepala sekolah, bahwa penyerahan dana BOS sudah sesuai dengan pedoman BOS adalah :

“Sudah sesuai dengan pedoman BOS, tetapi kadangkala waktu pencairan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Gondanglegi)

Sedangkan menurut bendahara sekolah yaitu :

“Sesuai dengan pedoman BOS Tapi setahu saya secara pengajuan dan laporan sudah sesuai, tetapi kadangkala waktu pencairan terlambat tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, tetapi kadangkala waktu pencairan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan”. (Wawancara dengan Bendahara Sekolah SMPN 1 Gondanglegi )

Analisa peneliti bahwa penyerahan dana BOS sudah sesuai dengan pedoman BOS dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa penyerahan dana BOS sudah sesuai dengan Pedoman BOS tetapi selalu tidak tepat dalam waktu pencairan.tim teknis BOS Mengetahui Apa yang Menjadi Wewenang dan Tanggung



Jawab Berkaitan dengan Pengelolaan Dana BOS

Menurut kepala Sekolah SMPN 1 Gondanglegi, bahwa petugas mengetahui apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan pengelolaan dana

BOS adalah :

“Petugas pengelola dana BOS sudah mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya sebagai pengelola Dana BOS dari awal pengajuan sampai pembuatan laporan pertanggung jawaban sudah dijalankan sesuai dengan juknis BOS”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Gondanglegi)

Sedangkan menurut bendahara Sekolah SMPN 1 Gondanglegi yaitu :

“Para pengelola dana BOS sudah mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya sebagai pengelola Dana BOS berdasarkan SK yang diberikan”. (Wawancara dengan bendahara Sekolah SMPN 1 Gondanglegi)

Analisa peneliti bahwa petugas teknis BOS di awasi dan di bimbing oleh kepala sekolah dan komite sekolah agar mengetahui apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan pengelolaan dana BOS dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa semua petugas pengelola BOS sudah mengetahui apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya sebagai pengelola BOS

#### **5.1.1.2.3. Fasilitas.**

Menurut Edwards, sumber-sumber penting berikutnya setelah tersedianya staf, dan informasi yang memadai, adalah ketersediaan sarana atau fasilitas fisik berupa peralatan, gedung, insentif, dan bahkan tempat yang nyaman.

Seperti penuturan kepala sekolah yang menyampaikan :

“Biasanya apabila dana BOS kurang mencukupi kebutuhan sekolah maka sekolah-sekolah di kabupaten malang ini memakai dana untuk mencukupi sarana prasarana dikarenakan harga yang besar maka dana BOS banyak berkurang. Namun tetapi penggunaan dana BOS untuk membeli sarana prasarana ini ada juga menguntungkan

sekolah untuk mengupdate teknologi dan kenyamanan peserta didik. Misalnya penggunaan dana BOS yang di berikan oleh pemerintah digunakan untuk membeli laptop sebesar Rp. 6000.000 maka biaya pemeliharannya sebesar 30%. Maka hal ini juga mengurangi dana BOS yang didapatkan. Hal ini juga mengurangi kegiatan - kegiatan yang harus dilakukan oleh sekolah misalnya mengikuti dan menyelenggarakan lomba-lomba maka tidak bisa mengikuti lomba-lomba tersebut dikarenakan dana sudah terserap kepada sarana dan prasarana digunakan untuk mengupdate sarana prasarana seperti pemasangan wifi dan pemberbaruan laboratorium”.

Selaras dengan pendapat bendahara sekolah yang menyampaikan :

“Alhamdulillah, Kami dibekali laptop yang sesuai dalam mengerjakan perencanaan, pengelolaan sampai pertanggungjawaban dana BOS oleh sekolah serta diberikan tunjangan insentif yang sesuai dengan kinerja kita”.

Analisa peneliti bahwa SMPN 1 Gondanglegi membekali sebuah laptop bagi tim teknis khusus untuk mengerjakan pengelolaan dana BOS, Sehingga pengerjaan pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS tepat sasaran sesuai dengan juknis BOS tahun 2021, serta memberikan insentif bagi tim teknis BOS atau yang terlibat dalam pengerjaan realisasi dana BOS

Dari beberapa hasil analisa peneliti terhadap beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal sumber daya yang terpengaruhi oleh kebijakan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tim teknis ialah Semua petugas yang mengelola BOS sudah berdasarkan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh sekolah ditanda tangani oleh kepala sekolah;
2. Semua SK petugas pengeloa BOS sudah berdasarkan struktur yang ada di Juknis BOS.
3. Tim teknis terdiri dari komite sekolah dan kepala sekolah sebagai pengawas dan bertanggung jawab akan penyusunan RKAM dan RAPBS ada juga bendahara sekolah, operator sekolah serta walimurid.

4. Semua pelaksanaan program BOS pada saat ini dijalankan dengan sistem online yakni dengan mengupload berkas yang di butuhkan kepada website yang sudah di sediakan oleh kemendikbud.
5. Tim teknis dana BOS ialah petugas yang memperoleh SK sebagai pengelola BOS adalah mereka yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah, karena semua pengelola adalah guru yang diberi tugas tambahan dengan latar belakang akademik sebagai pendidik.
6. Insentif sudah diberikan kepada semua pengelola BOS sesuai dengan Juknis BOS berupa transport dan uang lelah;
7. SMPN 1 Gondanglegi sudah mendapat Bantuan BOS sesuai dengan jumlah siswa yang dimiliki
8. Penyerahan dana BOS sudah sesuai dengan pedoman BOS terbaru, tetapi terkadang sering terjadi ketidak tepatan dalam jadwal pencairan dana BOS
9. Semua petugas pengelola BOS sudah mengetahui apa yang wewenang dan tanggung jawabnya dengan jelas.
10. Semua petugas pengelola BOS dibekali dengan fasilitas yang memadai guna pengelolaan dana BOS.

#### 5.1.1.3. DISPOSISI

Kecenderungan atau disposisi yang digambarkan Edwards lebih mengarah pada sikap/respon pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan, Komitmen sekolah dalam menerapkan kebijakan dana BOS untuk sekolah gratis sesuai dengan pedoman (BOS)

Menurut kepala sekolah, komitmen pemerintah menyediakan dana BOS untuk sekolah gratis sesuai dengan pedoman (BOS) adalah :

“Tentu saja, SMPN 1 Gondanglegi merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah selalu berkomitmen bahwa dana BOS sebagai wujud program sekolah gratis dilaksanakan harus berdasarkan pedoman BOS. Ya, karena sudah komitmen pemerintah untuk bahwa dana BOS harus dilaksanakan harus berdasarkan pedoman BOS yang sudah diberikan kepada semua sekolah penerima dana BOS”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP 1 Gondanglegi Kabupaten Malang)

Sedangkan menurut Komite Sekolah SMP 1 Gondanglegi Kabupaten Malang

yaitu :

“Pemerintah selalu berkomitmen bahwa dana BOS harus dan wajib dilaksanakan sesuai pedoman BOS tanpa adanya penyimpangan”. (Wawancara Komite sekolah SMP 1 Gondanglegi)

Sedangkan menurut Perwakilan dari walimurid yaitu :

“Ya, semua kegiatan harus memiliki pedoman oleh karena itu program BOS yang merupakan wujud sekolah garis yang diprogramkan pemerintah harus sepenuhnya berdasarkan pedoman BOS yang sudah ditetapkan pemerintah”. (Wawancara dengan salah seorang walimurid)

Menurut bendahara sekolah SMP 1 Gondanglegi menyampaikan bahwasanya:

“Cara menyalurkan dana BOS adalah dengan memberikannya pertahap biasanya keluar dananya langsung ke rekening sekolah caranya lebih detail seperti ini dengan memasukkan nomor rekening ke dapodik, inforasi yang ada di dapodik kemudian di validasi oleh kemendikbud dan bank. Apabila informasi sudah dinyatakan valid maka data dikirim ke director jendral bendahara untuk kemudian dicairkan dana yang sudah dicairkan akan mendapatkan surat SP2D untuk kemudian dikirim dana tersebut kesekolah yang bersnagkutan. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara dan kepala sekolah mengambilnya tidak boleh langsung semuanya pada tahap 1 misalnya 100.000.000 dana maka yang diambil harus secara bertahap sedikit demi sedikit pengambilannya menggunakan SIPLAH juga di tahap 1 begitu juga tahap kedua dan seterusnya Apabila terjadi pengambilan di tahap satu secara keseluruhan dana maka di tahap kedua tidak punya dana lagi ini merupakan kesalahan sekolah. Maka sekolah harus mencukupi dananya sendiri dengan cara hutang atau pinjam koperasi guru sekolah sini juga pernah hutang sampai 45 juta rupiah karena dannaya tidak cukup untuk di gunakan. Penggunaan dana BOS ini digunakan untuk semua kegiatan di sekolah misalnya mngembangkan peprustakaan, melaksanakan Masa orientasi peserta didik baru, mengatur kegiatan belajar mengajar, serta melakukan ekstrakurikuler,

merawat sekolah, membayar gaji guru atau karyawan honorer”.

Bukti keseriusan SMP 1 Gondanglegi dapat terlihat ketika dalam pemanfaatan alokasi dana BOS sesuai juknis yang ada mulai dari perencanaan sampai pemanfaatan hingga proses pertanggung jawaban yang memakan waktu tidak sebentar semua yang terlibat dalam tim teknis dana BOS bahu membahu dalam mensukseskan alokasi dana BOS.

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa komitmen pemerintah menyediakan dana BOS untuk siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan bebas akan SPP sesuai dengan pedoman (BOS) dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa SMPN 1 Gondanglegi sangat serius dalam memaksimalkan dana BOS untuk sekolah yang sudah sesuai dengan komitmen yang tertuang pada pedoman (BOS).

#### **5.1.1.3.1. Adanya Monitoring dan Evaluasi Dari Pelaksana Kebijakan Sekolah Gratis Melalui Dana BOS**

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, bahwa adanya monitoring dan evaluasi dari pelaksana kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS adalah :

“Monitoring dan evaluasi selalu dilaksanakan terhadap semua kegiatan sekolah terutama dalam pengelolaan dana BOS”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang)

Sedangkan menurut kabag pendidikan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang yaitu :

“Ada, selalu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS untuk semua sekolah dasar di Kecamatan Gondanglegi”.(Wawancara kabag pendidikan SMP Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Malang)

Sedangkan menurut kepala sekolah SMPN 1 Gondanglegi yaitu :

“Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara rutin terhadap SMPN 1 Gondanglegi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangtanjung untuk sejauh ini kinerja bendahara sekolah Sudah bagus sangat tertib contohnya Ketika akan ada kegiatan ujian maka SPJ di buat oleh panitia ujian karena kebutuhan-kebutuhan yang tahu secara lengkap adalah panitia ujian sehingga bendahara tinggal melakukan pengendalian saja”. (Wawancara dengan kepala sekolah SMPN 1 Gondanglegi )

Dari pemaparan jawaban informan dapat disimpulkan bahwa adanya monitoring dan evaluasi dari pelaksana kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS, dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program rutin dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan.

Dari beberapa hasil analisa peneliti terhadap beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal kecenderungan (disposisi) yang terpengaruhi oleh kebijakan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui sekolah sepenuhnya sudah berkomitmen menyediakan dana BOS untuk sekolah gratis sesuai dengan pedoman BOS
2. Para Pengelola BOS sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.
3. Program BOS sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat
4. Kegiatan monitoring dan evaluasi dari pelaksana kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan oleh dinas bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban BOS oleh sekolah ke dinas terkait
5. Juknis insentif yang diperoleh oleh pelaksana kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS sudah tercantum dalam Juknis BOS.

#### 5.1.1.4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan dalam implementasi kebijakan. Terdapat dua aspek utama dalam birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi.

##### 5.1.1.4.1. Standard Operating Procedures (SOP)

SOP dapat diartikan sebagai rutinitas atau prosedur baku yang ditaati oleh sebuah organisasi dalam menjalankan tugas-tugasnya yang telah disusun.

Seperti pada penuturan kepala sekolah yang menyampaikan :

“Penargetan dana BOS menggunakan RKAS (Rencana kegiatan dan anggaran sekolah). Staf karyawan dan dewan guru semuanya mulai melakukan penyusunan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah nantinya. Kemudian kebutuhan dana BOS tersebut di susun juga terkait dengan sumber danannya dan berapa angka yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhannya semua itu. Tentunya penyusunan kebutuhan ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sekolah selama satu tahunnya. Pada lembar pembuktian kebutuhan dana BOS ini pada rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Pendataan dana BOS dilakukan secara melakukan mendatakan sekolah terhadap pihak dapodik cara untuk mendapatkan pendataan Pendidikan sudah ada pada Kemendikbud petunjuk Teknik dana BOS (2015:20) misalnya harus melengkapi Fotocopi dana BOS dengan format-format tertentu seperti yang ada pada aturan pemerintah yang berlaku. Lalu sekolah menyiapkan formulir yang harus diisi oleh peserta didik masing -masingnya kemudia sekolah melakukan verifikasi atas data yang sudah terkumpul baik dari data yang diperoleh dari siswa maupun guru. Minimal sekolah mengupdate data informasi siswa, karyawan dan guru pada satu semester disetiap kegiatan belajar mengajar”.

Jadi satu tahun dicek dua kali perubahan data tersebut. Data inilah yang digunakan untuk dijadikan sumber dana BOS dan kegiatan lainnya. Alokasi dana BOS satu siswa mendapatkan dana BOS sebesar Rp. 1.100.000 setiap tahunnya yang dibayarkan pertahap biasanya transfer tahap 1 sebesar 30% tahap kedua mendapatkan pengalokasian dana sebesar 40% tahap ketiga sebesar 30%. Jadi banyak peserta didik

mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 dikalikan dana BOS yang didapatkan sebesar Rp.

1.100.000 akan tetapi penghambat pengalokasian dana ini adalah cair danaya tidak

sesuai dengan tahap pemberiannya seharusnya bulan Januari sudah turun dana

tersebut malah turun ke tahap kedua pencairan dananya sehingga sekolah mencari

hutang dahulu untuk mencukupi kebutuhan Pendidikan di sekolah tersebut. Dan

tahun ini pencairan dana BOS pada tahun 2021 Cuma cocok cairnya di tahap kedua

saja. Pengalokasian dana juga di sesuaikan pada aturan pemerintah permendikbud no

8 tahun 2020. Dan dana BOS juga dibagi menjadi beberapa dalam alokasinya dana

bos untuk regular yaitu untuk memberikan peningkatan untuk melayani warga

sekolah disekolah tersebut. BOS Kinerja BOS untuk sekolah yang berperingkat baik

sehingga mendapatkan dana lebih untuk dibiayai oleh pemerintah. Dan yang terakhir

adalah dana BOS afirmasi yang diberikan untuk satuan Pendidikan yang berada

diwilayah 3 T (Terluar. Tertinggal dan transmigrasi.) dan untuk mencairkan dana

BOS di triwulan kedua atau yang selanjutnya perlu yang namanya pertanggung

jawaban di sampaikan dalam bentuk dokumen ataupun secara online seperti

pemaparan kepala sekolah yang menyampaikan :

“Pelaporan penggunaan dana BOS ini ditujukan pada Wali murid , guru, dinas Pendidikan kabupaten Malang, serta pusat , siswa, dan secara online. Pusatnya ini adalah inspektorat Pendidikan pada akhir tahun misalnya terkadang dana BOS digunakan untuk belanja modal kemudian modal ini digunakan untuk dijadikan asset milik negara seluruhnya. Jadi pada RKAS terdapat belanja Modal untuk membelanjakan dana BOS menjadi dana modal harus menggunakan bukti-bukti yang ada pada bagian sidak modal barang -barang yang dibutuhkan. Pertanggung jawaban dana BOS melalui hasil laporan kegiatan kemudian dicek dana tersebut dengan realisasi sumber dana untuk sekolah, membuat buku kas pembantu, umum, pajak, serta ditambahi dengan bukti dokumen audit yang digunakan untuk mengarsipkan kebutuhan sekolah yang sudah dibiayai. Baiknya data tersebut disimpan rapi sesuai dengan tanggalnya terjadi”.



Senada dengan pendapat kepala sekolah bendahara sekolahpun ikut menyampaikan :

“Pertanggung jawaban dana BOS itu dilakukan secara rutin setiap dana BOS dicairkan maka disitulah pihak sekolah saya selaku operator membuat format untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS terhadap tersalurnya dana BOS ini serta penggunaannya di sekolah. Dana BOS dicairkan biasanya melalui tiga tahapan disetiap tahunnya tahap pertama dicairkan oleh pemerintah dibulan 1 Januari sampai Maret, kemudian tahap kedua 1 april sampai 1 Agustus dan tahap terakhir dicairkan 1 September hingga 1 Desember. Kami disini harus mempertanggung jawabkan dana BOS dengan menggunakan dua laporan melalui laporan Online dan dan menggunakan SPJ (surat pertanggungjawaban dana BOS) Lama waktu untuk mengerjakan SPJ ini biasanya selama 1 Bulan misalnya pada tahap satu maka harus selesai pada bulan Akhir Maret. Isi dari SPJ ini sangat lengkap harus berisikan nota-nota pengeluaran biaya dari pengambilan dana BOS “.

Setelah membuat SPJ secara tertulis maka membuat pertanggung jawaban di Online. Apabila mengurus pertanggung jawaban dana BOS secara online maka lebih ketat lagi dikarenakan harus memiliki bukti fisik lengkap dengan surat-surat keluar masuk perjalanan penggunaan pengeluaran dan penerimaan dana BOS itu sendiri.

Operator sekolahpun ikut menambahi atas penuturan bendahara sekolah yang menyampaikan :

“seperti pada SPPD surat perintah perjalanan dinas, belanja barang dan modal harus menggunakan aplikasi siplah dari pemerintah (system inforasi pengadaan sekolah) diatas Rp. 500.000 harus dengan siplah agar lebih mudah dalam mencetak bukti -bukti pemeblian barang drai siplah”.

Jadi siplah seperti penyalur toko barang yang akan di butuhkan oleh satuan Pendidikan di kabupaten Malang. Di Siplah misalnya saat menggunakan dana BOS kemudian dana tersebut di pakai untuk mengisikan surat permohonan, kuitansi barang, berita acara, pengadaan barang, membayar pajak dan melihat kondisi keadaan barang lebih mudah karena sudah menjadi satu di SIPLAH sehingga sekolah tidak susah untuk membuat kuitansi secara sendiri-sendiri karena semuanya sudah sepaket

tinggal mempertanggungjawabkan saja. Jika sekolah melakukan perbelanjaan sendiri dengan membeli peralatan dan perlengkapan sendiri maka tidak akan selengkap seperti di SIPLAH karena sekolah harus menyiapkan bukti pembelian sendiri.

Kemudian ada aplikasi yang bernama MAMIN untuk membayar pajak yang dibeli peralatan yang dikelola oleh sekolah selama ini maupun perlengkapan biasanya sebesar 10% dari dana BOS yang digunakan. Laporan biasanya di setor juga ke Dinas Pendidikan kabupaten Malang mengikuti sesuai tahapannya tahap keluarnya dana BOS dari pemerintah oleh karena itu harus dibuatkan juga SPJ nya. Begitu juga pada tahap kedua dan tahap ketiga harus sama -sama disetor.

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwasanya secara birokrasi terkait SOP dana BOS dengan menyusun berkas-berkas yang dibutuhkan seperti membuat SPJ, menyusun RKAM, dan berkas-berkas yang lain yang dibutuhkan dalam mencairkan dana BOS, ketika berkas semuanya terkumpul, maka di upload secara online melalui website yang sudah disediakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan serta melaporkan secara offline kepada dinas pendidikan kabupaten Malang.

#### **5.1.1.4.2. fragmentasi**

adalah ketidaksamaan pandangan atau sikap di antara para pelaksana kebijakan pada level yang berbeda-beda. Menurut kepala dinas kabupaten Malang, bahwa ada penanggung jawab pelaksanaan kebijakan sekolah bebas SPP melalui dana BOS untuk setiap jenjang adalah:

“Ada penanggung jawab pelaksanaan kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS untuk setiap jenjang pendidikan mulai dari Tim BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota dan Tim BOS Sekolah”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang)

Senada dengan penuturan kepala sekolah yang menyampaikan bahwasanya :

“untuk pandangan yang berbeda sejauh ini tidak ada, dikarenakan intruksi dijalankan secara sistematis mulai dari pusat sampai provinsi hingga dinas pendidikan kabupaten atau kota setempat, sehingga sangat minim atau bahkan tidak pernah terjadi perbedaan pandangan”.

Melalui triangulasi sumber yang disampaikan oleh bendahara sekolah yang menyampaikan bahwasanya :

“biasanya dinas pendidikan kabupaten malang mengumpulkan semua bendahara sekolah yang berada dalam naungannya untuk mengikuti bimtek BOS, dan intruksinya sama dengan yang disampaikan oleh kementerian pendidikan”.

Analisa peneliti tentang adanya penanggung jawab pelaksanaan kebijakan sekolah bebas SPP melalui dana BOS untuk setiap jenjang, dari hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa setiap jenjang sudah ada penanggung jawab pelaksanaan kebijakan publik dana BOS baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun dari Tim BOS sekolah yang berjalan secara sistematis dan terstruktur.

Dari beberapa hasil analisa peneliti terhadap beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal struktur birokrasi yang terpengaruhi oleh kebijakan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Semua sekolah tiap jenjang sudah memiliki penanggung jawab pelaksanaan kebijakan publik pelaksanaan dana BOS
2. Sudah ada mekanisme penyaluran dana BOS untuk kebijakan publik pelaksanaan dana BOS sesuai dengan SOP Juknis BOS
3. Sudah ada pedoman dalam pelaksanaan program BOS sesuai dengan Juknis BOS
4. Tidak ada fragmentasi yang besar disebabkan intruksi langsung turun dari

pusat dan diakses secara online.

## **5.2.1. IMPLEMENTASI PELAKSANAAN DANA BOSKAB DI SMPN 1**

### **GONDANGLEGI**

#### **5.2.1.1. MEKANISME PENYALURAN DANA BOSKAB MALANG**

Salah satu wujud pelaksanaan Pasal 34 ayat 3 Undang - Undang tersebut, serta untuk mendukung program pendidikan menengah universal dan Rintisan Wajib belajar 12 tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA ) Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Mohammad Baihaqqi selaku kepala sekolahpun berpendapat :

Mekanisme pencairan BOSKAB Malang di mulai dari sekolah mengirimkan data siswa melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dari situlah data diverifikasi jumlah siswa di sekolah sebagai penetapan alokasi dana BOSKAB tiap sekolah selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menetapkan alokasi dana BOSKAB tiap sekolah dalam surat keputusan Kepala Dinas Kabupaten Malang setelah itu, Dinas Pendidikan mengirimkan keputusan alokasi dana BOSKAB tiap sekolah kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kabupaten Malang sebagai dasar pencairan dana BOSKAB kepada masing-masing sekolah ketika setelah turun SK Dari bupati Malang melalui BPKAD Kabupaten malang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) menyalurkan dana BOSKAB ke rekening masing-masing sekolah atas nama sekolah penerima BOSKAB besaran yang bantuan BOSKAB yang di berikan yakni Rp. 28.200,00 (dua

puluh ribu dua ratus rupiah) untuk setiap siswa per bulan selama 1 (satu) yang terdiri dari :

1. Untuk biaya operasional pembelajaran sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap siswa per bulan selama 1 (satu) tahun;
2. Untuk tambahan makanan sehat sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap siswa per paket sebanyak 36 kali selama 1 (satu) tahun;
3. Untuk tambahan nutrisi susu sebesar Rp. 3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) setiap siswa per paket sebanyak 36 kali selama 1 (satu) tahun;

Selaras dengan pendapat kepala sekolah, operator sekolah pun berpendapat :

Staf karyawan dan dewan guru semuanya mulai melakukan penyusunan berkas pengajuan BOSKAB yang diantaranya meliputi data siswa pada tahun tersebut, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah nantinya. Kemudian kebutuhan dana BOS tersebut di susun juga terkait dengan sumber danannya dan berapa angka yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhannya semua itu. Tentunya penyusunan kebutuhan ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sekolah selama satu tahunnya. Pada lembar pembuktian kebutuhan dana BOS ini pada rencana kegiatan dan anggaran sekolah.

Komite sekolah pun berpendapat selaku anggota yang menyusun Kebutuhan sekolah yang mengemukakan :

Semua anggota yang di berikan SK oleh kepala sekolah dalam menyusun rancangan belanja sekolah turut ikut andil dalam mensukseskan implementasi Dana BOSKAB Malang

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori Goerge Edwards III.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mempersyaratkan adanya prakondisi yang harus dipenuhi agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik.

Selain itu Edwards juga berpendapat adanya beberapa hambatan utama yang

menyebabkan gagalnya implementasi. Terkait dengan kedua permasalahan tersebut

Edwards mengidentifikasi faktor-faktor atau variabel krusial dalam implementasi

kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-

kecenderungan, dan struktur birokrasi. Berikut disajikan penjelasan masing-masing

variabel tersebut dengan singkat.

#### 5.2.1.2. Komunikasi

Pelaksanaan Implementasi Program BOSKAB sesuai dengan Petunjuk Teknis

dari dinas pendidikan kabupaten Malang

Menurut kepala sekolah SMPN 1 Gondanglegi, pelaksanaan Implementasi

Program BOS sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS adalah :

“Ya tentu saja, pelaksanaan program BOS harus sesuai dengan petunjuk teknis BOS terbaru, yaitu tahun 2017. Dari mulai penetapan alokasi dana BOS sampai pertanggungjawaban penggunaan anggaran”. (Wawancara dengan Kepala sekolah SMPN 1 Gondanglegi)

Bendahara sekolah pun kut menambahi bahwasanya :

“Semua pelaksanaan program BOSKAB dari awal sampai akhir, memang harus berdasarkan petunjuk teknis BOSKAB tahun 2020. tanpa adanya petunjuk teknis sebagai panduan kami, kami akan mengalami kesulitan dalam implementasi program BOSKAB. Dari awal sampai membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran BOSKAB harus sudah berdasarkan petunjuk teknis BOSKAB terbaru” (Wawancara dengan Bendahara sekolah)

Analisa peneliti bahwa implementasi Program BOSKAB sesuai dengan

petunjuk Teknis BOS dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa

pelaksanaan program BOS sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis BOSKAB, oleh

karena itu dapat dikatakan bahwa implementasi program BOSKAB dilaksanakan

berdasarkan Juknis BOSKAB tahun 2020.

### 5.2.1.3. SUMBER DAYA

Selain komunikasi dalam implementasi kebijakan yang efektif juga memerlukan ketersediaan sumber daya yang memadai. Terkait dengan sumber daya, yang dimaksud oleh Edwards terkait Sumber daya meliputi: Staf yang mempunyai wewenang, informasi, dan fasilitas

#### 5.2.1.3.1. Staf Yang Mempunyai Wewenang

Pentingnya memiliki petugas yang diberi SK oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan bertujuan untuk memudahkan sekolah itu sendiri dalam mengelola Dana BOSKAB. Pengelolaan Dana BOSKAB sendiri harus dilakukan oleh orang yang benar-benar kompeten dalam bidangnya sehingga kemungkinan untuk terjadi kesalahan baik itu dalam operasional atau pengelolaan Dana BOSKAB sendiri bias diminimalisir. Berdasarkan wawancara dengan bendahara sekolah yang peneliti jadikan informan mengemukakan bahwa :

“Ya, saya memiliki SK dari Kepala Sekolah sebagai Bendahara BOS terhitung tahun pelajaran 2017/2018”. (Wawancara dengan Bendahara BOSKAB SMPN 1 Gondanglegi)

Dari pernyataan informan peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap sekolah yang menerima Dana BOSKAB SMPN 1 Gondanglegi sudah memiliki petugas yang diberikan SK sesuai dengan juknis yang ada.

Menurut Kepala Sekolah SMPN 1 Gondanglegi, bahwa ada Petugas yang memperoleh SK berdasarkan struktur yang ada di Juknis BOSKAB adalah :

“Setiap kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan pengelolaan dana BOSKAB, ya tentu saja saya memberikan SK kepada para petugas sesuai dengan Juknis BOSKAB”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Gondanglegi)

Dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi keterangan peneliti mewawancarai bendahara sebagai Informan selanjutnya dengan mengatakan hal yang sama yakni :

“SK selalu diberikan jika ada kegiatan yang dilakukan sekolah kepada guru sebagai tugas tambahan, begitu pula dengan petugas BOS sudah sesuai dengan struktur yang ada pada Juknis BOS”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Gondanglegi)

Analisa peneliti bahwa ada Petugas yang memperoleh SK berdasarkan struktur yang ada di Juknis BOS, dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semua petugas memperoleh SK sesuai struktur yang ada pada Juknis BOS

#### **5.2.1.3.2. Sosialisasi Informasi dalam Pelaksanaan Program BOSKAB Malang**

Sumber daya yang penting kedua adalah informasi. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang terkait dengan bagaimana cara melaksanakan program kebijakan sebagaimana diarahkan. Jika program kebijakan itu berupa hal-hal yang baru dan berteknologi tinggi, maka akan menyulitkan untuk mencari orang yang bisa melaksanakan kebijakan, maka perlu adanya sosialisasi informasi yang dilakukan oleh dinas terkait, seperti penuturan narasumber yang mengatakan :

Menurut mohammad baihaqi selaku kepala sekolah SMPN 1 Gondanglegi, bahwa ada pengawas yang mengawasi pelaksanaan program BOSKAB Malang sebagaimana yang penuturanya :

“Ya, ada sosialisasi informasi yang dilakukan, baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan juga oleh Inspektorat Kabupaten Malang”.

Sedangkan menurut bendahara sekolah yaitu :

“Ada sosialisasi informasi yang mengawasi pelaksanaan Program BOSKAB Malang



yang dilakukan kepada sekolah kami oleh dinas terkait”. (Wawancara dengan Bendahara BOSKAB MALANG SMPN 1 Gondanglegi )

Ketika sudah selesai dalam penyusunan RKAM dan RAPBS, kepala sekolah dan komite mengamini dengan memberi tanda tangan dan stempel atas pembuktian bahwa untuk mengetahui kepala sekolah dan komite sekolah. Seperti penuturan kepala operator dan TU sekolah berikut :

“Komite sekolah dan kepala sekolah Mengetahui dikarenakan setiap pengeluaran dana yang ada penggunaan dana BOS selalu ditanda tangani juga oleh komite sebagai pihak yang mengetahui secara administrasi dari surat persuratan dengan disaksikan oleh walimurid”.

Melalui triangulasi sumber dalam keabsahan datanya peneliti mewawancarai komite sekolah dan salah seorang walimurid Seperti penuturan salah seorang walimurid yang mengatakan :

Sedangkan menurut Komite sekolah yaitu :

“Tentu, ada sosialisasi informasi dalam pelaksanaan BOSKAB Malang baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan juga oleh Inspektorat Kabupaten Malang”. (Wawancara dengan Komite sekolah SMPN 1 Gondanglegi)

Salah seorang wali murid juga menambahi bahwasanya :

“ semua Walimrid di undang setiap satu semester sebagai pengawal dana BOSKAB sampai dan digunakan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah Bersama dengan komite sekolah dan kebanyakan wali murid yang dapat ikut dalam kegiatan penyaluran dana BOS adalah orang tua peserta didik yang sudah di pilih oleh sekolah”.

Analisa peneliti bahwa komite sekolah,kepala sekolah serta walimurid mengetahui pengelolaan dana BOSKAB dengan bertindak sebagai penyampai informasi dari dinas pendidikan menurut juknis yang berlaku dalam penyusunan dan pengelolaan dalam pengelolaan dana BOSKAB SMPN 1 Gondanglegi agar sesuai yang di rencanakan Bersama penyerahan Dana BOSKAB Sudah Sesuai Dengan

Pedoman BOSKAB seperti yang disampaikan oleh dinas terkait Yakni di peruntukkan kepada siswa miskin dan tidak mampu.

#### 5.2.1.3.3. Fasilitas

Menurut Edwards, sumber daya yang tak kalah penting berikutnya adalah ketersediaan sarana atau fasilitas fisik berupa peralatan, insentif, dan bahkan tempat yang nyaman. Tanpa adanya fasilitas-fasilitas tersebut maka implementasi juga tidak akan berjalan dengan baik. Namun penyediaan fasilitas ini tidaklah mudah karena memerlukan dana yang cukup besar, selain juga kadang-kadang penyediaan fasilitas berupa sarana gedung justru mendapat tentangan dari masyarakat sendiri.

Seperti penuturan kepala sekolah yang menyampaikan :

“petugas yang berwenang di bekal sebuah laptop agar bisa mengerjakan pengajuan dan pelaporan pertanggung jawaban kepada dinas terkait karena BOSKAB hanya di peruntukkan kepada siswa kurang mampu akan tetapi ketika dirasa kurang mencukupi dalam membantu siswa yang kurang mampu maka sekolah-sekolah di kabupaten malang ini membagi dana setara dengan jumlah siswa yang di ajukan untuk mencukupinya dikarenakan harga yang besar dan ada tambahan seperti pembelian buku penunjang belajar.

Selaras dengan pendapa kepala sekolah, bendahara sekolah yang menyampaikan :

“Alhamdulillah, Kami dibekali laptop yang sesuai dalam mengerjakan perencanaan,pengelolaan sampai pertanggungjawaban dana BOSKAB oleh sekolah serta diberikan tunjangan insentif yang sesuai dengan kinerja kita agar nantinya tidak mempengaruhi jumlah besaran Dana BOSKAB yang ada.

Analisa peneliti bahwa SMPN 1 Gondanglegi membekali sebuah laptop bagi tim teknis khusus untuk mengerjakan pengelolaan dana BOSKAB, Sehingga pengerjaan pengelolaan dan pemanfaatan dana BOSKAB tepat sasaran sesuai dengan juknis BOS tahun 2020, serta memberikan insentif bagi tim teknis BOS atau

yang terlibat dalam pengerjaan realisasi dana BOSKAB agar nantinya tidak mempengaruhi jumlah besaran Dana BOSKAB yang ada.

#### 5.2.1.4. Disposisi

Faktor ketiga yang memiliki konsekuensi besar bagi implementasi adalah disposisi atau bisa disebut kecenderungan. Kecenderungan atau disposisi yang digambarkan Edwards lebih mengarah pada sikap/respon pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Menurut penanggung jawab BOSKAB Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang Terkait komitmen pemerintah menyediakan dana BOSKAB untuk sekolah gratis bagi siswa kurang mampu sesuai dengan pedoman (BOSKAB) adalah :

“Tentu saja, pemerintah selalu berkomitmen bahwa dana BOSKAB sebagai wujud program sekolah gratis bagi siswa tidak mampu dalam memnuntaskan wajib belajar 12 tahun dilaksanakan harus berdasarkan pedoman BOSKAB Ya, karena sudah komitmen pemerintah, bahwa dana BOSKAB harus dilaksanakan harus berdasarkan pedoman BOSKAB yang sudah diberikan kepada semua sekolah penerima dana BOSKAB”.

Sedangkan Perwakilan dari kepala sekolah SMPN 1 Gondanglegi yang menjelaskan :

“Ya, semua kegiatan harus memiliki pedoman oleh karena itu program BOSKAB yang merupakan wujud sekolah gratis bagi siswa kurang mampu yang diprogramkan pemerintah daerah Kabupaten Malang harus sepenuhnya berdasarkan pedoman BOSKAB yang sudah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Malang”.

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa komitmen pemerintah daerah Kabupaten Malang menyediakan dana BOSKAB untuk sekolah gratis bagi siswa kurang mampu sesuai dengan pedoman (BOSKAB) dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Malang

dalam menyediakan dana BOSKAB untuk sekolah gratis bagi siswa kurang mampu sudah sesuai dengan komitmen yang tertuang pada pedoman (BOSKAB Malang)

#### 5.2.1.5. Struktur birokrasi

Edwards mengatakan bahwa struktur birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan dalam implementasi kebijakan.

Terdapat dua aspek utama dalam birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi

##### 5.2.1.5.1. Standard Operating Procedures (SOP)

SOP dapat menjadikan para pelaksana kebijakan menghemat waktu dalam menjalankan rutinitas sehari-hari terutama dalam menangani masalah-masalah biasa sehari-hari dan menjamin adanya keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan oleh sekolah yang berbeda-beda. Selain itu, SOP dapat menghemat sumber daya. Dengan kata lain, dengan adanya SOP sumberdaya manusia yang terbatas dapat mengimplementasikan kebijakan.

Seperti pada penuturan kepala sekolah yang menyampaikan :

“Penargetan dana BOSKAB menggunakan RKAS (Rencana kegiatan dan anggaran sekolah). Staf karyawan dan dewan guru semuanya mulai melakukan penyusunan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa nantinya. Dengan mengacu data siswa yang terdaftar di DAPODIK Kemudian kebutuhan dana siswa yang di usulkan kepada BOSKAB Malang tersebut di susun juga terkait dengan sumber danannya dan berapa angka yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhannya semua itu. Tentunya penyusunan kebutuhan ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan Siswa selama satu tahunnya yang dibayarkan melalui rekening sekolah.

Jadi satu tahun dicek dua kali perubahan data tersebut. Data inilah yang digunakan untuk dijadikan sumber dana BOSKAB dan kegiatan lainnya. Alokasi dana BOSKAB satu siswa mendapatkan dana BOSKAB sebesar Rp. 535.200 setiap tahunnya Terdiri atas :

1. Untuk biaya operasional pembelajaran sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap siswa per bulan selama 1(satu) tahun
2. Untuk tambahan makanan sehat sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap siswa per paket sebanyak 36 kali selama 1 (satu) tahun
3. Untuk tambahan nutrisi susu sebesar Rp. 3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) setiap siswa per paket sebanyak 36 kali selama 1 (satu) tahun;
4. dan untuk mencairkan dana BOSKAB Malang perlu yang namanya pertanggung jawaban di sampaikan dalam bentuk dokumen seperti pemaparan kepala sekolah yang menyampaikan :

“Pelaporan penggunaan dana BOSKAB ini ditujukan pada Wali murid , guru, dinas Pendidikan kabupaten Malang, Pelaporan ditujukan kepada dinas Pendidikan kabupaten Malang dan pemerintah daerah kabupaten Malang pada akhir tahun Pertanggung jawaban dana BOS melalui hasil laporan kegiatan kemudian dicek dana tersebut dengan realisasi sumber dana untuk siswa kurang mampu, membuat buku kas pembantu, umum, pajak, serta ditambahi dengan bukti dokumen audit yang digunakan untuk mengarsipkan kebutuhan siswa yang sudah dibiayai. Baiknya data tersebut disimpan rapi sesuai dengan tanggalnya terjadi”.

Senada dengan pendapat kepala sekolah bendahara sekolahpun ikut menyampaikan :

“Pertanggung jawaban dana BOSKAB itu dilakukan secara rutin setiap dana BOSKAB mau dicairkan maka disitulah pihak sekolah, saya selaku operator membuat format untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOSKAB terhadap tersalurnya dana BOSKAB ini serta penggunaannya untuk siswa kurang mampu. Kami disini harus mempertanggung jawabkan dana BOSKAB dengan menggunakan laporan Berupa dokumen sesuai arahan pemerintah daerah kabupaten Malang melalui dinas Pendidikan kabupaten Malang Lama waktu untuk mengerjakan SPJ ini biasanya selama 1 Bulan,Isi dari SPJ ini sangat lengkap harus berisikan nota-nota pengeluaran biaya dari pengambilan dana BOSKAB”.

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwasanya secara birokrasi terkait SOP dana BOSKAB dengan menyusun berkas-berkas yang dibutuhkan seperti membuat SPJ,

dan berkas-berkas yang lain yang dibutuhkan dalam mencairkan dana BOSKAB, ketika berkas semuanya terkumpul, maka di serahkan kepada dinas pendidikan kabupaten malang yang nantinya akan di ajukan kepada pemerintah kabupaten Malang.

Setelah membuat SPJ secara tertulis maka membuat pertanggung jawaban di Online. Apabila mengururs pertanggung jawaban dana BOS secara online maka lebih ketat lagi dikarenakan harus memiliki bukti fisik lengkap dengan surat-surat keluar masuk perjalanan penggunaan pengeluaran dan penerimaan dana BOS itu sendiri.

#### 5.2.1.5.2. fragmentasi

adalah ketidaksamaan pandangan atau sikap di antara para pelaksana kebijakan pada level yang berbeda-beda. Menurut kepala dinas kabupaten malang, bahwa ada penanggung jawab pelaksanaan kebijakan sekolah gratis melalui dana BOSKAB untuk setiap jenjang adalah :

“Ada penanggung jawab pelaksanaan kebijakan sekolah gratis bagi siswa miskin melalui dana BOSKAB untuk setiap jenjang pendidikan mulai dari Tim BOSKAB Kabupaten/Kota dan Tim BOSKAB Sekolah”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang)

Senada dengan penuturan kepala sekolah yang menyampaikan bahwasanya :

“untuk pandangan yang berbeda sejauh ini tidak ada, dikarenakan intruksi dijalankan seara sistematis mulai dari dinas pendidikan kabupaten atau kota setempat Hingga ke sekolah, sehingga sangat minim atau bahkan tidak pernah terjadi perbedaan pandangan”.

Melalui triangulasi sumber yang disampaikan oleh bendahara sekolah yang menyampaikan bahwasasanya :

“biasanya dinas pendidikan kabupaten malang mengumpulkan semua bendahara sekolah yang berada dalam naunganya untuk mengikuti bimtek BOSKAB, dan

intruksinya sama dengan yang disampaikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Malang”.

Analisa peneliti tentang adanya penanggung jawab pelaksanaan kebijakan sekolah Gratis bagi siswa miskin melalui dana BOSKAB untuk setiap jenjang, dari hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa setiap jenjang sudah ada penanggung jawab pelaksanaan kebijakan publik dana BOSKAB baik dari tingkat kabupaten maupun dari Tim BOS sekolah yang berjalan secara sistematis dan terstruktur.

Dari beberapa hasil analisa peneliti terhadap beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal struktur birokrasi yang terpengaruhi oleh kebijakan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Semua sekolah tiap jenjang sudah memiliki penanggung jawab pelaksanaan kebijakan publik pelaksanaan dana BOSKAB
2. Sudah ada mekanisme penyaluran dana BOS untuk kebijakan publik pelaksanaan dana BOS sesuai dengan SOP Juknis BOSKAB
3. Sudah ada pedoman dalam pelaksanaan program BOS sesuai dengan Juknis juklak BOSKAB
4. Tidak ada fragmentasi yang besar disebabkan Adanya SOP dalam pelaksanaan BOSKAB Malang.

### **5.3.1. Faktor pendorong dan penghambat adanya kebijakan publik dana BOS**

Dalam implementasi kebijakan publik dana BOS pasti ada yang namanya faktor pendorong dan penghambat dari pengelolaan dana BOS.

#### **5.3.1.1. Faktor Pendorong**

Dalam hal ini peneliti menggali data terkait apa saja yang menjadi pendorong

bagi sekolah dalam mensukseskan pengelolaan dana BOS. Yang menjadi faktor pendorong disini antara lain :

#### 5.3.1.1.1. Terpenuhinya kebutuhan sekolah

Dengan adanya dana BOS sekolah tidak bingung lagi dalam pengelolaan sekolah seperti membayar gaji guru sukuan, membeli buku, membeli fasilitas penunjang pembelajaran dan lain-lain seperti pemaparan kepala sekolah yang menyampaikan :

“alhamdulillah mendukung selama ini faktor -faktornya seperti ini pemerintah lebih sadar dengan kebutuhan-kebutuhan sekolah yang harus dipersiapkan dengan dan bos ini sudah memberikan petunjuk Teknik tentang sosialisasi dan pengelolaan dana BOS ini sudah semakin mengerti bagaimana cara -caranya untuk menggunakannya. Kemudian faktor pendukung lainnya adalah terjalinnya hubungan baik antara guru, komite sekolah dan pengolah dana BOS, Guru juga mendukung terlaksananya dana BOS ini baik dari segi sumbangan tenaga dan uang, motivasi kerja yang lebih baik lagi dari sebelumnya dikarenakan sarana prasarana yang ada sudah baik”.

Senada dengan pendapat kepala sekolah, bendahara sekolah juga ikut menyampaikan bahwasanya :

“Dengan adanya dana bos ini sekolah SMPN 1 Gondanglegi tidak perlu bingung dalam memenuhi kebutuhan sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan”

Dari pemaparan implementor kebijakan publik dana BOS dapat peneliti simpulkan Dengan adanya dana BOS setiap tenaga pendidik dan kependidikan yang berada di SMPN 1 Gondanglegi merasa nyaman dalam bekerja dikarenakan fasilitas dalam pembelajaran sangat baik dan mudah untuk digunakan sehingga murid tidak monoton akan pembelajaran yang bervariasi dengan fasilitas sekolah, manfaat juga dirasakan oleh tenaga kependidikan yang senang dengan adanya dana BOS, pasalnya semua kebutuhan dalam pendataan dan pengerjaan dokumen sekolah mudah dalam mengerjakan dan cepat di selesaikan dengan adanya BOS ini.



### 5.3.1.1.2. Antusias Masyarakat Memilih Sekolah Gratis

Masyarakat sangat antusias sekali dan bersemangat dalam menyekolahkan anak-anaknya karena sekolah tidak lagi mahal seperti dulu dengan adanya dana BOS

Seperti penuturan kepala sekolah SMPN 1 Gondanglegi yang menyampaikan :

“Masyarakat sangat antusias dalam memilih sekolah gratis, harapan mereka walaupun sekolah gratis tetapi pembelajaran tetap harus berkualitas”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Gondanglegi)

Sedangkan menurut komite Sekolah SMPN 1 Gondanglegi yaitu :

“Dengan adanya sekolah gratis tentu saja masyarakat sangat berantusias untuk mengekolahkan anaknya dengan harapan hasilnya pun maksimal”. (Wawancara dengan Komite sekolah SMPN 1 Gondanglegi)

Sedangkan menurut salah seorang guru di sekolah SMPN 1 Gondanglegi yang menuturkan :

“Masyarakat sangat terbantu sekali dengan adanya sekolah gratis, masyarakat tinggal memikirkan transport dan peralatan sekolah”. (Wawancara dengan Guru SMPN 1 Gondanglegi)

Sedangkan menurut bendahara sekolah SMPN 1 Gondanglegi yaitu :

“Rata-rata masyarakat antusias menyambut adanya sekolah gratis dengan adanya bantuan BOS dari pemerintah”. (Wawancara dengan Komite Sekolah SMPN 1 Gondanglegi)

Dengan menggunakan triangulasi sumber dalam keabsahan datanya peneliti mencoba mewawancarai salah seorang walimurid yang mengatakan :

“Alhamdulillah sekarang sekolah tidak semahal dulu kami sangat senang dengan adanya dana BOS ini tetapi ketika ada yang dirasa pengadaan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan dana BOS kami saya masih ditarik iuran dengan musyawarah bersama terkait nominalnya”.

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa antusias masyarakat memilih sekolah gratis dari hasil wawancara di atas dapat

dikemukakan bahwa masyarakat memiliki antusias yang tinggi memilih sekolah gratis. sehingga tidak ada alasan bagi orangtua untuk tidak menyekolahkan anaknya.

Tetapi ketika dalam pengadaan atau pembaharuan fasilitas yang memang tidak ada di rancangan dana BOS, Walimurid dikumpulkan dalam sebuah rapat bersama untuk menyepakati iuran bersama dalam membantu sekolah.

### **5.3.1.1.3. Kondisi Angka Putus Sekolah dapat ditekan Setelah Adanya Program BOS**

Menurut kepala sekolah, bahwa kondisi angka putus sekolah setelah adanya program BOS adalah :

“Semua siswa di SD Negeri Kadumerak 1 tidak ada yang putus sekolah, dan rata-rata lulus melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya” (Wawancara dengan Kepala Sekolah Sekolah SMPN 1 Gondanglegi)

Analisa peneliti bahwa kondisi angka putus sekolah setelah adanya program BOS dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa kondisi angka putus sekolah setelah adanya program BOS dapat ditekan.

Sedangkan menurut bendahara sekolah yaitu :

“Selama ini angka putus sekolah dengan adanya Program BOS bisa ditekan, tiap tahun rata-rata siswa lulus dan meneruskan sekolah ke SMP” (Wawancara dengan Bendahara Sekolah SMPN 1 Gondanglegi)

Senada dengan penuturan kepala sekolah, Komite sekolah Sekolah SMPN 1 Gondanglegi juga menyampaikan :

“Dengan adanya bantuan operasional sekolah angka putus sekolah dan tidak melanjutkan tidak ada, rata-rata siswa meneruskan ke tingkat berikutnya” (Wawancara dengan Komite Sekolah SMPN 1 Gondanglegi)

Sedangkan menurut guru di Sekolah SMPN 1 Gondanglegi yaitu :

“Program BOS sangat membantu menekan angka putus sekolah, semua siswa meneruskan sekolah ke tingkat SMP” (Wawancara dengan guru Sekolah SMPN 1 Gondanglegi)

Analisa peneliti bahwa kondisi angka putus sekolah setelah adanya program BOS dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa kondisi angka putus sekolah setelah adanya program BOS dapat ditekan. murid tidak merasa terbebani karena selalu ditagih uang SPP, orangtua juga dengan senang menyekolahkan anaknya. Sehingga angka putus sekolah bisa dikurangi dengan adanya kebijakan publik dana BOS.

#### **5.3.1.1.4. Dampak disekitar sekolah yang dirasakan dengan adanya kebijakan dana BOS**

Berkat adanya kebijakan publik dana BOS Semua Anak Yang Tinggal Di Sekitar Sekolah ikut merasakan manfaatnya dari pemerintah untuk Sekolah

Menurut kepala sekolah, bahwa semua anak yang tinggal di sekitar sekolah sudah merasakan manfaatnya dari pemerintah untuk Sekolah gratis tanpa SPP yang menyampaikan :

“Ya, rata-rata siswa yang bersekolah di SMPN 1 Gondanglegi adalah siswa yang tinggal di sekitar sekolah dikarenakan sistem zonasi yang pemerintah jalankan”. (Wawancara dengan Komite Sekolah SMPN 1 Gondanglegi)

Bendahara sekolah SMPN 1 Gondanglegi ikut menambahi dengan menyampaikan :

“Hampir semua siswa yang bersekolah di SD SMPN 1 Gondanglegi tinggal di sekitar lingkungan sekolah”. (Wawancara dengan Bendahara sekolah SMPN 1 Gondanglegi)  
Sedangkan menurut Komite sekolah yaitu :

“Tidak semua anak bersekolah di sekitar tempat tinggalnya ada anak yang bersekolah ke SD yang lain”. (Wawancara dengan komite sekolah SMPN 1 Gondanglegi)

Sedangkan menurut salah seorang walimurid yaitu :

“Ada saja anak yang bersekolah di sekolah lain selain sekolah yang berada di lingkungan tempat tinggalnya, karena factor kualitas sekolah”. (Wawancara dengan walimurid sekolah SMPN 1 Gondanglegi)

Analisa peneliti bahwa semua anak yang tinggal di sekitar sekolah sudah terserap oleh sekolah dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa semua anak yang tinggal di sekitar sekolah sudah terserap oleh sekolah dan ikut merasakan manfaat dari indahnya sekolah berkat dana BOS akan tetapi ada juga anak yang bersekolah ke sekolah lain entah karena nilainya yang tidak mencukupi untuk bersekolah di SMPN 1 Gondanglegi atau lebih cocok dengan sekolah lain yang disukainya.

#### 5.3.1.2. Faktor Penghambat

Dalam hal ini peneliti menggali data terkait apa saja yang menjadi penghambat bagi sekolah dalam mensukseskan pengelolaan dana BOS. Yang menjadi faktor penghambat disini antara lain :

##### 5.3.1.2.1. Waktu Pencairan Dana Bos

Dalam proses realisasi alokasi dana BOS sering kali mengalami terlambat dalam pencairannya seperti penuturan kepala sekolah sebagai berikut :

“cair dananya ini sangat lama tidak sesuai dengan juknis waktu yang ditentukan sehingga sekolah bingung mencari hutang dalam menutupi keterlamabatan pencairan dana BOS”

senada dengan bendahara yang menuturkan :

“dana BOS yang keluar tidak cair atau lambat cairnya atau bahkan dana BOS tersebut keluar tidak sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya di berikan sehingga sekolah kewalahan menutupi hal ini dikarenakan dana sangat penting untuk menjalankan sekolah”

komite sekolah juga menambahkan dengan menuturkan :

“Adanya keterlambatan pencairan dana BOS yang tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan menyebabkan terhambatnya kegiatan sekolah seringkali sekolah meminjam uang kepada komite sekolah untuk menutupi kekurangan tersebut”  
(Wawancara komite sekolah)

Dengan menggunakan triangulasi sumber, peneliti mewawancarai bendahara sekolah yang menyampaikan :

“Ketika terjadi masalah keterlambatan pencairan dana BOS kami selalu meminta tolong kepada komite untuk mau meminjamkan uang agar pelaksanaan pendidikan tetap berjalan”.

Analisa peneliti tentang waktu pencairan dana BOS dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa pencairan dana BOS yang sering terjadi tidak tepat waktu tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan sehingga mengakibatkan sekolah bingung mencari dana talangan dalam menutupi kekurangan dalam menjalankan sekolah secara optimal.

#### **5.3.1.2.2. Pembelajaran pada masa Pandemi covid 19**

Menghadapi munculnya wabah covid-19 di belahan bumi , sistem pendidikan pun mulai mencari suatu inovasi agar pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih adanya surat edaran no 4 tahun 2020 dari menteri pendidikan dan kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan.

Dengan adanya surat edaran tersebut mau tidak mau sekolah harus menyediakan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan penyediaan protokol kesehatan itulah sekolah mulai bingung dalam pengadaanya, karena pengadaan protokol kesehatan tidak ada di dalam RKAM yang sudah di susun pada tahun kemarin, sehingga sekolah bingung dalam mengoptimalkan pembiayaan

sekolah seperti pada penuturan kepala sekolah yang mengatakan :

“dengan adanya wabah Corona seperti sekarang ini maka, dana bos dari pusat harus diputar sedemikian rupa untuk dipakai dan diubah. Kegunaan RKAS turunnya sering lambat tidak sesuai dengan tahapan turunnya cara mengatasinya adalah dengan dinas Pendidikan kabupaten malang mulai menghimbau dan memberikan jeda untuk merubah kebutuhan -kebutuhan yang dipakai oleh dana tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan sekolah seperti mengikuti perlombaan namun dikarenakan tidak ada maka untuk mencukupi kebutuhan membeli hand sanitizer”.

Selaras dengan yang dikatakan oleh bendahara sekolah yang menuturkan :

“Karena adanya edaran dari mentri pendidikan sekolah kita wajib menyediakan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, pengadaan masker, termogun, serta disinfectan agar terhindar dari virus covid-19 dan yang pasti tidak murah harganya.

Komite sekolah pun ikut menambahi dengan mengungkapkan :

“Peserta didik,pendidik maupun tenaga kependidikan harus selalu aman terhindar dari virus covid-19 maka dari itu saya mengusulkan kepada kepala sekolah untuk pengadaan protokol kesehatan supaya pembelajaran aman dan nyaman”.

Analisa peneliti tentang hambatan yang dialami penggunaan dana BOS untuk Pembelajaran pada masa Pandemi covid 19 ialah banyak kebutuhan dari sekolah yang teralihkan dan di cancel dengan diganti dengan pembelian protokol kesehatan seperti biaya ikut lomba untuk siswa diganti membeli hand sanitizer atau biaya peningkatan kualitas guru diganti dengan pengadaan tempat cuci tangan sehingga pengeluaran sekolah dengan alokasi dana BOS pun ikut membengkak yang mengakibatkan belum optimalnya penggunaan BOS untuk pembaharuan sarana dan prasarana sekolah secara maksimal serta banyak program sekolah yang mangkrak yang diakibatkan jumlah dana BOS yang semakin berkurang karena pengadaan protokol kesehatan yang tidak murah harganya.

#### **5.3.1.2.3. Kurangnya pengetahuan orangtua siswa tentang dana BOS**

Tidak sedikit walimurid yang belum memahami terkait dana BOS dikarenakan

minimnya informasi yang mereka dapatkan, mereka beranggapan dengan adanya dana BOS tidak ada lagi iuran dan pembayaran buku dalam proses belajar mengajar sehingga sering para orang tua dan walimurid mengajukan komplain kepada sekolah terkait pemanfaatan dana BOS. Seperti penuturan kepala sekolah yang menyampaikan:

“Kami pernah menerima pengaduan walimurid namun tidak sering dikarenakan minimnya informasi yang masuk kepada walimurid tersebut.tetapi saya langsung memberikan jawaban yang bisa diterima oleh walimurid”.

Selaras dengan pendapat kepala sekolah, komite sekolahpun ikut menuturkan bahwa :

“Tentunya pernah kami menerima pengaduan masyarakat, namun tidak sering saat itu dilaksanakan rapat Bersama dengan wali murid siswa mengenai dana BOS. Pada pertemuan dan rapat namun ada beberapa orang yang tidak setuju akan hasil penggunaan dana BOS Itu dikarenakan lebih baik digunakan untuk mendanai yang lainnya yang lebih penting dan membutuhkan dana secara cepat”.

Dalam pengaduan tersebut ada yang langsung mengatakan kepada kepala sekolah, tapi tidak sedikit pula ada juga walimurid yang menggunjingkan kepala sekolah di belakang dengan mengghibah terkait pengelolaan sekolah.seperti yang dikatakan oleh salah seorang guru yang pernah mendengar langsung ketika walimurid berkumpul sesama tetangga yang mengatakan :

“Saya pernah mendengar percakapan sesama walimurid yang menjelek-jelekan sekolah SMPN 1 Gondanglegi akan tetapi saya langsung menjelaskan kejadian yang sesungguhnya dan menyadarkan walimurid yan menerima kabar hoax terkait sekolah SMPN 1 Gondanglegi .saya meyakini masih banyak walimurid yang salah kaprah akan pemanfaatn dana BOS yang belum saya ketahui dari walimurid”.

Analisa peneliti tentang hambatan yang dialami penggunaan dana BOS dalam hal kurangnya pengetahuan orangtua siswa tentang dana BOS ialah sekolah pernah menerima pengaduan walimurid dikarenakan minimnya informasi yang masuk

kepada walimurid sehingga walimurid menilai sekolah belum bisa mengoptimalkan pengelolaan dana BOS. Ada juga yang salah persepsi terkait dana BOS, mereka menyangka dana BOS digunakan untuk menggratiskan semua biaya sekolah, tetapi pada realita yang terjadi tidak semua kebutuhan yang di beli dengan menggunakan dengan dana BOS seperti iuran untuk peremajaan gedung sekolah, atau pembaharuan fasilitas sarana dan prasarana dan lain-lain sehingga perlu adanya iuran siswa dalam pengadaanya. Yang memang diperuntukkan untuk siswa sendiri bukan untuk sekolah ataupun pribadi pejabat sekolah SMPN 1 Gondanglegi.

#### **5.3.1.2.4. Ada Campur Tangan Birokrasi Dalam Pengelolaan Dana BOS**

Pengelolaan dana BOS seharusnya disusun, dimanfaatkan dan di pertanggungjawabkan oleh sekolah akan tetapi adanya campurtangan birokrasi yang mengakibatkan terhambatnya pengelolaan dana BOS secara maksimal seperti penuturan kepala sekolah SMPN 1 Gondanglegi , Menurutnya, bahwa ada campur tangan birokrasi dalam Pengelolaan Dana BOS adalah :

“Ya selalu ada campur tangan birokrasi pemerintah setelah pencairan dana BOS, dengan mewajibkan membeli barang yang sudah ditentukan yang tidak sesuai dengan rencana skala prioritas” (Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Gondanglegi )

Sedangkan menurut Bendahara BOS SMPN 1 Gondanglegi yaitu :

“Ada campur tangan birokrasi pemerintah dengan mewajibkan sekolah membeli barang yang sudah ditentukan yang tidak sesuai dengan rencana skala prioritas” (Wawancara dengan Bendahara BOS SMPN 1 Gondanglegi )

Sedangkan menurut guru di SMPN 1 Gondanglegi yaitu :

“Ketika pencairan dana BOS birokrasi pemerintah selalu ikut terlibat dengan menyuruh sekolah membeli barang yang sudah ditentukan yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan” (Wawancara dengan Guru SMPN 1 Gondanglegi )



Sedangkan menurut komite sekolah SMPN 1 Gondanglegi yaitu :

“Adanya campur tangan birokrasi pemerintah dalam pengelolaan dana BOS dengan mewajibkan membeli barang yang tidak sesuai kebutuhan menyebabkan sekolah merubah kembali anggaran yang harus sesuai dengan skala prioritas” (Wawancara dengan Komite Sekolah SMPN 1 Gondanglegi )

Analisa peneliti tentang ada campur tangan birokrasi dalam Pengelolaan Dana BOS dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa terjadinya campur tangan birokrasi dalam Pengelolaan Dana BOS kerap kali terjadi dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah untuk membeli barang yang sudah ditentukan oleh pihak birokrasi, sehingga mengakibatkan belum optimalnya penggunaan dana BOS secara keseluruhan.

#### 5.4. Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2021 Pada Jenjang Pendidikan Sekolah menengah pertama kecamatan Gondanglegi dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Malang.

Masalah Program BOS wilayah kabupaten Malang yang berhubungan dengan pengelolaan dana BOS. Yang mana hasil wawancara dengan informan yang terkait dengan implementasi Program BOS di SMPN 1 Gondanglegi dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Malang.

Kebijakan publik yang sudah diimplementasikan dapat dinilai berhasil apabila tujuan dari kebijakan tersebut sudah tercapai dan tertuju pada titik sasaran yang sesuai dengan tujuan awalnya. Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah tahun 2021 Pada Jenjang Pendidikan Sekolah menengah pertama kecamatan

Gondanglegi dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Malang bisa berjalan dengan cukup baik karena faktor-faktor keberhasilan implementasi saling berkaitan satu sama lain. Selain karena hal tersebut, karakteristik kelompok sasaran juga mempengaruhi lama atau berhasil tidaknya implementasi bisa diterapkan.

#### 5.4.1. **Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah 2020 Pada Jenjang Pendidikan Sekolah menengah pertama kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang**

Berikut tahapan penyaluran dana BOS pusat seperti yang tertuang pada Permendikbud No 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Yaitu:

Menginput data rekening yang dimasukkan oleh sekolah ke Dapodik. Data dari Dapodik akan ditarik ke aplikasi BOS Salur untuk dilakukan verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan oleh Kemendikbud dan juga Bank.

Jika data sudah sama atau valid, tahap selanjutnya yakni mengirimkan data tersebut ke sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) untuk kemudian dilakukan proses pencairan.

Proses pencairan dana BOS harus menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana bisa diterima langsung oleh sekolah. Dana yang sudah masuk ke rekening sekolah bisa langsung dipergunakan untuk melaksanakan pengadaan barang jasa (PBJ) guna mendukung aktivitas belajar mengajar di sekolah.

Selanjutnya Dalam penelitian implementasi kebijakan publik, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kebijakan publik implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah 2021 Pada Jenjang Pendidikan Sekolah menengah pertama kecamatan Gondanglegi dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Malang. Dari teori yang dikemukakan oleh Tokoh Goerge Edwards III. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Kebijakan BOS yang dirumuskan pemerintah adalah peserta didik bisa sekolah tanpa kewajiban membayar apa pun baik untuk biaya investasi maupun biaya operasional sekolah. George C. Edwards III, 1980 (dalam Nugroho (2008:447) yaitu Faktor Komunikasi; Faktor Sumber Daya, Faktor Kecenderungan (Disposisi) dan Struktur Birokrasi.

Faktor Komunikasi terdiri dari Transmision (Adanya transmisi kebijakan dari Direktorat manajemen pendidikan dasar dan menengah tentang sekolah gratis melalui dana BOS), Clarity/kejelasan (adanya kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS), Consistency/ Konsisten. Faktor Sumber Daya terdiri dari Staff yaitu tersedianya pelaksana kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS, tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah yang menyelenggarakan sekolah gratis, Size (ukuran) yaitu Jumlah staf seimbang dengan pekerjaan mengelola dana BOS, Skill (keahlian) yaitu Pengelola bos memiliki skill sesuai dengan latar belakang pendidikannya, *Budgetary/Financial* (keuangan) Dana BOS, *Facility/Sarana* prasarana penunjang kegiatan pendidikan dan *Information and Authority* (informasi dan Kewenangan). Faktor Disposisi terdiri dari *Effect of Disposition* yaitu sejauh mana komitmen penanggung jawab sekolah gratis melalui dana BOS dan sitem mendukung pelaksanaan sekolahan gratis melalui dana BOS,

*Staffing The Bureaucracy* yaitu Penempatan staff yang memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS, *Incentives* yaitu danya insentif yang mempengaruhi perilaku pengelola sekolah gratis melalui dana BOS. Struktur Birokrasi terdiri dari *Fragmentation* yaitu adanya pembagian wewenang pelaksana kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS untuk tiap jenjang mulai dari pusat hingga daerah, Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yaitu adanya SOP dalam pelaksanaan kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS di kantor dinas.

Dari teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dapat menjelaskan mengenai implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah 2021 Pada Jenjang Pendidikan Sekolah menengah pertama tepatnya di SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang yang paparkan sebagai berikut.

#### 5.4.1.1. Komunikasi

Menurut Edwards (1980) persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Personil-personil pelaksana kebijakan harus ditentukan lebih dulu agar keputusan-keputusan kebijakan dapat diteruskan kepada orang yang tepat.

Dalam hal komunikasi yang terpengaruhi oleh kebijakan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa Pelaksanaan Implementasi Program BOS sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS dan sudah berjalan dengan baik, adanya sosialisasi BOS dari dinas terkait ke sekolah-sekolah dan masyarakat secara rutin, adanya petunjuk Teknis BOS yang di sebarakan ke setiap sekolah dan semua sekolah sudah memilikinya, adanya sosialisasi melalui Bintek pengelolaan BOS yang

dilakukan secara rutin, dan pemberian dana BOS ke sekolah dilaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis serta tidak terjadi penyimpangan.

Ada tiga faktor dalam komunikasi yang akan berdampak terhadap implementasi kebijakan, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

#### **5.4.1.1.1. Transmisi**

Ialah Ketika kebijakan telah diputuskan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan telah dibuat, menurut Edwards tidak serta merta proses di lapangan akan berlangsung sebagaimana mestinya. Berdasarkan wawancara, peneliti belum menjumpai adanya transmisi berat yang dirasakan oleh SMPN 1 Gondanglegi kabupaten Malang dikarenakan Program BOS sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS dan sudah berjalan dengan baik

#### **5.4.1.1.2. Konsistensi.**

Dalam hal ini adalah perintah tersebut tidak bertentangan. Pertentangan perintah akan menyulitkan pelaksana dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam hal konsistensi, SMPN 1 Gondanglegi tidak ada konsistensi terlalu berarti karena Pemberian dana BOS ke sekolah dilaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis serta tidak terjadi penyimpangan maupun pertentangan yang berat semuanya sudah sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 6 tahun 2021 tentang juknis pengelolaan dana BOS

#### **5.4.1.1.3. Kejelasan.**

Yang dimaksud dengan kejelasan menurut Edwards adalah kejelasan komunikasi dalam kebijakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi

yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Dalam hal Kejelasan informasi, SMPN 1 Gondanglegi sangat faham terkait juknis pengelolaan dana BOS dikarenakan adanya sosialisasi BOS dari dinas terkait melalui Bimtek pengelolaan BOS yang dilakukan secara rutin sehingga sangat jelas terkait perencanaan pengelolaan sampai pertanggungjawaban BOS tahun 2021

#### **5.4.1.2. Sumber-sumber**

Sumber-sumber yang dimaksud Edwards meliputi: Staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Staf yang diperlukan harus memadai baik dalam jumlah maupun kualifikasi untuk melaksanakan tugas. Sumber esensial yang kedua adalah informasi. Bentuk informasi yang dimaksud adalah *pertama*, informasi tentang cara pelaksanaan kebijakan. *Kedua*, informasi yang terkait dengan kesesuaian antara persyaratan dengan target-target kebijakan (individu maupun organisasi). Para pelaksana harus tahu apakah orang-orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan telah sesuai dengan ketentuan atau aturan-aturan pemerintah. Fasilitas yang dimaksud mencakup ketersediaan sarana-sarana fisik yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan.

##### **5.4.1.2.1. Staf yang mempunyai wewenang.**

Sumber yang paling utama dalam melaksanakan kebijakan adalah ketersediaan personil/staf. Jumlah staf yang memadai akan sangat mendukung pelaksanaan implementasi. Namun dikatakan oleh Edwards bahwa jumlah yang banyak saja belum cukup untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan yang baik, melainkan staf yang didukung dengan kompetensi dan kecakapan yang baik. Dalam hal sumber daya pada poin staf yang mempunyai wewenang yang terpengaruhi oleh kebijakan

dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa semua petugas yang mengelola BOS sudah berdasarkan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh sekolah dan ditandaangani oleh kepala sekolah, rata-rata sekolah sudah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai sesuai dengan jumlah siswa yang dimiliki, semua SK petugas pengelola BOS sudah berdasarkan struktur yang ada di Juknis BOS, tim teknis dimiliki oleh semua sekolah sesuai dengan Juknis BOS,

#### 5.4.1.2.2. Informasi.

Sumber penting yang kedua adalah informasi. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang terkait dengan bagaimana cara melaksanakan program kebijakan publik dana BOS sebagaimana diarahkan, dalam hal ini peneliti menjumpai penyampaian informasi yang dilakukan oleh kepala sekolah ialah dalam bentuk pengawasan, kepala sekolah mengawasi petugas memiliki SK pengelola BOS adalah mereka yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah, karena semua pengelola adalah guru yang diberi tugas tambahan dengan latar belakang akademik sebagai pendidik, kepala sekolah bersama komite sekolah mengawasi tim teknis BOS, akan tetapi, pada kenyataannya bukan hanya mengawasi saja, kepala sekolah serta komite sekolah juga membimbing dan memberikan informasi agar mengetahui apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan pengelolaan dana BOS dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa semua petugas pengelola BOS sudah mengetahui apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya sebagai pengelola BOS

#### 5.4.1.2.3. Fasilitas.

Menurut model George C. Edwards III, sumber-sumber penting berikutnya adalah ketersediaan sarana atau fasilitas fisik berupa peralatan, gedung, insentif, dan bahkan tempat yang nyaman. Tanpa adanya fasilitas-fasilitas tersebut maka implementasi juga tidak akan berjalan dengan baik. Dalam realitanya berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah bahwa SMPN 1 Gondanglegi membekali sebuah laptop bagi tim teknis khusus untuk mengerjakan pengelolaan dana BOS, Sehingga pengerjaan pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS tepat sasaran sesuai dengan juknis BOS tahun 2021, serta memberikan insentif bagi tim teknis BOS atau yang terlibat dalam pengerjaan realisasi dana BOS

Dalam hal ini senada dengan model Teori Mazmanian dengan Sebatier dalam (Tahir 2014:77) terkenal sebagai model yang berbentuk kerangka analisis implementasi. Implementasi ideal membutuhkan perangkat atau implementor untuk mengkondisikan agar lebih optimal dalam dilakukannya analisis pengimplmentasian

#### 5.4.1.3. Disposisi

Disposisi yang digambarkan mengacu kepada model George C. Edwards III yakni lebih mengarah pada sikap/respon pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan. Jika pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan maka mereka cenderung akan melaksanakan kebijakan seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, jika para pelaksana memiliki cara pandang atau sikap-sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka implementasi akan semakin kompleks. Pada umumnya, kebijakan dibuat dan



dilaksanakan oleh instansi lain (pembuat kebijakan bukan pelaksana kebijakan). Bagi pelaksana, ketidakterlibatan mereka dalam pembuatan kebijakan akan menimbulkan rasa netral (independent) terhadap kebijakan. Hal ini berpeluang semakin terbukanya interpretasi para pelaksana terhadap sebuah kebijakan

dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa pemerintah melalui sekolah sepenuhnya sudah berkomitmen dan sangat serius dalam menyediakan dana BOS untuk Pembiayaan sekolah sesuai dengan pedoman (BOS, para Pengelola BOS sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, program BOS sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat, kegiatan monitoring dan evaluasi dari pelaksana kebijakan sekolah bebas SPP melalui dana BOS dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan oleh dinas bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban BOS oleh sekolah ke dinas terkait, juknis insentif yang diperoleh oleh pelaksana kebijakan sekolah bebas SPP melalui dana BOS sudah tercantum dalam Juknis BOS.

#### 5.4.1.4. Sutruktur Birokrasi

Di dalam model George C. Edwards III yang mengatakan bahwa struktur birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan dalam implementasi kebijakan.

Dalam hal struktur birokrasi yang terpengaruhi oleh kebijakan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa setiap *jobdisk* sudah memiliki penanggung jawab pelaksanaan kebijakan sekolah bebas SPP melalui dana BOS, sudah ada mekanisme penyaluran dana BOS yang sesuai dengan SOP

untuk sekolah bebas SPP yang mengacu dengan Juknis BOS, sudah ada pedoman dalam pelaksanaan program BOS sesuai dengan Juknis BOS dan semua sekolah memiliki dokumen pelaporan penggunaan BOS ke berbagai pihak baik triwulan maupun tahunan

Terdapat dua aspek utama dalam birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi.

#### **5.4.1.4.1. Standard Operating Procedures (SOP)**

SOP dapat diartikan sebagai rutinitas atau prosedur baku yang ditaati oleh sebuah organisasi dalam menjalankan tugas-tugasnya yang telah disusun dengan mengacu kepada wawancara yang sudah dilakukan dapat peneliti simpulkan secara birokrasi terkait SOP dana BOS dengan menyusun berkas-berkas yang dibutuhkan seperti membuat SPJ, menyusun RKAM, dan berkas-berkas yang lain yang dibutuhkan dalam mencairkan dana BOS, ketika berkas semuanya terkumpul, maka di upload secara online melalui website yang sudah disediakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan serta melaporkan secara offline kepada dinas pendidikan kabupaten malang.

#### **5.4.1.4.2. Fragmentasi**

Adalah ketidaksamaan pandangan atau sikap di antara para pelaksana kebijakan pada level yang berbeda-beda dengan mengacu kepada wawancara yang sudah dilakukan dapat peneliti simpulkan secara birokrasi terkait fragmentasi yang terjadi bahwa Tidak ada fragmentasi yang besar disebabkan adanya penanggung jawab pelaksanaan kebijakan sekolah bebas SPP melalui dana BOS untuk setiap

jenjang, dari hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa setiap jenjang sudah ada penanggung jawab pelaksanaan kebijakan publik dana BOS baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun dari Tim BOS sekolah yang berjalan secara sistematis dan terstruktur dan secara langsung turun dari pusat, semuanya bisa diakses secara online.

Dalam hal ini sejalan dengan Model Matland yang mengatakan Literatur dari implementator memberikan petunjuk bahwasannya Top down dan bottom up mereka mempunyai pilihan studi banding dengan tipe -tipe yang berbeda dari kebijakan itu.

Top down lebih kepada kebijakan yang sangat jelas, apabila bottom up memfokuskan diri pada kebijakan yang memiliki tidak pasti lebih besar dan inheren untuk merumuskan kebijakan dibanding model top down.

### **5.5.1. Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Malang Tahun 2021 Pada Jenjang Pendidikan Sekolah menengah pertama kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang**

Sebagai salah satu wujud pelaksanaan Pasal 34 ayat 3 Undang - Undang dasar 1945, Secara umum program BOSKAB bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, serta meningkatkan mutu pada pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, diharapkan program BOSKAB juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standart pelayanan minimal sekolah penyaluran dana BOSKAB Malang yakni :

Dana BOSKAB dikelola oleh Tim Manajemen BOS Sekolah, yang terdiri dari unsur Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, dan unsur orang tua siswa di luar Komite

Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Pengelolaan BOSKAB oleh Tim Manajemen Sekolah dilakukan dengan ketentuan, sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data jumlah siswa yang ada;
2. Menyusun RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah;
3. Mengelola dana BOSKAB secara bertanggung jawab dan transparan;
4. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaannya di papan pengumuman sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Komite Sekolah;
5. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOSKAB yang diterimanya;
6. Melakukan pembukuan secara tertib;
7. Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOSKAB per semester sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan pemeriksaan (audit)
8. Membuat laporan tahunan yang diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Paling Lambat 5 Januari Tahun berikutnya

Selanjutnya Dalam penelitian implementasi kebijakan publik, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kebijakan publik implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah 2021 Pada Jenjang Pendidikan Sekolah menengah pertama

kecamatan Gondanglegi dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Malang. Dari teori yang dikemukakan oleh Tokoh Goerge Edwards III. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Kebijakan BOS yang dirumuskan pemerintah adalah peserta didik bisa sekolah tanpa kewajiban membayar apa pun baik untuk biaya investasi maupun biaya operasional sekolah. George C. Edwards III, 1980 (dalam Nugroho (2008:447) yaitu Faktor Komunikasi; Faktor Sumber Daya, Faktor Kecenderungan (Disposisi) dan Struktur Birokrasi.

#### **5.5.1.1. Komunkasi**

Di tinjau dari Faktor Komunikasi implementasi Program BOSKAB sesuai dengan petunjuk Teknis BOS dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan program BOS sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis BOSKAB, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa implementasi program BOSKAB dilaksanakan berdasarkan Juknis BOSKAB tahun 2020.

#### **5.5.1.2. Sumber daya**

Sedangkan bila Di tinjau dari Faktor Sumber daya terkait implementasi Program BOSKAB Edwards melihat dari tiga bagian yakni : Staf yang mempunyai wewenang, informasi, dan fasilitas

Dalam hal ini senada dengan model Teori Mazmanian dengan Sebatier dalam (Tahir 2014:77) terkenal sebagai model yang berbentuk kerangka analisis implementasi. Implementasi ideal membutuhkan perangkat atau implementor untuk mengkondisikan agar lebih optimal dalam dilakukannya analisis pengimplmentasian

#### 5.5.1.2.1. Staf yang mempunyai wewenang

Dalam katanya di jumpai ada Petugas yang memperoleh SK berdasarkan struktur yang ada di Juknis BOS, dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semua petugas memperoleh SK sesuai struktur yang ada pada Juknis BOS

#### 5.5.1.2.2. Informasi

Dalam hal Informasi pihak-pihak yang terlbat seperti komite sekolah, kepala sekolah serta walimurid mengetahui terkait pengelolaan dana BOSKAB dengan bertindak sebagai penyampai informasi dari dinas pendidikan menurut juknis yang berlaku dalam penyusunan dan pengelolaan dalam pengelolaan dana BOSKAB SMPN 1 Gondanglegi agar sesuai yang di rencanakan Bersama penyerahan Dana BOSKAB Sudah Sesuai Dengan Pedoman BOSKAB seperti yang disampaikan oleh dinas terkat Yakni di peruntukkan kepada siswa miskin dan tidak mampu.

#### 5.5.1.2.3. fasilitas

SMPN 1 Gondanglegi membekali sebuah laptop bagi tim teknis khusus untuk mengerjakan pengelolaan dana BOSKAB, Sehingga pengerjaan pengelolaan dan pemanfaatan dana BOSKAB tepat sasaran sesuai dengan juknis BOS tahun 2020, serta memberikan insentif bagi tim teknis BOS atau yang terlibat dalam pengerjaan realisasi dana BOSKAB agar nantinya tidak mempengaruhi jumlah besaran Dana BOSKAB yang ada yang memang khusus di peruntukkan kepada siswa yang kurang mampu.

### 5.5.1.3. DISPOSISI

Faktor ketiga yang memiliki konsekuensi besar bagi implementasi adalah disposisi atau bisa disebut kecenderungan. Kecenderungan atau disposisi yang digambarkan Edwards lebih mengarah pada sikap/respon pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa komitmen pemerintah daerah Kabupaten Malang menyediakan dana BOSKAB untuk sekolah gratis bagi siswa kurang mampu sesuai dengan pedoman (BOSKAB) dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam menyediakan dana BOSKAB untuk sekolah gratis bagi siswa kurang mampu sudah sesuai dengan komitmen yang tertuang pada pedoman (BOSKAB Malang)

### 5.5.1.4. Struktur birokrasi

Dalam mengimplementasikan kebijakan Terdapat dua aspek utama dalam struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi dalam hal ini harus bersifat top down seperti yang di katakan dalam model Model Matland yang mengatakan Literatur dari implementator memberikan petunjuk bahwasannya Top down dan bottom up mereka mempunyai pilihan studi banding dengan tipe -tipe yang berbeda dari kebijakan itu. Top down lebih kepada kebijakan yang sangat jelas, apabila bottom up memfokuskan diri pada kebijakan yang memiliki tidak pasti lebih besar dan inheren untuk merumuskan kebijakan dibanding model top down

#### 5.5.1.4.1. Standard Operating Procedures (SOP)

terkait SOP dana BOSKAB Malang Sudah Ada SOP yang jelas yang disampaikan oleh dinas pendidikan Kabupaten Malang yakni dengan menyusun berkas-berkas yang dibutuhkan seperti membuat SPJ, dan berkas-berkas yang lain yang dibutuhkan dalam mencairkan dana BOSKAB, ketika berkas semuanya terkumpul, maka di serahkan kepada dinas pendidikan kabupaten malang yang nantinya akan di ajukan kepada pemerintah kabupaten Malang.

Setelah membuat SPJ secara tertulis maka membuat pertanggung jawaban di Online. Apabila mengurus pertanggung jawaban dana BOS secara online maka lebih ketat lagi dikarenakan harus memiliki bukti fisik lengkap dengan surat-surat keluar masuk perjalanan penggunaan pengeluaran dan penerimaan dana BOS itu sendiri.

#### 5.5.1.4.2. Fragmentasi

Dalam hal struktur birokrasi yang namanya Fragmentasi sangat jarang di jumpai oleh peneliti jadi dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

5. Semua sekolah tiap jenjang sudah memiliki penanggung jawab pelaksanaan kebijakan publik pelaksanan dana BOSKAB
6. Sudah ada mekanisme penyaluran dana BOS untuk kebijakan publik pelaksanan dana BOS sesuai dengan SOP Juknis BOSKAB
7. Sudah ada pedoman dalam pelaksanaan program BOS sesuai dengan Juknis juklak BOSKAB
8. Tidak ada fragmentasi yang besar disebabkan Adanya SOP dalam pelaksanaan BOSKAB Malang



## **5.5.2. faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi pelaksanaan dana BOS**

### **5.5.2.1. faktor pendorong**

Yang menjadi pendorong bagi sekolah SMPN 1 Gondanglegi dalam mensukseskan pengelolaan dana BOS antara lain :

#### **5.5.2.1.1. Terpenuhinya kebutuhan sekolah**

Dengan adanya dana BOS setiap tenaga pendidik dan kependidikan yang berada di SMPN 1 Gondanglegi merasa nyaman dalam bekerja dikarenakan fasilitas dalam pembelajaran sangat baik dan mudah digunakan sehingga murid tidak monoton akan pembelajaran yang bervariasi dengan fasilitas sekolah, manfaat juga dirasakan oleh tenaga kependidikan yang senang dengan adanya dana BOS, pasalnya semua kebutuhan dalam pendataan dan pengerjaan dokumen sekolah mudah dalam mengerjakan dan cepat di selesaikan dengan adanya BOS ini

#### **5.5.2.1.2. Antusias Masyarakat Memilih Sekolah Gratis dan tidak akan kekurangan siswa**

Antusias masyarakat memilih sekolah gratis dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa masyarakat memiliki antusias yang tinggi memilih sekolah gratis. Sehingga tidak ada alasan bagi orangtua untuk tidak menyekolahkan anaknya.

Tetapi ketika dalam pengadaan atau pembaharuan fasilitas yang memang tidak ada di rancangan dana BOS, Walimurid dikumpulkan dalam sebuah rapat bersama untuk menyetujui iuran bersama dalam membantu sekolah.

### **5.5.2.1.3. Kondisi Angka Putus Sekolah dapat ditekan Setelah Adanya Program**

#### **BOS**

Kondisi angka putus sekolah setelah adanya program BOS dapat ditekan. Murid tidak merasa terbebani karena selalu ditagih uang SPP, orangtua juga dengan tenang menyekolahkan anaknya. Sehingga angka putus sekolah bisa dikurangi dengan adanya kebijakan publik dana BOS.

### **5.5.2.1.4. Dampak disekitar sekolah yang merasakan dengan adanya kebijakan**

#### **dana BOS**

semua anak yang tinggal di sekitar sekolah sudah terserap oleh sekolah dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa semua anak yang tinggal di sekitar sekolah sudah terserap oleh sekolah dan ikut merasakan manfaat dari indahnya sekolah berkat dana BOS akan tetapi ada juga anak yang bersekolah ke sekolah lain entah karena nilainya yang tidak mencukupi untuk bersekolah di SMPN 1 Gondanglegi atau lebih cocok dengan sekolah lain yang disukainya

### **5.5.2.2. Faktor Penghambat**

Dalam hal ini peneliti menggali data terkait apa saja yang menjadi penghambat bagi sekolah dalam mensukseskan pengelolaan dana BOS. Yang menjadi faktor penghambat disini antara lain :

#### **5.5.2.2.1. Waktu Pencairan Dana Bos**

Analisa peneliti tentang waktu pencairan dana BOS dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa pencairan dana BOS yang sering terjadi tidak tepat

waktu tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan sehingga mengakibatkan sekolah bingung mencari dana talangan dalam menutupi kekurangan dalam menjalankan sekolah secara optimal.

#### **5.5.2.2.2. Pembelajaran pada masa Pandemi covid 19**

hambatan yang dialami penggunaan dana BOS untuk Pembelajaran pada masa Pandemi covid 19 ialah banyak kebutuhan dari sekolah yang teralihkan dan di cancel dengan diganti dengan pembelian protokol kesehatan seperti biaya ikut lomba untuk siswa diganti membeli *hand sanitizer* atau biaya peningkatan kualitas guru diganti dengan pengadaan tempat cuci tangan sehingga pengeluaran sekolah dengan alokasi dana BOS pun ikut membengkak yang mengakibatkan belum optimalnya penggunaan BOS untuk pembaharuan sarana dan prasarana sekolah secara maksimal serta banyak program sekolah yang mangkrak yang diakibatkan jumlah dana BOS yang semakin berkurang karena pengadaan protokol kesehatan yang tidak murah harganya.

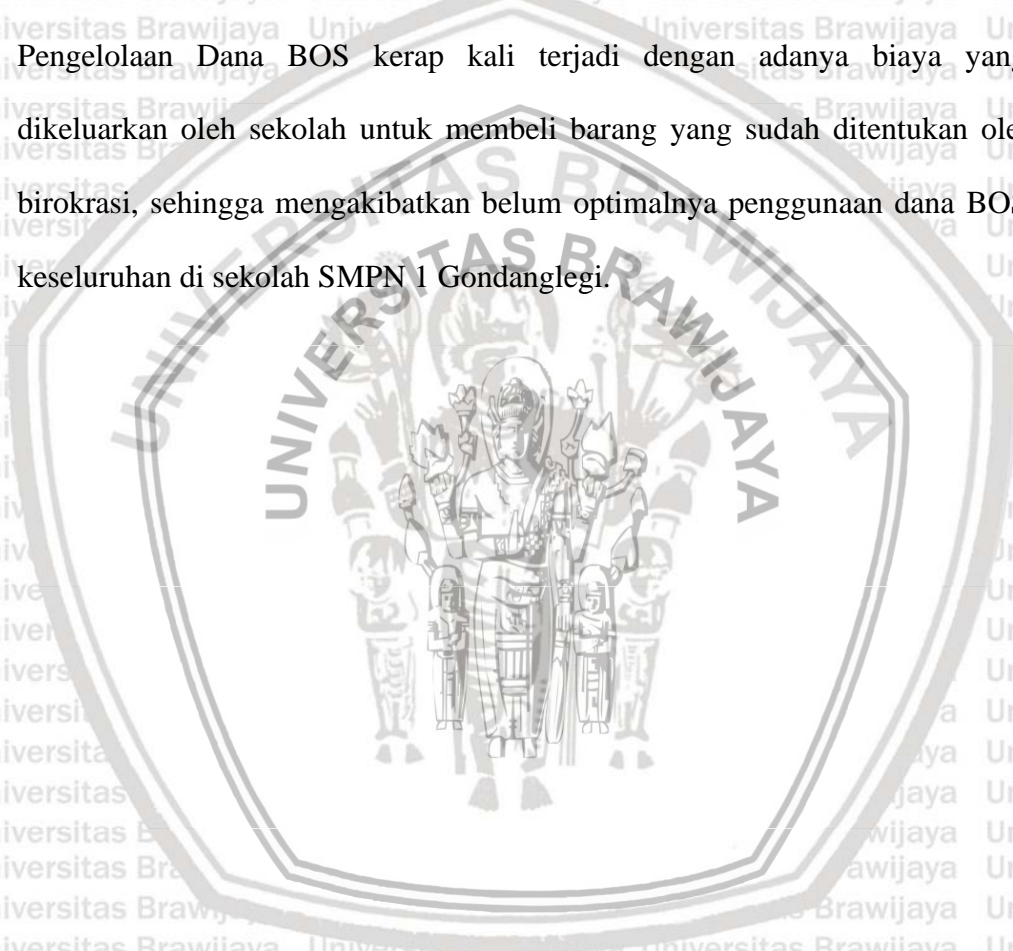
#### **5.5.2.2.3. Kurangnya pengetahuan orangtua siswa tentang dana BOS**

Hambatan yang dialami penggunaan dana BOS dalam hal kurangnya pengetahuan orangtua siswa tentang dana BOS ialah sekolah pernah menerima pengaduan walimurid dikarenakan minimnya informasi yang masuk kepada walimurid sehingga walimurid menilai sekolah belum bisa mengoptimalkan pengelolaan dana BOS. Ada juga yang salah persepsi terkait dana BOS, mereka menyangka dana BOS digunakan untuk menggratiskan semua biaya sekolah, tetapi pada realita yang terjadi tidak semua kebutuhan yang di beli dengan menggunakan dengan dana BOS seperti iuran untuk peremajaan gedung sekolah, atau pembaharuan fasilitas sarana dan prasarana dan lain-lain sehingga perlu adanya iuran siswa dalam

pengadaanya. Yang memang diperuntukkan untuk siswa sendiri bukan untuk sekolah ataupun pribadi pejabat sekolah SMPN 1 Gondanglegi.

#### 5.5.2.2.4. Ada Campur Tangan Birokrasi Dalam Pengelolaan Dana BOS

Pengelolaan dana BOS seharusnya disusun, dimanfaatkan dan di pertanggungjawabkan oleh sekolah akan tetapi campur tangan birokrasi dalam Pengelolaan Dana BOS kerap kali terjadi dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah untuk membeli barang yang sudah ditentukan oleh pihak birokrasi, sehingga mengakibatkan belum optimalnya penggunaan dana BOS secara keseluruhan di sekolah SMPN 1 Gondanglegi.



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. KESIMPULAN

Pada bab terakhir ini sudah dipaparkan tentang berbagai macam kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa temuan hasil pada penelitian lalu dijadikan kesimpulan untuk mengetahui bagaimana implementasi pada pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (bos) di SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang.

##### 6.1.1. Mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat, Yaitu:

Menginput data rekening yang dimasukkan oleh sekolah ke Dapodik. Data dari Dapodik akan ditarik ke aplikasi BOS Salur untuk dilakukan verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan oleh Kemendikbud dan juga Bank.

Jika data sudah sama atau valid, tahap selanjutnya yakni mengirimkan data tersebut ke sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) untuk kemudian dilakukan proses pencairan.

Proses pencairan dana BOS harus menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana bisa diterima langsung oleh sekolah. Dana yang sudah masuk ke rekening sekolah bisa langsung dipergunakan untuk melaksanakan pengadaan barang jasa (PBJ) guna mendukung aktivitas belajar mengajar di sekolah sedangkan penyaluran dana BOSKAB Malang yakni :

Dana BOSKAB dikelola oleh Tim Manajemen BOS Sekolah, yang terdiri dari unsur Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, dan unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Pengelolaan BOSKAB oleh Tim Manajemen Sekolah dilakukan dengan ketentuan, sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data jumlah siswa yang ada.
2. Menyusun RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah.
3. Mengelola dana BOSKAB secara bertanggung jawab dan transparan.
4. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaannya di papan pengumuman sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Komite Sekolah.
5. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOSKAB yang diterimanya.
6. Melakukan pembukuan secara tertib.
7. Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOSKAB per semester sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan pemeriksaan (audit).
8. Membuat laporan tahunan yang diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Paling Lambat 5 Januari Tahun berikutnya

**6.1.2.** Terdapat setidaknya tiga aspek yang mempengaruhi dalam aspek komunikasi semua itu akan memberikan berbagai macam dampak dalam pelaksanaan implementasi dalam mengelola kebijakan saat melakukan pengelolaan dana BOS ketiga aspek itu adalah, yaitu kejelasan, transmisi serta konsistensi. Sedangkan dalam penggunaan tekniknya untuk melaksanakan dana ini selalu mengacu kepada PERMENDIKBUD nomor 8 tahun 2020 yaitu berkaitan dengan juknis atau petunjuk Teknik BOS untuk sistem umum yang terdiri dari 1) petunjuk tentang penyusunan RKAM, 2) Mekanisme pencairan, 3) pelaporan pertanggungjawaban. pada aspek Sumber-sumber dalam implementasi dapat diamati melalui : 1) Staf yang mempunyai wewenang sebagai implementor dana BOS yang sah, 2) informasi yang didapatkan oleh implementor dana BOS, dan 3) fasilitas dimiliki guna menunjang suksesnya pengelolaan dana BOS. Dalam pelaksanaannya SMPN 1 Gondanglegi sangat serius dalam memaksimalkan dana BOS terlihat dalam proses pengerjaan pengelolaan dana BOS mulai dari pengajuan sampai pertanggungjawaban SMPN 1 Gondanglegi tidak pernah terlambat dalam pengerjaannya untuk melihat baik buruknya hubungan struktur birokrasi pengelolaan dana BOS di SMPN 1 Gondanglegi dapat diamati melalui dua aspek utama yaitu 1) *Standard Operating Procedures (SOP)* pelaksanaan dana BOS dan 2) fragmentasi yang terjadi diantara implementor pelaksanaan dana BOS yang dalam hal ini hampir tidak pernah terjadi karena pelaksanaan dana BOS berjalan secara sistematis dan terstruktur serta berjalan satu pintu dalam bersumber pada Juknis BOS tahun 2020.

**6.1.3.** Dalam proses implementasi bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang, terdapat faktor-faktor yang menghambat

jalannya implementasi pelaksanaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) faktor-faktor tersebut adalah : 1) Seringkali cairnya penggunaan dana BOS ini sangat lamban bahkan tidak sesuai dengan waktu untuk menggunakannya bisa disebut juga tidak sesuai jadwal dari pemerintah untuk menurunkan dana BOS dalam anggarannya untuk masing-masing sekolah dengan ketetapan sudah ditentukan, 2) Pandemi covid 19 mengakibatkan banyak kebutuhan dari sekolah yang teralihkan dan di tunda dengan digantikan pembelian protokol kesehatan, 3) kurangnya pengetahuan orangtua siswa tentang dana BOS yang membuat sekolah menerima pengaduan walimurid yang menilai sekolah belum bisa mengoptimalkan pengelolaan dana BOS yang menyebabkan tim pengelolaan BOS di SMPN 1 Gondanglegi patah semangat akan tetapi komite sekolah selalu memberikan semangat dan nasehat. 4) Adanya campur tangan birokrasi dalam Pengelolaan Dana BOS kerap kali terjadi dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah untuk membeli barang yang sudah ditentukan oleh pihak birokrasi, sehingga mengakibatkan belum optimalnya penggunaan dana BOS secara keseluruhan di sekolah SMPN 1 Gondanglegi. Selain terdapat faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan penggunaan dana BOS di SMP negeri 1 Gondanglegi, pada penelitian ini telah ditemukan aspek yang mendorong atau memberikan dukungan untuk proses jalannya implementasi pelaksanaan program bantuan operasional sekolah di sekolah SMPN 1 Gondanglegi.

Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah 1) Terpenuhinya kebutuhan sekolah Membuat minat anak untuk sekolah di SMPN 1 Gondanglegi 2) Dampak disekitar sekolah yang dirasakan dengan adanya kebijakan dana BOS 3) Kondisi Angka Putus Sekolah dapat ditekan Setelah Adanya Program BOS sehingga jumlah siswa stabil



dan jumlah dana BOS tetap stabil. 4) karena masa pandemi covid-19 banyak masyarakat yang bingung dalam pemenuhan kebutuhannya sehingga Masyarakat antusias dengan Memilih Sekolah Gratis. karena pengelolaan dana BOS di SMPN 1 Gondanglegi sesuai JUKNIS dan menggratiskan biaya SPP banyak orangtua yang ingin menitipkan anaknya untuk bersekolah di SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang.

## 6.2. SARAN

Melihat pada kesimpulan yang sudah di kemukakan dengan lengkap dan jelas seperti uraian yang ada pada bagian atas dari saran ini maka dapat dikatakan bahwa sarannya untuk umum dalam melaksanakan pengimplementasian pada program dana BOS ini di lokasi penelitian yang sudah peneliti laksanakan sudah melakukan pelaksanaannya dengan berpedoman pada standar minimum pelaksanaan seperti melihat pada capaian yang ada di panduan dana BOS namun masih sering ditemukan juga beberapa perlunya penyempurnaan sebaik mungkin agar konsep dan Teknik penggunaan dana BOS ini memiliki nilai lebih bermanfaat dan memiliki berbagai macam program yang maksimal. Spesifik mungkin berikut hasil dari penelitian terdapat berbagai macam saran dari peneliti yang bisa dijadikan saran untuk kedepannya agar digunakan dan dipahami berikut sarannya:

1. Untuk penyesuaian pada sistem pemberian target, mendata dan mengalokasikan dana BOS di SMP N 1 Gondanglegi masih membutuhkan cara untuk meningkatkan lebih dari sekarang secara optimal lagi misalnya menggunakan cara mencari potensi pada sumber daya yang tersedia dilingkungan sekolah saat ini. Pemberian dana BOS untuk

menerima program ini sudah terlaksana dengan baik target siswa yang mendapatkannya sudah baik secara umum pemberiannya harus dipertahankan seperti saat ini minimal. Hal ini dapat memberikan dampak untuk semua peserta didik baik dari kalangan berada dan miskin dapat mendapatkan dana ini dalam artian kontribusi dana ini dapat digunakan sehingga anak didik mendapatkan manfaat dari program keuangan pemerintah ini dan membantu meringankan kebutuhan peserta didik. Sistem yang seperti ini sangat sesuai pada peserta didik di buktikan dengan koleksi perpustakaan sekolah di lokasi penelitian yang semakin baik dan beragam untuk peserta didik

Namun perlu untuk dijadikan masukan bahwa dalam mendata pihak sekolah tidak cukup untuk mempunyai standarisasi tentang beberapa indikator dari peserta didik yang kurang berada dikarenakan jika ada standarnya maka siswa lain dari kalangan orang tua peserta didik bisa merasakan cemburu dikarenakan di sekolah tersebut banyak peserta didik yang memang membutuhkan dana bantuan itu. Manajemen untuk memutakhirkan data dalam menggunakan dan menerapkan penggunaan dana BOS ini masih membutuhkan bimbingan secara tekniknya untuk mendapatkan workshop secara lebih detail dan mengikuti zamannya secara lebih lanjut lagi dan dalam agar semakin menguasai secara teknologi dan tekniknya maka mendapatkan data akurat dan target dana BOS dapat dicapai.

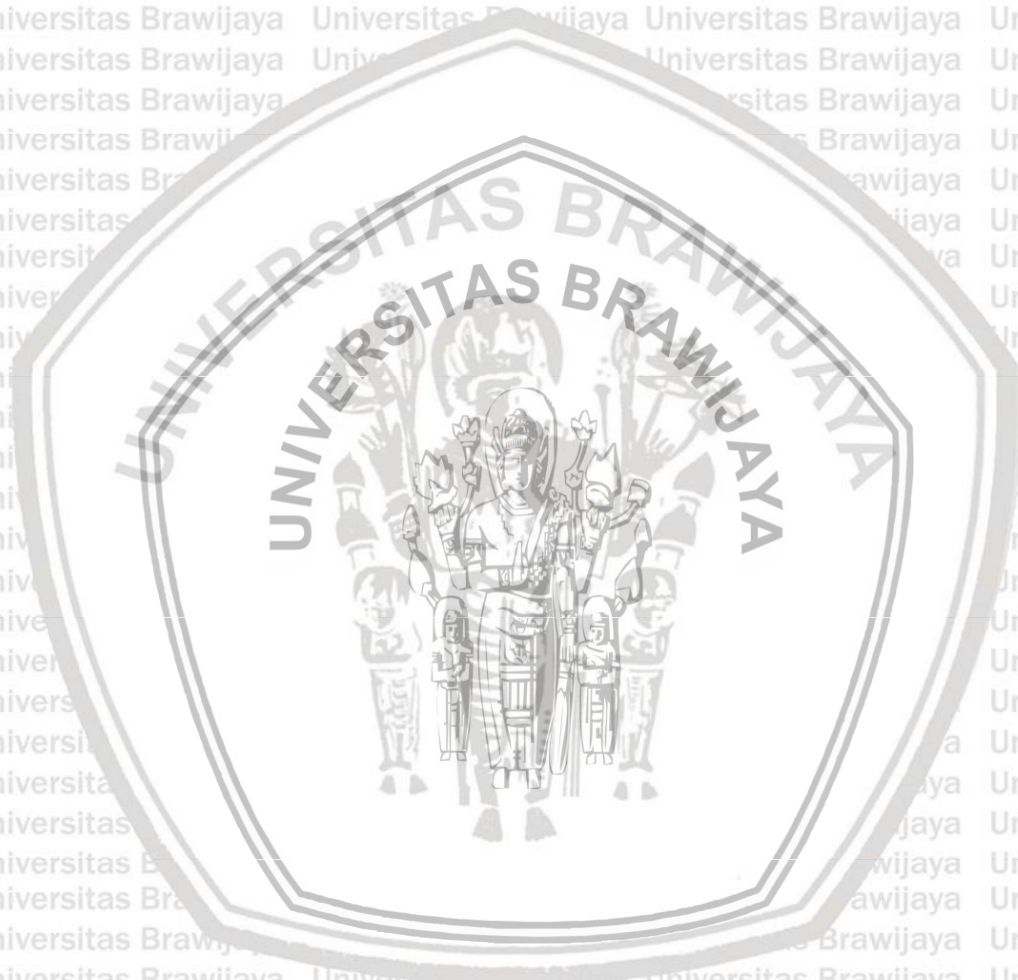
2. Proses untuk melakukan penyesuaian cara untuk menyalurkan , mengambil dan menggunakan dana ini masih harus dibenahi lagi. Paling utama adalah tentang Teknik untuk menunjuk beberapa instansi sebagai yang menyalurkan hal ini sudah sangat digunakan dengan cara yang terbuka juga sudah melaksanakan dengan transparan.

Kondisi seperti ini dapat memberikan berbagai macam pelayanan yang memudahkan cara untuk mengakses untuk sekolah. Lalu untuk menggunakan dana yang ada seharusnya pihak sekolah lebih transparan lagi dengan memberikan laporan yang detail dan mendapatkan tanggung jawab dari pihak monitoring dana bos dan disahkan kemudian disampaikan ke orangtua peserta didik. Jika diperlukan dapat juga merencanakan bahasan untuk membuat instansi yang menyalurkan dana BOS di wilayah misalnya pada bank Daerah bisa juga menjadi salah satu Lembaga yang tepat untuk dapat digunakan menyalurkan uang itu agar kemudahan penyaluran dana ini dapat terasa lebih efisien dan efektif.

3. Untuk program sosialisasi dana BOS di kabupaten Malang masih kurang perlu mendapat lebih banyak perhatian dari pemerintah yang ada, untuk menguasai penggunaan dana BOS ini secara nyata dan sukses menimplementasikan dana BOS yang ada. Bentuk itu bisa berbentuk pendirian sarana prasarana juga pendanaan untuk menginovasi mengembangkan sekolah dari uang RAPBD. Pemerintahan di kabupaten Malang dapat melaksanakan sosialisasi dan membentuk workshop pelatihan juga seminar yang rata untuk masing-masing sekolah. Masih kurangnya kontribusi wali murid dan masyarakat sekitar sekolah yang harus lebih memerdulikan lagi Pendidikan untuk memberikan citra yang sesuai dengan adanya dana BOS ini seperti menerima kehadiran dana ini. Dikarenakan jika dana bos ini sudah positif maka aspek lain pasti juga positif apalagi untuk kegiatan membangun bangsa.

4. Berikut faktor yang dapat mendukung pengimplementasian dana BOS di SMP negeri 1 Gondanglegi harus di tingkatkan agar dalam melaksanakannya program ini dapat didukung pengimplementasiannya. Sebaliknya dalam menanggapi aspek penghambat

pelaksanaan dana BOS ini dapat dijadikan bahan untuk mempertimbangkan serta  
mencarikan pemecahan masalah agar masalah yang ada tidak dibiarkan terus menerus  
agar proses pelaksanaan dapat terjadi sempurna untuk tahapan dana BOS berikutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung Alfabeta
- Arif Rohman, 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: Mediatama
- Arifin Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transaransi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung. Alfabeta.
- Badrudin. 2013. *Manajemen Peserta Didik (Bahan Ajar)*. PT. Indeks. Jakarta.
- Barsani, Muchran, Asri Jaya. 2018. *Analisis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Kualitas Kelengkapan Fasilitas Sekolah di SMP Negeri 3 Makassar*. Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Vol.2, No.2,
- Bungin, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
- Djafar, Chairil, Suparman. 2017. *Efektifitas pelaksanaan program dana BOS dalam meningkatkan prestasi belajar siswa SMP Negeri 1 Biromaru di Kabupaten Sigi*.
- Dunn, W.N. 2001. *Analisis kebijakan publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Dwijowijoto, 2014. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Elmizola, Fitriana dan Zaili Rusli. 2015. Efektivitas Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah pada Kegiatan Pembelajaran di SMPN 1 Tanjungsamak Kec. Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Online Mahasiswa*. Vol.2, No.2,
- Fattah, Nanang, 2012, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Fitri, Afriliana. 2014. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. Vol.2, No.1,

Grindle, M. S. 1980. *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton University Press. New Jersey.

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi*. Bogor

Hamdi. 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hasan, Iqbal, 2006. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara,

Hastyarini, Ega Rezky. 2015. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) Di SMA NEGERI 1 Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Tahun 2014*. S1 Thesis. Fakultas Ekonomi UNY.

Irawati, Muslimin Kara, Mustofa Umar. 2017. *Ketepatan Sasaran Dana BOS Bagi Siswa SMP Negeri Di Kota Makassar*. *Jurnal ASSETS*. Vol.8, No.1,

Irianto, Yoyon Bahtiar. 2011. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada

Islamy, M.Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) Terjemahan Ricky Ismanto*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada. LaksBang Mediatama

Mazmanian, D. A., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. Scoot, Foresman and Company. London.

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Muhaimin, 2010. *Manajemen Pendidikan : Aplikasinya dalam Penyusunan RKS/M*, Jakarta: Prenada Media.

Mulyadi .2015. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.

Nugroho, R. D. 2008. *Kebijakan publik (formulasi, implementasi, evaluasi)*. PT. Gramedia. Jakarta.

Nugroho. 2014. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta Bumi Aksara.

Oktasari Linda Duana. 2015. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Negeri 1 Perembun*. Yogyakarta. Universitas negeri Yogyakarta.

Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen, Santos H. Hernandez. 1997. *The Integration of Social Work Practice*. Wadsworth, Inc., California.

Parsons, Wayne. 1997. *Public Policy*. Edward Elgar. Cheltenham.

Perdana, Saka. 2016. Implementasi kebijakan Dana BOS di SD Negeri Bekelan, Kulonprogo. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*. Edisi 7, Vol.5, No.7,

Ratu, Semuel Mawa. 2013. *Pengelolaan Dana BOS pada SMP se-kecamatan Sa'dan kabupaten Toraja Utara*. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*. Vol.2, No.2.

Riant Nugroho, 2008. *Public Policy*, Jakarta: Alex Media Komputindo.

Rusdiana, H.A. 2015. *Kebijakan Pendidikan; dari filosofi ke implementasi*. Bandung; Pustaka Setia

Samodra Wibawa, (1994:79) *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis*, Cet.Ke-1, Jakarta: Intermedia

Solichin Abdul Wahhab, 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Modelmodel Implementasi Kebijakan Publik* Jakarta : PT Bumi Aksara 13220

AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta.Pustaka Pelajar.

Sugito. 2016. *Pelaksanaan program BOS di SMP Negeri 2 Sukorejo Kendal*. S2 Thesis. FKIP UKSW.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta. Bandung.

Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.

Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta.

Trisaputra, Yogi. 2013. *Analisis penggunaan dana BOS untuk peningkatan Kualitas Sekolah di SD Negeri Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir 9 Kabupaten Nagan Raya*. S1 Thesis. FISIP Universitas Teuku Umar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. 8 Juli 2003. Jakarta.

Van Mater, D. dan Van Horn, C.E. 1975. *The policy implementation process A conceptual framework. administration and society*. Sage Publication.

Wahab, S. A. 1997. *Analisis kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

Widodo. M.S. Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing





LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA PENANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN

1. Identitas Informan

Nama : .....

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Jabatan : .....

Alamat : .....

2. Pertanyaan Penanggung Jawab / Ketua Tim BOS Dinas pendidikan :

a. Bagaimana peran penanggungjawab dana BOS dinas pendidikan terhadap penyaluran dana BOS ?

b. Bagaimana mekanisme penargetan, pendataan, dan alokasi dana BOS ?

c. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?

d. Bagaimana mekanisme penyaluran, pengambilan, penggunaan, Serta pertanggung jawaban Dana BOS ?

e. Ditujukan kesiapakah pertanggungjawaban Dana BOS ?

f. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS Dan bagaimana mengatasi hambatan tersebut ?

KOMUNIKASI

Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?

Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?

STRUKTUR BIROKRASI

Bagaimana mekanisme penyaluran, pengambilan, penggunaan, Serta pertanggung jawaban Dana BOS ?

Ditujukan kesiapakah pertanggungjawaban Dana BOS ?

SUMBERDAYA

Bagaimana peran penanggungjawab dana BOS dinas pendidikan terhadap penyaluran dana BOS ?

DISPOSISI

Bagaimana mekanisme penargetan, pendataan, dan alokasi dana BOS ?

Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS

Dan bagaimana mengatasi hambatan tersebut ?

**PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH**

**1. Identitas Informan**

**N a m a :** .....

**Jenis Kelamin :** Laki-laki / Perempuan

**Jabatan :** .....

**Alamat :** .....

Pertanyaan untuk Kepala Sekolah meliputi :

- a. Berapa besaran alokasi dana BOS yang di peroleh dari pemerintah ?
- b. Bagaimana proses penerimaan dana BOS ?
- c. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?
- d. Bagaimana proses penggunaan Dana BOS ?
- e. Apakah program BOS sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ?
- f. Bagaimana mekanisme pertanggung jawaban Dana BOS ?
- g. Darimana saja sumber pembiayaan SMPN 1 Gondanglegi untuk pengembangan sekolah ?
- h. Bagaimana Untuk pembangunan gedung atau renovasi yang membutuhkan biaya besar ?
- i. Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dari sekolah kepada pemerintah ?
- j. Bagaimana sosialisasi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dari sekolah kepada komite, guru,serta walimurid ?
- k. Bagaimana evaluasi dari mulai pendataan, dan alokasi dana BOS, sosialisasi, penyaluran, pengambilan, penggunaan,serta pertanggung jawaban Dana BOS ?
- l. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS
- m. Bagaimana kinerja bendahara dalam mengelola keuangan ?
- n. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah ?

**KOMUNIKASI**

- a. Berapa besaran alokasi dana BOS yang di peroleh dari pemerintah ?
- b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?
- c. Bagaimana sosialisasi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dari sekolah kepada komite, guru,serta walimurid ?
- d. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah ?

**STRUKTUR BIROKRASI**

Ditujukan kesiapakah pertanggungjawaban Dana BOS ?

**SUMBERDAYA**

- a. Bagaimana proses penerimaan dana BOS ?
- b. Bagaimana peran penanggungjawab dana BOS dinas pendidikan terhadap penyaluran dana BOS ?
- c. Darimana saja sumber pembiayaan SMPN 1 Gondanglegi untuk pengembangan sekolah ?
- d. Bagaimana Untuk pembangunan gedung atau renovasi yang membutuhkan biaya besar ?
- e. Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dari sekolah kepada pemerintah ?
- f. Bagaimana evaluasi dari mulai pendataan, dan alokasi dana BOS, sosialisasi, penyaluran, pengambilan, penggunaan, Serta pertanggung jawaban Dana BOS ?

**DISPOSISI**

- Bagaimana proses penggunaan Dana BOS ?
- Apakah program BOS sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ?
- Bagaimana mekanisme pertanggung jawaban Dana BOS ?
- Bagaimana kinerja bendahara dalam mengelola keuangan ?

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN BENDAHARA**

**1. Identitas Informan**

- N a m a : .....
- Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
- Jabatan : .....
- Alamat : .....

Pertanyaan untuk Bendahara Sekolah meliputi :

- a. Apakah dalam program penggunaan dana BOS di sekolah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
- b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS oleh bendahara kepada komite dan kepala sekolah ?
- c. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RKAM?
- d. Bagaimana proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) ?
- e. Apa faktor-faktor yang mendukung dalam implementasi program BOS dan menghambat, serta bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut ?
- f. Bagaimana penggunaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran ?

**KOMUNIKASI**

Bagaimana proses sosialisasi program BOS oleh bendahara kepada komite dan kepala sekolah ?

**STRUKTUR BIROKRASI**

Ditujukan kesiapakah pertanggungjawaban Dana BOS ?

**SUMBERDAYA**

- a. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RKAM?
- b. Bagaimana proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) ?
- c. Apa faktor-faktor yang mendukung dalam implementasi program BOS dan menghambat,serta bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut ?

**DISPOSISI**

- a. Apakah dalam program penggunaan dana BOS di sekolah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
- b. Bagaimana penggunaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran ?

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KOMITE SEKOLAH**

**1. Identitas Informan**

Nama : .....

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Jabatan : .....

Alamat : .....

Pertanyaan untuk Ketua Komite Sekolah meliputi :

- a. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam proses penyusunan Rencana Anggaran pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)?
- b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS Dari kepala sekolah kepada komite?
- c. Apakah Komite sekolah mengetahui pemanfaatan dana BOS yang dilakukan di SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang ?
- d. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh komite ?
- e. Apakah Komite selalu mengetahui setiap pengeluaran dalam pelaksanaan dana BOS di SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang ?

- f. Apakah Komite juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dana BOS pada SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang ?
- g. Apakah sekolah pernah menerima pengaduan masyarakat terkait pengelolaan dana BOS ?
- h. Apakah sekolah melaporkan pengelolaan dana BOS kepada Komite Sekolah ?
- i. Bagaimanakah publikasi mengenai penggunaan dana BOS di SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang ?

#### KOMUNIKASI

- a. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS Dari kepala sekolah kepada komite ?
- b. Apakah sekolah pernah menerima pengaduan masyarakat terkait pengelolaan dana BOS ?
- c. Apakah sekolah melaporkan pengelolaan dana BOS kepada Komite Sekolah ?
- d. Bagaimanakah publikasi mengenai penggunaan dana BOS di SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang ?

#### STRUKTUR BIROKRASI

Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh komite ?

#### SUMBERDAYA

- a. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) ?
- b. Apakah Komite selalu mengetahui setiap pengeluaran dalam pelaksanaan dana BOS di SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang ?

#### DISPOSISI

Apakah Komite sekolah mengetahui pemanfaatan dana BOS yang dilakukan di SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang ?

#### PEDOMAN WAWANCARA DENGAN WALIMURID

##### 1. Identitas Informan

Nama : .....

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

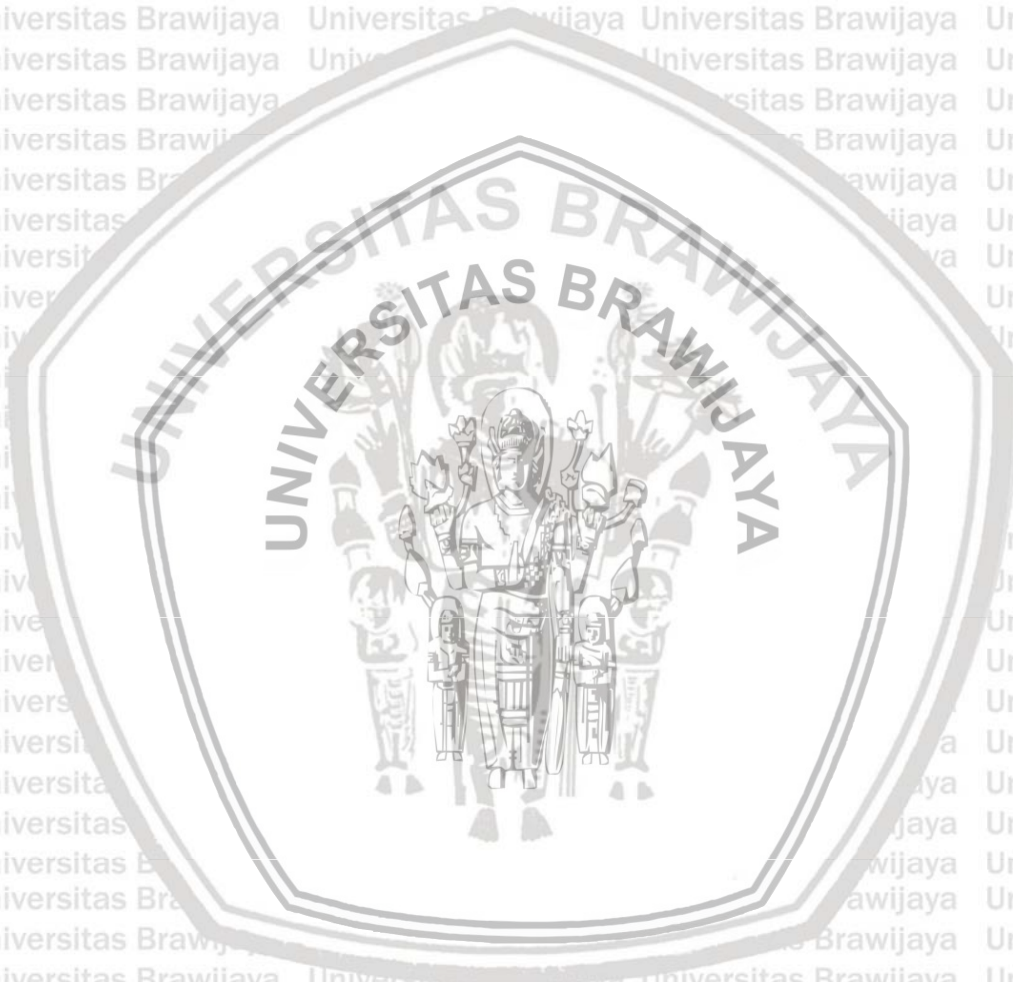
Jabatan : .....

Alamat : .....

##### 2. Pertanyaan untuk walimurid meliputi :

- a. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ? komunikasi
- b. Bagaimana proses sosialisasi pemanfaatan Dana BOS kepada walimurid ?

- c. Apa peran walimurid terhadap jalannya penyaluran Dana BOS ? sumberdaya
- d. Apa saja manfaat yang sudah dirasa oleh walimurid dengan adanya dana BOS ?



## LAMPIRAN 2

### TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

#### PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU ATAU TATA USAHA

##### 1. Identitas Informan

N a m a : Bapak Dodi Herwanto

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Operator Sekolah

Alamat : Ketawang

Tanggal wawancara : 10 Juli 2021

##### 1. Pertanyaan Penangung Jawab / Ketua Tim BOS Dinas pendidikan :

a. Bagaimana peran penanggungjawab dana BOS tata usaha atau guru terhadap penyaluran dana BOS ?

- Pertanggung jawaban dana BOS itu dilakukan secara rutin setiap dana BOS dicairkan maka disitulah pihak sekolah saya selaku operator membuat format untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS terhadap tersalurnya dana BOS ini serta penggunaannya di sekolah. Dana BOS dicairkan biasanya melalui tiga tahapan disetiap tahunnya tahap pertama dicairkan oleh pemerintah dibulan 1 Januari sampai Maret, kemudian tahap kedua 1 april sampai 1 Agustus dan tahap terakhir dicairkan 1 September hingga 1 Desember. Kami disini harus mempertanggung jawabkan dana BOS dengan menggunakan dua laporan melalui laporan Online dan dan menggunakan SPJ (surat pertanggungjawaban dana BOS) Lama waktu untuk mengerjakan SPJ ini biasanya selama 1 Bulan misalnya pada tahap satu maka harus selesai pada bulan Akhir Maret. Isi dari SPJ ini sangat lengkap harus berisikan nota-nota pengeluaran biaya dari pengambilan dana BOS. Setelah membuat SPJ secara tertulis maka membuat pertanggung jawaban di Online. Apabila mengurus pertanggung jawaban dana BOS secara online maka lebih ketat lagi dikarenakan harus memiliki bukti fisik lengkap dengan surat-surat keluar masuk perjalanan penggunaan pengeluaran dan penerimaan dana BOS itu sendiri. Misalnya seperti pada SPPD surat perintah perjalanan dinas, belanja barang dan modal harus menggunakan aplikasi siplah dari pemerintah (system inforasi pengadaan sekolah) diatas Rp. 500.000 harus dengan siplah agar lebih mudah dalam mencetak bukti -bukti pemeblian barang drai siplah. Jadi siplah seperti penyalur took barang yang akan di butuhkan oleh satuan Pendidikan di kabupaten Malang. Di Siplah misalnya saat menggunakan dana BOS kemudian dana tersebut di pakai untuk mengisikan surat permohonan, kuitansi barang, berita acara, pengadaan barang, membayar pajak dan melihat kondisi keadaan barang lebih mudah karena sudah menjadi satu di SIPLAH sehingga

sekolah tidak susah untuk membuat kuitansi secara sendiri-sendiri karena semuanya sudah sepaket tinggal mempertanggungjawabkan saja. Jika sekolah melakukan perbelanjaan sendiri dengan membeli peralatan dan perlengkapan sendiri maka tidak akan selengkap seperti di SIPLAH karena sekolah harus menyiapkan bukti pembelian sendiri. Kemudian ada aplikasi yang bernama MAMIN untuk membayar pajak yang dibeli peralatan yang dikelola oleh sekolah selama ini maupun perlengkapan biasanya sebesar 10% dari dana BOS yang digunakan. Laporan biasanya di setor juga ke Dinas Pendidikan kabupaten Malang mengikuti sesuai tahapannya tahap keluarnya dana BOS dari pemerintah oleh karena itu harus dibuatkan juga SPJ nya. Begitu juga pada tahap kedua dan tahap ketiga harus sama-sama disetor

- b. Bagaimana mekanisme penargetan, pendataan, dan alokasi dana BOS ?
  - Penargetan dana BOS menggunakan RKAS (Rencana kegiatan dan anggaran sekolah). Staf karyawan dan dewan guru semuanya mulai melakukan penyusunan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah nantinya. Kemudian kebutuhan dana BOS tersebut di susun juga terkait dengan sumber danannya dan berapa angka yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhannya semua itu. Tentunya penyusunan kebutuhan ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sekolah selama satu tahunnya. Pada lembar pembuktian kebutuhan dana BOS ini pada rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Pendataan dana BOS dilakukan secara melakukan mendatakan sekolah terhadap pihak dapodik cara untuk mendapatkan pendataan Pendidikan sudah ada pada Kemendikbud petunjuk Teknik dana BOS (2015:20) misalnya harus melengkapi Fotocopi dana BOS dengan format-format tertentu seperti yang ada pada aturan pemerintah yang berlaku. Lalu sekolah menyiapkan formulir yang harus diisi oleh peserta didik masing-masing kemudian sekolah melakukan verifikasi atas data yang sudah terkumpul baik dari data yang diperoleh dari siswa maupun guru. Minimal sekolah mengupdate data informasi siswa, karyawan dan guru pada satu semester disetiap kegiatan belajar mengajar jadi satu tahun dicek dua kali perubahan data tersebut. Data inilah yang digunakan untuk



dijadikan sumber dana BOS dan kegiatan lainnya. Alokasi dana BOS satu siswa mendapatkan dana BOS sebesar Rp. 1.100.000 setiap tahunnya yang dibayarkan pertahap biasanya transfer tahap 1 sebesar 30% tahap kedua mendapatkan pengalokasian dana sebesar 40% tahap ketiga sebesar 30%. Jadi banyak peserta didik mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 dikalikan dana BOS yang didapatkan sebesar Rp. 1.100.000 akan tetapi penghambat pengalokasian dana ini adalah cair dannya tidak sesuai dengan tahap pemberiannya seharusnya bulan Januari sudah turun dana tersebut malah turun ke tahap kedua pencairan dananya sehingga sekolah mencari hutang ddahulu untuk mencukupi kebutuhan Pendidikan di sekolah tersebut. Dan tahun ini pencairan dana BOS pada tahun 2021 Cuma cocok cairnya di tahap kedua saja. Pengalokasian dana juga di sesuaikan pada aturan pemerintah permendikbud no 8 tahun 2020. Dan dana BOS juga dibagi menjadi beberapa dalam alokasinya dana bos untuk regular yaitu untuk memberikan peningkatan untuk melayani warga sekolah disekolah tersebut. BOS Kinerja BOS untuk sekolah yang berperingkat baik sehingga mendapatkan dana lebih untuk dibiayai oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah dana BOS afirmasi yang diberikan untuk satuan Pendidikan yang berada diwilayah 3 T (Terluar. Tertinggal dan transmigrasi.)

c. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?

- Proses sosialisasi ini dengan memberitahukannya ke guru -guru , komite, wali murid saat pertemuan awal tahun ajaran baru biasanya dilakukan secara rutin. Serta sosialisasi pada madding dana BOS sehingga inshaallah penggunaan dana BOS Sudan sangat transparansi untuk semua kalangan di sekolah ini. Mengapa di pajang di madding dana BOS dikarenakan jika orangtua peserta didik ingin mengetahui penggunaan dana tersebut tinggal melihat madding yang sudah disiapkan dipojok dinding tersebut maslaah-masalah skeolah membelanjakan uang dana BOS untuk apa dan sebagainya. Misalnya pada penggunaan dana BOS Ini penggunaan perpustakaan yang mendapatkan dana sebesar Rp. 10.000.000 maka dana tersebut juga di belikan sarana-prasarana untuk memelihara

ruangan misalnya agar tidak rusak berat. Biasanya apabila dana BOS kurang mencukupi kebutuhan sekolah maka sekolah-sekolah di kabupaten Malang ini memakai dana untuk mencukupi sarana prasarana dikarenakan harga yang besar maka dana BOS banyak berkurang. Namun tetapi penggunaan dana BOS untuk membeli sarana prasarana ini ada juga menguntungkan sekolah untuk mengupdate teknologi dan kenyamanan peserta didik. Misalnya penggunaan dana BOS yang di berikan oleh pemerintah digunakan untuk membeli laptop sebesar Rp. 6000.000 maka biaya pemeliharannya sebesar 30%. Maka hal ini juga mengurangi dana BOS yang didapatkan. Hal ini juga mengurangi kegiatan -kegiatan yang harus dilakukan oleh sekolah misalnya mengikuti dan menyelenggarakan lomba -lomba maka tidak bisa mengikuti lomba-lomba tersebut dikarenakan dana sudah terserap kepada sarana dan prasarana digunakan untuk mengupdate sarana prasarana seperti pemasangan wifi dan pemberbaruan laboratorium.

d. Bagaimana mekanisme penyaluran, pengambilan, penggunaan, Serta pertanggung jawaban Dana BOS ?

- Cara menyalurkan dana BOS adalah dengan memberikannya pertahap biasanya keluar dananya langsung ke rekening sekolah caranya lebih detail seperti ini dengan memasukkan nomor rekening ke dapodik, inforasi yang ada di dapodik kemudian di validasi oleh kemendikbud dan bank. Apabila informasi sudah dinyatakan valid maka data dikirim ke director jendral bendahara untuk kemudian dicairkan dana yang sudah dicairkan akan mendapatkan surat SP2D untuk kemudian dikirim dana tersebut kesekolah yang bersnagkutan. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara dan kepala sekolah mengambilnya tidak boleh langsung semuanya pada tahap 1 misalnya 100.000.000 dana maka yang diambil harus secara bertahap sedikit demi sedikit pengambilannya menggunakan SIPLAH juga di tahap 1 begitu juga tahap kedua dan seterusnya Apabila terjadi pengambilan di tahap satu secara keseluruhan dana maka di tahap kedua tidak punya dana lagi ini merupakan kesalahan sekolah. Maka sekolah harus mencukupi dananya sendiri dengan cara hutang atau pinjam koperasi guru sekolah sini juga pernah hutang sampai 45 juta rupiah karena dannaya tidak cukup untuk di gunakan. Penggunaan dana BOS ini digunakan untuk semua kegiatan di sekolah misalnya mngembangkan peprustakaan, melaksanakan Masa orientasi peserta didik baru, mengatur kegiatan belajar mengajar, serta melakukan ekstrakurikuler, merawat sekolah, membayar gaji guru atau karyawan honorer.

e. Ditujukan kesiapakah pertanggung jawaban Dana BOS ?

- Pelaporan pengunnaan dana BOS ini ditujukan pada Wali murid , guru, dinas Pendidikan kabupaten Malang, serta pusat , siswa, dan secara online. Pusatnya ini adalah inspektorat Pendidikan pada akhir

tahun misalnya terkadang dana BOS digunakan untuk belanja modal kemudian modal ini digunakan untuk dijadikan asset milik negara seluruhnya. Jadi pada RKAS terdapat belanja Modal untuk membelanjakan dana BOS menjadi dana modal harus menggunakan bukti-bukti yang ada pada bagian sidak modal barang-barang yang dibutuhkan. Pertanggung jawaban dana BOS melalui hasil laporan kegiatan kemudian dicek dana tersebut dengan realisasi sumber dana untuk sekolah, membuat buku kas pembantu, umum, pajak, serta ditambahi dengan bukti dokumen audit yang digunakan untuk mengarsipkan kebutuhan sekolah yang sudah dibiayai. Baiknya data tersebut disimpan rapi sesuai dengan tanggalnya terjadi.

f. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS Dan bagaimana mengatasi hambatan tersebut ?

- Pendukungnya alhamdulillah mendukung selama ini faktor-faktornya seperti ini pemerintah lebih sadar dengan kebutuhan-kebutuhan sekolah yang harus dipersiapkan dengan dan bos ini sudah memberikan petunjuk Teknik tentang sosialisasi dan pengelolaan dana BOS ini sudah semakin mengerti bagaimana cara-caranya untuk menggunakannya. Kemudian faktor pendukung lainnya adalah terjalinnya hubungan baik antara guru, komite sekolah dan pengolah dana BOS, Guru juga mendukung terlaksananya dana BOS ini baik dari segi sumbangan tenaga dan uang, motivasi kerja yang lebih baik lagi dari sebelumnya dikarenakan sarana prasarana yang ada sudah baik. Faktor penghambat misalnya dengan adanya wabah Corona seperti sekarang ini maka, dana bos dari pusat harus diputar sedemikian rupa untuk dipakai dan diubah. Kegunaan RKAS turunnya sering lambat tidak sesuai dengan tahapan turunnya cara mengatasinya adalah dengan dinas Pendidikan kabupaten Malang mulai menghimbau dan memberikan jeda untuk merubah kebutuhan-kebutuhan yang dipakai oleh dana tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan sekolah seperti mengikuti perlombaan namun dikarenakan tidak ada maka untuk mencukupi kebutuhan membeli hand sanitizer. Merubah belanja juga harus memiliki ijin terlebih dahulu dari dinas Pendidikan tapi yang skalanya besar saja. Misalnya untuk membeli computer apabila tidak jadi membeli computer maka membuat surat permohonan tidak jadi. Kemudian hal-hal yang menghambat lainnya adalah. Membatasi sekolah untuk memperbaiki ruangan dan menambah ruang serta memberikan keleluasan kepada sekolah untuk memperbaiki Gedung yang rusak berat namun tidak diperbolehkan. Dana BOS belum bisa mendanai seluruh kebutuhan-kebutuhan sekolah

#### PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH

## 1. Identitas Informan

Nama : Mohammad Baihaqqi  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Kepala sekolah  
Alamat :  
Tanggal wawancara : 10 Juli 2021

### Pertanyaan untuk Kepala Sekolah meliputi :

- a. Berapa besaran alokasi dana BOS yang di peroleh dari pemerintah ?
  - Besaran dana BOS yang diperoleh di tingkat sekolah menengah pertama ini setiap anaknya perindividu mendapatkan biaya sebesar mulai dari kelas 1 hingga kelas 3 SMP semua sama yaitu Rp. 1.100.000
- b. Bagaimana proses penerimaan dana BOS ?
  - Dilakukan pertahap misalnya pada 1 Januari hingga maret tahap dua 1 april hingga Agustus dan tahap Ketiga 1 september hingga desember. Di tahun 2007 sudah terpisah pemberian dana BOS diantara kemennag dan kemendikbud semua sekolah mendapatkan dan BOS dengan aturan pendirian sekolah negeri , swasta didirikan langsung pada dinas Pendidikan sedangkan untuk madrasah didirikan pada depag. Kemudian sekolah itu membuka nomor rekening mengatasnamakan sekolah, sekolah memberikan nomor rekening tersebut ke tim BOS kabupaten atau kota, kemudian tim daerah mengirim nomor rekening sekolah kepada pusat atau provinsi
- c. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?
  - Proses sosialisasi ini dilakukan pada karyawan dan murid sewaktu penerimaan siswa baru. Bisa juga melalui webinar yang di lakukan oleh semua bendahara sekolah di SMP se Kabupauten Malang. Juga memanggil kepala sekolah, pengawas di kecamatan dan para inspektorat ditingkat kota maupun kabupaten
- d. Bagaimana proses penggunaan Dana BOS ?
  - Penggunaan dana BOS seharusnya disesuaikan dengan RKAS. Dana BOS harus dipakai untuk membayar gaji karyawan honorer sebesar 50%, menerima peserta didik baru , melaksanakan tes ujian, harian, semester dll.
- e. Apakah program BOS sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ?
  - Sudah apabila ada kesalahan agar tidak menjadi keliru dalam memberikan informasi maka menggunakan komite sebagai pihak ketiga untuk dijadikan pihak penengah bisa juga menjadi pihak sharing masalah-masalah yang terkait dengan dana BOS ini.
- f. Bagaimana mekanisme pertanggung jawaban Dana BOS ?

- Cara untuk tanggung jawab dengan cara mengerjakan setiap laporan-laporan pada tahap-tahap cairnya dana BOS dan mengacu RKAS, laporan online dan membuat SPJ per tahap secara rutin agar tertata kebutuhan kebutuhan dan pelaksanaan pengendalian dana BOS ini. Apabila tidak membuat laporan-laporan ini maka akan kesulitan untuk mencairkan dana berikutnya.

g. Darimana saja sumber pembiayaan SMPN 1 Gondanglegi untuk pengembangan sekolah ?

- Sumber biaya sekolah itu dari dana BOS dan Komite itu sendiri

h. Bagaimana Untuk pembangunan gedung atau renovasi yang membutuhkan biaya besar ?

- Pembiayaan Gedung dilakukan pada DAPODIK dana alokasi Khusus. Misalnya kemarin saat akan menggunakan dana BOS maka ruangan tersebut harus yang ada didalam wilayah DAK dan komite terlebih dahulu baru bisa di rehab.

i. Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dari sekolah kepada pemerintah ?

- Dengan memakai surat laporan online juga BPK (badan pemeriksa keuangan) turut ikut campur didalamnya dan inspektorat pusat

j. Bagaimana sosialisasi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dari sekolah kepada komite, guru,serta walimurid ?

- Mempertanggung jawabkan dengan belanja dan anggaran belanja tersebut harus di berikan saat kegiatan rapat Bersama, workshop.

k. Bagaimana evaluasi dari mulai pendataan, dan alokasi dana BOS, sosialisasi, penyaluran, pengambilan, penggunaan, Serta pertanggung jawaban Dana BOS ?

- Evaluasi di lihat Kembali oleh inspektorat kabupaten dan BPK pusat secara langsung terjun untuk melihat pendanaan yang sudah digunakan pernah disini terkena sanksi dikarenakan di gunakan uang tersebut tidak jelas maka oleh pemerintah dana yang ada tidak boleh dibelanjakan. Perbelanjaan harus ada nota lalu untuk digunakan perlu menunggu kabar dari pemerintah kabupaten uang yang sisa harus di rekeningkan Kembali bukan malah di kaskan dan dipakai. Pendataan jika terjadi kesalahan dalam mendata maka sekolah meminta wali murid untuk merubah data agar NISN pserta didik bisa keluar. Evaluasi terhadap sosialisasi dana BOS insshaallah sudah dilakukan semaksimal mungkin dengan adanya madding sekolah yang menginformasikan penggunaan dana BOS untuk apa saja dan memberikan pelayanan informasi pada saat pertemuan dengan wali murid siswa di setiap semester barunya artinya selama 1 tahun terdapat dua kali pelaporan dana BOS ini. Cara menyalurkan, mengambil dan menggunakan menurut saya selama ini sudah sesuai dengan petunjuk Teknik yang ada di dalam pemerintah mengenai pengaturan dana BOS ini. Proses menyalurkan dana tidak ada selama ini kesalahan yang dilakukan oleh pihak kita yang berat

dikarenakan apabila terjadi kesalahan yang berat maka sekolah akan mendapatkan hukuman dengan tidak mendapatkan dana BOS lagi. Proses menyalurkan ini setiap peserta didik mendapatkannya dan merasakan manfaatnya.

l. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS

- Faktor penghambatnya cair dan nya ini sangat lama tidak sesuai faktor pendukungnya pihak sekolah sudah bisa menutupi kekurangan dana bos tersebut disaat membutuhkan dana tersebut Faktor pendukung yang lainnya adalah pada Permendikbud no 161 Tahun 2014 telah dijadikan sebagai cara dan pedoman untuk melakukan penyusunan RKAS didalam peraturan itu juga sudah dijelaskan apa saja yang bisa digunakan untuk dan nya atau larangannya. Penggunaan dana BOS sudah transparansi, jika terjadi kesalahan dalam Menyusun RKAS maka pihak sekolah dengan sigap menggantinya agar tidak ada lagi kekeliruan. Faktor penghambatnya lama dalam mencairkan dana ini,

m. Bagaimana kinerja bendahara dalam mengelola keuangan ?

- Sudah bagus sangat tertib contohnya Ketika aka nada kegiatan ujian maka SPJ di buat oleh panitia ujian karena kebutuhan-kebutuhan yang tahu secara lengkap adalah panitia ujian sehingga bendahara tinggal melakukan pengendalian saja

n. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah ?

- Semua kebutuhan yang ada disekolah ini memerlukan pengesahan dari kepala sekolah maka peranannya sangat penting dikarenakan kepala sekolah adalah sosok yang di butuhkan tanda tangannya kemudian jika sudah disetujui penggunaan dana tersebut maka pelaksanaan pembelian belanja barang dapat dilakukan. Kepala sekolah juga sering mengajak sharing Bersama dengan guru dan komite untuk menggunakan dana BOS ini.

## **PEDOMAN WAWANCARA DENGAN BENDAHARA**

### **1. Identitas Informan**

N a m a : Bu Nurul Hidayati  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Jabatan : Bendahara  
 Alamat : JL. Diponegoro 1 RT 01 RW 01 Banjarejo  
 Tanggal Wawancara : 10 Juli 2021

**Pertanyaan untuk Bendahara Sekolah meliputi :**

a. Apakah dalam program penggunaan dana BOS di sekolah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

- Alhamdulillah sudah semuanya sudah di lakukan seperti yang ada di dalam peraturan pemerintah mulai dari membuat laporan hingga mencairkan dana berpegang dengan pedoman dari ketentuan pemerintah sudah seperti yang ada pada Peraturan Menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2020 yang menjelaskan mengenai pengoahan dana BOS dari pemerintah disitu sudah terlaksakan dengan baik dari pihak sekolah.

b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS oleh bendahara kepada komite dan kepala sekolah ?

- Bendahara memberitahukan mengenai pembelian belanja barang dan sebagainya kepada komite dan kepala sekolah selalu memberitahukan informasi akan penggunaan dananya walaupun dalam jumlah yang kecil selalu di notakan dan diberi kan kepada kedua pihak itu agar mereka juga mengerti penggunaan uang untuk apa saja. Program-program yang didanai bos adalah semua kegiatan yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar lebih diutamakan.

c. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RKAM?

- Semuanya semua guru, staff karyawan pengelola usaha sekolah dan komite sekolah semuanya turut bergabung dalam Menyusun kebutuhan kebutuhan sekolah agar bisa tertangani semua kebutuhan sekolah dengan sempurna dikarenakan kebutuhan dari semua divisi sudah tersalurkan dan mndapatkan rincian berapa dana untuk digunakan mendanai kebutuhan sekolah di setiap bidangnya.

d. Bagaimana proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) ?

- Di susun selama satu tahun sekali menggunakan aplikasi computer word kemudian diajukan dalam bentuk dan format yang biasanya digunakan yaitu RKAS. Pertamanya melakukan pembentukan tim yang bisa Menyusun RKAS. Kemudian melakukan Analisa kondisi satuan Pendidikan, membuat penetapan akan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam waktu satu tahun, Melihat kedepannya tantangan yang akan di alami oleh sekolah kemudian menjadikan hal tersebut sebagai penguat dalam Menyusun dana BOS.

e. Apa faktor-faktor yang mendukung dalam implementasi program BOS dan menghambat, serta bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut ?

- Faktor penghambatnya adalah dana BOS yang keluar tidak cair atau lambat cairnya atau bahkan dana BOS tersebut keluar tidak sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya di berikan sehingga sekolah kewalahan menutupi hal ini dikarenakan dana sangat penting untuk menjalankan sekolah. Pendukungnya adalah dengan adanya komite semua masalah terkait dana BOS bisa diselesaikan secara cepat dan Bersama dikarenakan Komite memiliki dana cadangan yang bisa untuk sementara digunakan.

f. Bagaimana penggunaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran ?

- Penggunaannya dana BOS ini dengan mengadakan workshop agar terus meningkat mutu pendidikannya dikarenakan hasil dari kebutuhan yang sudah tercukupi ini kemudian digunakan dan dianalisis dari proses penyusunannya kemudian digunakan sosialisasi dana bos serta melaksanakan penggunaan alokasi dana. Kemudian yang terakhir melakukan pelaporan data dana BOS. Penggunaan dana BOS harus bersifat akuntabilitas, Transparan dan objektif.

Ditujukan kesiapakah pertanggungjawaban Dana BOS ?

- Kepada kepala sekolah dan bendahara dalam lingkup dalam sekolah diluar sekoalah sebagai pihak eksternal sangat banyak mislanya BPK,dinas Pendidikan kabupaten Malang, Inspektorat pusat dan online.





## PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KOMITE SEKOLAH

### 1. Identitas Informan

Nama : Bapak Sunan  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Ketua Komite sekolah  
Alamat : Urek-urek RT 26 RW 04  
Tanggal Wawancara : 11 Juli 2021

### **Pertanyaan untuk Ketua Komite Sekolah meliputi :**

- a. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) ?
  - Kami melakukan penyusunan RKAS dengan melakukan Kerjasama Bersama para guru dan stake holder jadi tidak jalan sendiri-sendiri dalam menyusunnya saat Menyusun kolektif dan terperinci agar kebutuhan sekolah dapat ditemukan dan di danai.
- b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS Dari kepala sekolah kepada komite ?
  - Dengan mengadakan pertemuan yang rutin digelar diawal masuk peserta didik atau ajaran baru. Namun dikarenakan saat ini ada pandemi corona maka sosialisasi untuk mengundang banyak orang menjadi vakum dan terus lanjut sampai pada akhirnya pemberhentian sosialisasi sementara dahulu.
- c. Apakah Komite sekolah mengetahui pemanfaatan dana BOS yang dilakukandi SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang ?
  - Mengetahui dan memang komite harus mengetahui dikarenakan komite menjadi control pengendali penggunaan dana BOS disekolah
- d. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh komite ?
  - Caranya adalah dengan tiada henti-hentinya untuk melakukan pengadaan pengawasan sosialisasi anggaran penggunaan dana BOS disamping itu komite memiliki peran sesuai dengan kemendiknas no 44 tahun 2002 sebagai pendukung, memberikan pertimbangan, pengendali dan pihak tengah mediator antara masyarakat dan pemerintah. Fungsi komite sekolah adalah untuk mendukung tumbuh perhatian masyarakat akan Pendidikan. Membentuk Kerjasama dengan masyarakat sebaik mungkin. Menampung aspirasi masyarakat. Turut menyumbangkan pertimbangan, masukan terhadap satuan Pendidikan saat akan merinci RAKS.
- e. Apakah Komite selalu mengetahui setiap pengeluaran dalam pelaksanaandana BOS di SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang ?
  - Mengetahui dikarenakan setiap pengeluaran dana yang ada penggunaan dana BOS selalu ditanda tangani juga oleh komite sebagai pihak yang mengetahui secara adminisitrasi dari surat persuratan.

f. Apakah Komite juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dana BOS pada SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang ?

- Iya, tentunya komite turut mengkorek kegiatan-kegiatan pendanaan disekolah agar komunikasi antar pihak tetap berjalan.

g. Apakah sekolah pernah menerima pengaduan masyarakat terkait pengelolaannya BOS ?

- Tentunya pernah namun tidak sering saat itu dilaksanakan rapat Bersama dengan wali murid siswa mengenai dana BOS. Pada pertemuan dan rapat namun ada beberapa orang yang tidak setuju akan hasil penggunaan dana BOS Itu dikarenakan lebih baik digunakan untuk mendanai yang lainnya yang lebih penting dan membutuhkan dana secara cepat.

h. Apakah sekolah melaporkan pengelolaan dana BOS kepada Komite Sekolah ?

- Iya sekolah selalu melaporkannya dalam penggunaan dana BOS itu sendiri mengenai dana BOS yang boleh di gunakan ataupun yang tidak boleh digunakan menggunakan dana BOS ini

i. Bagaimanakah publikasi mengenai penggunaan dana BOS di SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang ?

- Di publikasikan kepada walimurid peserta didik lewat pertemuan - pertemuan. Kemudian disampaikan terhadap peserta didik. Jika tidak dijelaskan maka akan terjadi kesalah pahaman dalam berkomunikasi. Oleh karena itu publikasi selalu terjaga dan rutin dilaksanakan disetiap tahunnya dengan walimurid yang dipilih dari ratusan wali murid yang ada.

## PEDOMAN WAWANCARA DENGAN WALIMURID

### 1. Identitas Informan

Nama : Bu Etik Nur Halimah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jabatan : Wali Murid  
Alamat : JL Raya Ketawang NO 22 Rt 29 Rw 004  
Tanggal Wawancara : 10 Juli 2021

### 2. Pertanyaan untuk walimurid meliputi :

- a. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ? **komunikasi**
  - Sebelum adanya pandemi corona ini proses sosialisasi dilakukan oleh komite sekolah dengan mengadakan rapat Bersama wali murid peserta didik yang bersekolah disini. Namun karena situasi sekarang ini sedang buruk maka, belum pernah dilakukan sosialisasi lagi akhir-akhir ini dikarenakan sekolah yang melaksanakan online dan larangan dari pemerintah untuk berkerumun dan ramai -ramai.
- b. Bagaimana proses sosialisasi pemanfaatan Dana BOS kepada walimurid ? **struktur birokrasi**
  - Sekolah memberikan pemberitahuan dengan cara lainnya misalnya memberikan selebaran yang berisikan pemanfaatan dan penggunaan dana BOS untuk apa saja dana BOS itu.
- c. Apa peran walimurid terhadap jalanya penyaluran Dana BOS ? sumberdaya
  - Peran walimurid hanya beberapa orang tua peserta didik yang dipilih yang dapat mengikuti rapat mengenai dana BOS hanya orang -orang pilihan saja yang berkontribusi untuk turut mengevaluasi penggunaan dana BOS. Walimurid bekerjasama dengan komite Bersama-sama untuk mengawasi penggunaan dana BOS itu sendiri
- d. Apa saja manfaat yang sudah dirasa oleh walimurid dengan adanya dana BOS ? **disposisi**
  - Banyak sekali diantaranya buku paket untuk kegiatan pembelajaran tidak usah repotlagi orang tua peserta didik untuk membelinya, Proses kegiatan belajar mengajar semakin baik , ruangan -ruangan layak untuk dipakai dalam mengajar kemudian taman -taman terawat dan mnyejukkan pandangan dikarenakan ada dana BOS untuk digunakan mendanai semua aktivitas ini.

## PEDOMAN WAWANCARA DENGAN WALIMURID

### 1. Identitas Informan

Nama : Bu yati  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jabatan : Wali Murid  
Alamat : Gondanglegi  
Tanggal Wawancara : 10 Juli 2021

### 3. Pertanyaan untuk walimurid meliputi :

- a. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ? **komunikasi**
  - Sebelum adanya pandemi ini melalui penayangan LCD proyektor disuatu kelas, Sesudah pandemi juga diinformasikan mengenai penggunaan dana BOS yang terkait dengan anggaran-anggaran yang memiliki hubungan dengan kegiatan belajar mengajar melalui lembaran kepada wali murid siswa.
- b. Bagaimana proses sosialisasi pemanfaatan Dana BOS kepada walimurid ? **struktur birokrasi**
  - Pemanfaatan dana BOS ini terbukti lancar dengan tidak adanya penarikan lagi dana -dana untuk menutupi kekurangan dana yang dibutuhkan iuran SPP tidak ada juga hanya infaq sebesar Rp. 50.000 Apalagi penarikan uang yang terlalu banyak untuk kelas tujuh sudah tidak ada penarikan yang macam-macam sekolah dalam meminta pungutan terhadap peserta didik.
- c. Apa peran walimurid terhadap jalanya penyaluran Dana BOS ? sumberdaya
  - Ada perannya yaitu sebagai pengawal dana BOS sampai dan digunakan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah Bersama dengan komite sekolah dan kebanyakan wali murid yang dapat ikut dalam kegiatan penyaluran dana BOS adalah orang tua peserta didik yang sudah di pilih oleh sekolah.
- d. Apa saja manfaat yang sudah dirasa oleh walimurid dengan adanya dana BOS ? **disposisi**
  - Sangat terbantu dikarenakan pada proses kegiatan belajar mengajar. Dana BOS di sosialisasikan. Dana BOS juga tidak membuat sekolah untuk menarik lagi uang kepada orang tua peserta didik. Sosialisasi selama ini pernah di bannerkan oleh sekolah agar semua wali murid tahu program dan kegiatan apa saja yang sudah di biayai menggunakan dana BOS sehingga lebih transparan lagi.

## PEDOMAN WAWANCARA DENGAN WALIMURID

### 1. Identitas Informan

Nama : Pak Eko  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Wali Murid  
Alamat : Gondanglegi  
Tanggal Wawancara : 10 Juli 2021

### 4. Pertanyaan untuk walimurid meliputi :

- a. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ? **komunikasi**
  - Anak saya yang bersekolah disini sudah sangat terbantu dengan adanya dana BOS dikarenakan sekolah sudah mendapatkan anggaran dana untuk menyediakan kegiatan tertentu dan program-program tertentu untuk di selesaikan dan dibiayai.
- b. Bagaimana proses sosialisasi pemanfaatan Dana BOS kepada walimurid ? **struktur birokrasi**
  - Pada umumnya melalui pertemuan dengan wali murid dana BOS yang sudah digunakan di berituhkan kepada kami dan biasanya dana BOS digunakan untuk mendanai kebutuhan -kebutuhan peserta didik itu sendiri untuk mendukung kebutuhan peserta didik
- c. Apa peran walimurid terhadap jalanya penyaluran Dana BOS ? sumberdaya
  - Biasanya perannya yaitu dengan melakukan koordinasi bersama wali kelas dalam menilai tepat guna sasaran penggunaan dana BOS ini.
- d. Apa saja manfaat yang sudah dirasa oleh walimurid dengan adanya dana BOS ? **disposisi**
  - Yang pertama sangat meringankan beban orang tua dari faktor kebutuhan ekonomi, kedua membantu proses kegiatan belajar mengajar didalam kelas dan diluar kelas peserta didik lebih baik lagi. Dari sebelumnya yang tidak ada dana BOS

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Ibu Nurul Hidayati Selaku Bendahara Sekolah



Wawancara dengan Bapak Sunan selaku Ketua Komite Sekolah



Wawancara dengan Ibu Yati selaku Wali Murid



Wawancara dengan Bapak Muchamad Baihaqi selaku Kepala Sekolah



Wawancara dengan Bapak Eko selaku Wali Murid



Wawancara dengan Bapak Dodi Selaku Operator Sekolah Tata Usaha



LAMPIRAN 4

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan 1 Kopanjen Telpn 0341-393935 Faximile 0341-393937  
laman : <http://dispendik.malangkab.go.id> - email : [dispendik@malangkab.go.id](mailto:dispendik@malangkab.go.id)  
KEPANJEN 65163

SURAT IZIN

NOMOR: 420/2021/35.07.101/2021

TENTANG  
PENELITIAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

Dasar : Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Nomor:  
6501/UN10.F03.01/PP/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang permohonan  
izin penelitian. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan ini:

MEMBERI IZIN

Kepada  
Nama : DYAH AYU SEKTI NURTYAS GIGIH PANGANTI  
Jabatan : Mahasiswa Universitas Brawijaya  
Alamat : Jalan MT Ha.yono 163, Malang 65145  
Untuk : Melaksanakan Penelitian di SMP Negeri 1 Gondanglegi pada bulan Juni  
s.d. Agustus 2021 dengan judul "Implementasi Program Bantuan  
Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri  
(SMPN) 1 Gondanglegi Kabupaten Malang".

Kepanjen, 6 Juli 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MALANG



EACHMAT HARDIJONO

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681107 198903 1 008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 6501/UN10.F03.01/PP/2021 28 Juni 2021  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian dan Kesbang, Izin Wawancara Konsumen,  
Izin Wawancara Karyawan

Yth. Kepala sekolah SMP Negeri 1 Gondanglegi  
Jl. Raya ketawang no 4 Krajan ketawang kecamatan Gondanglegi 65174

Berkeanaan dengan proses pembelajaran dan perkuliahan Program Magister S2 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, sebagai tugas akhir mahasiswa diwajibkan melaksanakan penelitian untuk itu mahasiswa kami :

- Nama : DYAH AYU SEKTI NURTYAS GIGIH PANGANTI
- NIM : 196030300011001
- Tingkat / Semester : 3 (Tiga)
- Handphone : 08819838976
- Program Studi/Jurusan : Manajemen Pendidikan Tinggi / Jurusan Administrasi Negara/Publik
- Judul Penelitian : Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Gondanglegi Kabupaten Malang
- Dosen Pembimbing : 1. BAMBANG SANTOSO HARYONO, DR., MS.  
2. Dr. Lely Indah Mindarti, MSi
- Penelitian di : SMP Negeri 1 gondanglegi

Mohon dengan hormat diperkenankan / diijinkan melaksanakan ijin penelitian, wawancara konsumen, wawancara karyawan di Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, rencana akan diselenggarakan pada bulan : Juni - Agustus 2021

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,  
  
Yusri Abdullah, S.Sos., M.Si., Ph.D  
NIP. 197412272003121002

- Tembusan:
1. Dekan FIA.UB sebagai laporan
  2. Dosen Pembimbing
  3. Kepala sekolah
  4. Bendahara sekolah
  5. Komite sekolah

